



# **LAPORAN TAHUNAN KEMERDEKAAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN (KBB) DI INDONESIA**

*The* **WAHID** *Institute*  
*Seeding Plural and Peaceful Islam*

**“UTANG” WARISAN TAK KUNJUNG  
TERLUNASI**



## **TIM PENYUSUN**

### **Pelindung**

Yenny Zannuba Wahid

### **Supervisor**

Visna Vulovik

### **Penasehat Ahli**

M. Subhi Azhari

### **Koordinator**

Gamal Ferdhi

### **Anggota**

Alamsyah M. Dja'far

Andi Irawan

### **Kontributor**

Nurun Nisa

### **Alih Bahasa**

Utari Widura

### **Desain Sampul**

Putput

### **Tata Letak**

Dimas Ismail M.M

Diterbitkan atas kerjasama

*The* **WAHID** *Institute*  
*Seeding Plural and Peaceful Islam*

dan

Activity supported by the  
Canada Fund for Local Initiatives  
Activité réalisée avec l'appui du  
Fonds canadien d'initiatives locales

**Canada** 

### **Alamat Redaksi**

The WAHID Institute

Jl. Taman Amir Hamzah No. 8

Jakarta 10320

Telp. 021-3928233 / 3145671

Fax. 021-3928250

E-mail: [info@wahidinstitute.org](mailto:info@wahidinstitute.org)

Website: [www.wahidinstitute.org](http://www.wahidinstitute.org) – [www.gusdur.net](http://www.gusdur.net)

© & ® 2015



## DAFTAR ISI

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SAMBUTAN DIREKTUR THE WAHID INSTITUTE .....</b>   | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b>  |
| A. Pengantar .....                                   | 1         |
| B. Tujuan Pemantauan .....                           | 1         |
| C. Pendekatan dan Sumber Data .....                  | 2         |
| D. Wilayah Pemantauan .....                          | 4         |
| <b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>              | <b>5</b>  |
| A. Agama (Religion) .....                            | 5         |
| B. Keyakinan (Belief) .....                          | 7         |
| C. Kebebasan atau Kemerdekaan? .....                 | 8         |
| D. Kebebasan Beragama .....                          | 10        |
| E. Pelanggaran Kebebasan Beragama .....              | 17        |
| F. Isu-Isu Terkait Kemerdekaan Beragama .....        | 20        |
| <b>BAGIAN III TEMUAN-TEMUAN .....</b>                | <b>27</b> |
| A. Trend Regulasi Keagamaan tahun 2014 .....         | 27        |
| B. Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan ..... | 32        |
| C. Kemajuan dan Praktek Baik .....                   | 40        |
| <b>BAGIAN IV ANALISIS .....</b>                      | <b>45</b> |
| A. Peristiwa Pelanggaran .....                       | 45        |
| B. Meningkatnya Praktik Baik .....                   | 50        |
| <b>BAGIAN V REKOMENDASI .....</b>                    | <b>53</b> |
| A. Kepada Pemerintah dan DPR .....                   | 53        |
| B. Kepada Aparat Kepolisian .....                    | 55        |
| C. Kepada Lembaga Yudikatif .....                    | 55        |
| D. Kepada Komnas HAM .....                           | 56        |
| E. Kepada Organisasi Keagamaan .....                 | 56        |

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Matriks 1 Pelanggaran, Intoleransi dan<br>Diskriminasi Januari – Desember 2015 ..... | 59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Matriks 2 Praktek Baik dan Toleransi Kehidupan<br>Beragama & Berkeyakinan Januari – Desember 2015 ..... | 103 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

# **SAMBUTAN DIREKTUR THE WAHID INSTITUTE LAPORAN AKHIR TAHUN KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN 2015**

The Wahid Institute secara rutin melakukan pemantauan mengenai dinamika kebebasan beragama dan berkeyakinan sejak tahun 2008. Untuk tahun 2015 ini, selain melaporkan “berita buruk”, kami juga harus *fair* mengakui bahwa ada “berita baik” mengenai perkembangan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Tanah Air.

Dalam hal berita baik, kami menemukan antara lain personil partai berbasis Islam yang menjadi pecalang dalam perayaan Nyepi di Bali, atau Gereja Injili di Indonesia yang ikut berpartisipasi menyumbangkan hewan qurban dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di Papua. Berita baik semacam ini tentu saja membawa optimisme akan terbangunnya kembali toleransi sekaligus menjadi bukti yang kuat bahwa pluralisme dan toleransi sudah sejak lama dipraktikan oleh masyarakat kita.

Meski demikian, berita tentang pembakaran rumah ibadah atau intimidasi kepada kelompok minoritas masih tetap terjadi. Berita buruk ini seharusnya mendorong kita semua, terutama pemerintah, untuk bekerja lebih keras lagi dalam mempromosikan toleransi antar pemeluk agama dan keyakinan, terutama di kalangan anak muda.

Dari Desember 2015 hingga Maret 2016, Wahid Institute bekerjasama dengan Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penelitian di 3 kota dan 3 kabupaten di Jawa Barat. Ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayahnya. Pemerintah Daerah adalah *state actor* yang bisa memperkuat, atau memperlemah, hak kebebasan beragama melalui regulasi serta aturan hukum sesuai dengan wewenangnya.

Dalam penelitian tersebut, kami mengidentifikasi adanya kecenderungan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang menyuarakan kepentingan kelompok intoleran. Hal ini disebabkan oleh lemahnya Pemerintah Daerah dalam mengatasi tekanan sosial dan politik dari kelompok intoleran, selain itu

juga diakibatkan sulitnya para pejabat yang berwenang di daerah tersebut untuk membedakan perannya sebagai pelayan masyarakat yang seharusnya *objective* dan *imparsial*, dengan peran mereka sebagai individu yang memiliki keyakinan, dan pendapat keagamaan yang diyakini.

Oleh sebab itu, dalam laporan tahun 2015 ini kami mendapati bahwa pelanggaran KBB terbesar dilakukan oleh aktor negara (*state actor*). Juga dalam laporan ini kami mencatat terjadi kenaikan jumlah peristiwa pelanggaran KBB dan intoleransi bila dibandingkan dengan tahun 2014. Kami menyimpulkan penyebab utama meningkatnya jumlah pelanggaran KBB pada tahun 2015, ini disebabkan oleh tidak adanya perubahan signifikan dalam pola penanganan kasus-kasus pelanggaran KBB, meskipun telah terjadi perubahan kepemimpinan nasional.

Harus diakui ada keinginan yang kuat, terutama dari Pemerintah Pusat, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan KBB dan intoleransi yang dianggap sebagai salah satu problem utama bangsa. Namun niat tersebut tidak kunjung diimplementasikan dengan langkah konkret dengan menuntaskan berbagai masalah yang masih menggantung, seperti masalah pengungsi umat Syiah Sampang, masalah GKI Yasmin, masalah pembakaran dan penutupan gereja-gereja di Aceh Singkil, masalah masjid di Manokwari dan Bitung dan berbagai permasalahan lainnya. Akibatnya korban pelanggaran masih terus mengalami pembiaran. Ibarat utang warisan, utang tersebut tak kunjung terlunasi.

Laporan tahun 2015 ini mencakup 25 wilayah pemantauan terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Riau, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, Papua.

Seperti kami kemukakan di awal, di tahun 2015 ini kami menggunakan pendekatan tambahan dalam melakukan pemantauan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini, yaitu tidak lagi hanya berfokus pada 'praktek buruk' melainkan secara serius mulai mengidentifikasi berbagai "praktek baik" yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat toleransi dan harmoni antar umat beragama.

Hal ini perlu kami lakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih



berimbang mengenai dinamika kehidupan keagamaan di tanah air. Temuan-temuan tersebut kami himpun melalui pemberitaan media baik cetak maupun elektronik, focus group discussion di beberapa daerah dan laporan dari jaringan WI. Pada tahun ini kami juga mengembangkan pengumpulan data melalui m-Pantau, yaitu media pengaduan masyarakat melalui SMS.

Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan tahun 2015 ini kami terbitkan agar dapat menjadi tambahan informasi yang berguna bagi semua kalangan yang menaruh perhatian pada dinamika kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Semoga laporan ini dapat membantu rekan-rekan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun langkah strategis dalam mengkampanyekan toleransi dan perdamaian.

Demikian pula agar Pemerintah dan lembaga yang berwenang dapat mengembangkan kebijakan dan pendekatan yang lebih tepat terkait perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), khususnya Desk KBB yang telah bekerja sama dalam program Penguatan Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Juga kepada *Canadian Fund for Local Inisiatif* atas dukungannya dalam peluncuran dan penerbitan laporan tahun ini.

Demikian sambutan ini dan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2015

**ZANNUBA ARIFAH CHAFSOH WAHID**

*Direktur The Wahid Institute*



# **BAGIAN I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pengantar**

Sejak 2008, the Wahid Institute mentradisikan membuat laporan kepada publik mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia, yang kami sebut dengan Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (KBB). Laporan KBB 2015 ini adalah laporan ke delapan yang diterbitkan The Wahid Institute.

Laporan hasil pemantauan ini diharapkan bisa menjadi masukan atau rekomendasi bagi pemerintah, parlemen, dan instansi pemerintah terkait, baik di pusat dan daerah dalam memperteguh serta memajukan komitmen mereka terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Laporan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku aparat pemerintah dalam menghadapi permasalahan KBB, serta dalam menyusun kembali rencana atau program yang berkaitan dengan KBB. Laporan ini juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti organisasi keagamaan, NGO, maupun akademisi yang menekuni isu-isu ini.

Dasar pemantauan dan pelaporan KBB ini adalah pasal 100 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Hak atas KBB merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang tersebut.

### **1.2 Tujuan Pemantauan**

Tujuan pemantauan juga mencakup realitas legal dan sosial, yakni pertama, memeriksa kelemahan dan inkonsistensi pengadopsian norma dan standar hak-hak asasi manusia internasional ke dalam hukum nasional. Kedua, membaca kelemahan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan mengenai KBB. Ketiga, menilai kelemahan mendasar atau kekurangan lainnya terkait penghormatan dan perlindungan KBB supaya dapat digunakan untuk perbaikan atau perubahan, dengan dampak terhapusnya intoleransi dan diskriminasi. Keempat, mengidentifikasi dan menganalisa pola pelanggaran yang

dilakukan aktor non-negara. Kelima, membangkitkan kepekaan pemerintah dan publik terhadap pemulihan hak korban; Keenam, membangkitkan kesadaran akan pentingnya kebebasan beragama atau berkeyakinan dihormati dan dilindungi, juga sebagai peringatan betapa bahaya menyebarkan kebencian atas dasar agama atau keyakinan.

### 1.3 Pendekatan dan Sumber data

Laporan ini menggunakan pendekatan metode berbasis peristiwa (*event-based methodology*) untuk memantau dan menggali data. Ini merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam pemantauan hak asasi manusia (HAM). Temuan dan data-data yang dikumpulkan kemudian diidentifikasi berdasarkan peristiwa, waktu, lokasi, tindakan pelanggaran, aktor, dan korban.

Pengumpulan data dalam penyusunan laporan dilakukan dalam beberapa metode. *Pertama*, pemantauan terhadap pemberitaan media nasional, lokal, cetak maupun elektronik. Termasuk di dalamnya media-media online. *Kedua*, data juga diperoleh berdasarkan informasi yang diberikan jaringan lembaga dan individu yang selama ini *concern* dalam isu-isu kebebasan beragama, di tingkat nasional maupun lokal. *Ketiga*, pemantauan melalui mobile Pantau KBB (mPantau), yaitu saluran pengaduan masyarakat melalui SMS yang dibangun The Wahid Institute yang menghimpun berbagai peristiwa keagamaan.

Sedangkan untuk analisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan kuantitatif dengan data-data pada tahun sebelumnya. Selain itu laporan ini menggunakan analisis kualitatif dengan menyorot kasus-kasus menonjol yang muncul dan menjadi tren pada tahun 2015.

Perlu kami garisbawahi di sini, data yang ada dalam laporan tidak menggambarkan keseluruhan peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah tidak semua peristiwa keagamaan di Indonesia diliput media dan terjangkau oleh jaringan daerah.

Adapun kategori tindakan yang masuk dalam cakupan laporan ini adalah:

1. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja

maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan beragama, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

2. Tindakan intoleransi atas nama agama, yaitu ketidakmauan untuk memperlakukan orang yang berbeda agama secara setara, termasuk di dalamnya ketidakmauan untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik dan profesional kepada orang-orang dari agama lain. Mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok, intimidasi, kekerasan bermotif pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.
3. Diskriminasi atas nama agama, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.
4. Peraturan perundang-undangan (*Regeling*) atau surat keputusan (*Beschikking*) di pemerintah tingkat pusat dan daerah yang diduga melanggar, maupun mendukung prinsip jaminan kebebasan beragama.
5. Kemajuan dan praktek baik yang terjadi dalam penegakan dan jaminan hak-hak beragama dan memajukan toleransi di Indonesia.

#### **1.4 Wilayah Pemantauan**

Wilayah pemantauan dalam laporan ini adalah wilayah-wilayah yang dilaporkan telah terjadi peristiwa-peristiwa keagamaan. Laporan tahun 2015 ini mencakup 25 wilayah pemantauan terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Riau, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, Papua.

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 1.1 Agama (*Religion*)

Merumuskan definisi agama, sebuah kerumitan tersendiri. Tidak ada pengertian relatif tegas tentang agama pada instrumen internasional juga nasional. Bahkan kata agama dan keyakinan disebut sejajar dengan kata “atau”; *religion or belief*.

Komentar Umum 22 paragraf 2 yang meneroka pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, diangkat ICCPR, dan selanjutnya disebut Konvensi Hak Sipil) menjelaskan: Agama atau kepercayaan tidak hanya merujuk pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional, atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Namun agama atau kepercayaan yang baru saja dibentuk, juga masuk dalam kategori “kepercayaan” atau “agama”.<sup>1</sup> Agama atau kepercayaan dalam pasal 18 juga mencakup perlindungan terhadap apa yang disebut kepercayaan-kepercayaan tauhid (*theistic*), non-tauhid (*non-theistic*), dan ateistik (*atheistic*), sekaligus hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun.<sup>2</sup> Itu artinya pengertian agama dan kepercayaan memang tampak begitu luas.

Sejumlah ahli dengan beragam latar belakang dan pendekatan mendefinisikan agama. Jika diperas setidaknya ada lima pendekatan yang digunakan: antropologi, psikologi, sosiologi dan fenomenologi.<sup>3</sup>

Pendekatan antropologi berusaha melihat agama sebagai aktivitas dan ekspresi keagamaan dipandang sebagai bentuk-bentuk dorongan fisiko-kultural manusia. Pendekatan psikologi lebih dalam dari yang pertama. Agama dilihat bukan sekedar dorongan rasa takut dan rasa kagum, melainkan lebih sublim

---

<sup>1</sup> UNHCHR, “General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion ( Art. 18) : . 07/30/1993. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22. (General Comments)” paragraph 2 <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?OpenDocument> (diakses 4 Januari 2014)

<sup>2</sup> UNHCHR, “General Comment No. 22” paragraph 2

<sup>3</sup> Ahmad Norma Permata, “Pendahuluan Editor,” 22. Tampaknya pembagian ini mengikuti tujuh pendekatan studi agama yang dibuat Petter Connolly: antropologis, feminis, fenomenologis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis. Lebih jauh lihat Petter Connolly, ed, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta, 2009), cetakan kedua.

dari itu. Agama merupakan hubungan batin antara seorang individu dengan kekuatan di luar dirinya.

Sedang fenomenologi berusaha melihat intisari atau hakikat dari agama dan pengalaman keagamaan. Pendekatan ini melihat di balik berbagai ekspresi pemikiran, tindakan, dan interaksi sosial, keberagamaan manusia memiliki nuansa batin yang lebih dari sekedar persoalan psikologi. Ia sebuah perjumpaan dengan sesuatu yang melebihi dan mengatasi kefanaan dunia, yang suci dan agung. Adapun pendekatan teologis meletakkan agama sebagai prerogatif Tuhan. Realitas sejati agama adalah sebagaimana yang dikatakan ajaran agama masing-masing.

Sampai di sini, pengertian agama mungkin masih seperti membingungkan. Meski begitu, ada satu kriteria yang selalu sama dan muncul, yakni kepercayaan dan keyakinan pada kekuatan besar di luar diri seseorang. Kriteria itu tentu tidak cukup membantu mendefinisikan agama dengan cukup komplet. Dibutuhkan “kriteria” dan “unsur-unsur” lainnya, yang semakin komplet maka semakin membantu meski langkah ini seringkali juga menjebak dan reduksionistik.

Untuk keperluan pengerangkaan, kriteria yang dibuat Kent Greenawalt dalam *Religion as a Concept in Constitutional Law* (1984) penting digunakan di sini. Ia mencatat sejumlah kriteria yang umumnya ada dalam agama-agama besar.<sup>4</sup>

Pertama, keyakinan akan Tuhan atau “Yang Tertinggi”. Kedua, sebuah pandangan menyeluruh mengenai dunia dan tujuan-tujuan manusia. Ketiga, kepercayaan mengenai kehidupan setelah mati. Keempat, komunikasi dengan “Tuhan” melalui ibadah dan doa. Kelima, perspektif tertentu mengenai kewajiban moral yang berasal dari kode moral, atau dari konsepsi mengenai sifat Allah. Keenam, praktik-praktik yang melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa. Ketujuh, perasaan “keagamaan” mengenai kekaguman, rasa bersalah dan penyembahan. Kedelapan, penggunaan teks-teks suci. Kesembilan, organisasi untuk memfasilitasi aspek korporasi dari praktik-praktik agama dan untuk mempromosikan dan melanggengkan praktik-pratik dan kepercayaan tertentu.

Kriteria ini berbeda dengan rumusan Departemen Agama pada 1961. Unsur-unsur agama adalah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci,

---

<sup>4</sup> Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace* (USA: Hart Publishing, 2008),



umat dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.<sup>5</sup> Kriteria ini yang membuat aliran kepercayaan terlempar dari makna agama. Definisi ini juga muncul sebagai hasil dari pergulatan politik dan berkembangnya kelompok keagamaan yang disebut aliran kepercayaan tadi. Pada tahun 1952, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) aliran kebatinan diminta dilarang keberadaannya. Setelah itu munculah definisi dan kriteria agama.

Dalam konteks kebebasan beragama, masalah pendefinisian agama dan bukan agama menjadi “kewenangan” dan hak pemeluk atau pengikutnya. Sedangkan negara tidak berhak mengintervensi. Negara juga tidak dapat mengatakan sekte atau gerakan tertentu sesat atau tidak.

## 1.2 Keyakinan (*Belief*)

Definisi paling sederhana dari keyakinan adalah “sesuatu yang tidak memenuhi unsur-unsur agama”. Karena itu untuk memahami apa saja unsur-unsur keyakinan, salah satu pendekatan adalah dengan meneliti sejumlah unsur agama. Sesuatu yang tidak dicakup dalam agama, bisa dikategorikan sebagai keyakinan. Karenanya ide-ide besar seperti humanisme, atheisme, agnotisme, bisa dikategorikan sebagai keyakinan.

Berikut ini beberapa pengertian “keyakinan”, yakni, sesuatu yang mengisi sebuah tempat dalam kehidupan manusia yang setara dengan sesuatu yang dianugerahkan Tuhan, atau Tuhan-tuhan dari pegangan keyakinan keagamaan tertentu.<sup>6</sup>

Definisi lainnya menyebut keyakinan atau kepercayaan sebagai “sebuah sistem interpretasi yang terdiri dari keyakinan personal mengenai struktur dasar, cara sesuatu dilakukan (*modality*), dan fungsi dari dunia. Tapi, keyakinan bukanlah sistem saintifik. Sejauh mengklaim kesempurnaan, keyakinan juga mencakup persepsi tentang kemanusiaan, pandangan hidup, dan moral.”<sup>7</sup>

Dengan pengertian ini, jenis kecintaan berlebihan pada bola, umpamanya, bukanlah dikategorikan sebagai kepercayaan.

Karena dinilai tidak memenuhi “unsur-unsur” agama sebagaimana definisi

---

<sup>5</sup> Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Membela Kebebasan Beragama* (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), xviii.

<sup>6</sup> Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*, 23

<sup>7</sup> Catatan Penjelasan Amandemen Equal Treatment Act, Laporan Negara Austria dibidang nondiskriminasi mendefinisikan kepercayaan sebagai Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*, 23-24

Depag, tampaknya anggota penghayat kepercayaan –istilah yang dipakai dalam Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan– memang berusaha diletakan dalam kategori kepercayaan. Tapi uniknya, Undang-undang ini justru menganggapnya juga sebagai “agama”. Tapi agama yang belum diakui, sebuah istilah yang dinyatakan.<sup>8</sup> Pasal 58 ayat (2) poin 1 undang-undang ini juga menyebut agama setarikan nafas: “agama/ kepercayaan”.

Dalam Undang-undang, tidak dijelaskan definisi penghayat kepercayaan, meski disebut-sebut. Penjelasan ada dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Kategori ini sepertinya juga tidak menegaskan beda antara “kepercayaan”, “agama lokal”, “kepercayaan lokal”, “agama tradisional”. Kategori-kategori ini memang perlu mendapat ulasan lebih jauh.

### 1.3 Kebebasan atau Kemerdekaan?

Pada beberapa regulasi di Indonesia, kata *freedom* umumnya diterjemahkan dengan “kebebasan”. Misalnya, terjemahan pasal 18 ayat 1 ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.<sup>10</sup> Pasal ini membicarakan ihwal hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Pada sekujur terjemahan pasal-pasal ICCPR tidak ditemukan terjemahan kata *freedom* dengan istilah selain “kemerdekaan.”

Menariknya konstitusi kita mengenal dan menyantumkan dua kata yang tampaknya digunakan saling bertindihan: “kemerdekaan” dan “kebebasan”. Misalnya dalam Pasal 28I ayat 1 atau pasal 29 ayat (2). Kata “merdeka” atau “kemerdekaan” bisa dijumpai pada pasal 28E ayat (1) dan (2). Dengan redaksi

<sup>8</sup> Lihat UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 6 ayat (2): ... bagi Penduduk **yang agamanya belum diakui** (cetak tebal dari penulis) sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan **atau** bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 ayat 19 PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>10</sup> Lihat Pasal 18 ayat 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)” dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/UU-No-12-Thn-2005-ttg-Ratifikasi-ICCPR.pdf> (diakses 2 Januari 2014)

nyaris serupa, kata “kemerdekaan” dalam pasal 28 I UUD 1945 diubah menjadi “kebebasan” di pasal 4 UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tampaknya, pilihan diksi dua kata itu memiliki latar filofisnya sendiri-sendiri.

Dari sudut kebahasaan, kata “bebas” dan “merdeka” tampaknya merujuk arti yang sama. Tidak ada perbedaan berarti antar keduanya. Seringkali keduanya digunakan secara bergantian.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mengartikan “bebas” sebagai lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa); merdeka, bisa berarti lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan sebagainya); tidak dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya); tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya; merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing); tidak terdapat (didapati) lagi.<sup>11</sup> Sementara “merdeka” berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa.<sup>12</sup>

Dalam tradisi Barat, selain *freedom*, kata *liberty* juga dipakai untuk makna serupa: kemerdekaan atau kebebasan. Dua kata tersebut (*freedom* atau *liberty*) dipakai bergantian. Pemikir politik dan filsafat Inggris, Isaiah Berlin, termasuk salah satu yang tidak membedakan makna keduanya. “Saya menggunakan keduanya untuk arti yang sama,” katanya.<sup>13</sup>

Yang menjadi sorotan lebih jauh adalah justru makna kebebasan itu sendiri. Esais tersohor itu mengajukan dua makna *freedom* atau *liberty*. Yang pertama, disebut dengan *negatif freedom*. Kebebasan ini terkait dengan pertanyaan, pada wilayah mana subyek, orang maupun kelompok, begitu adanya atau dibiarkan melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, tanpa campur tangan oleh orang lain. Kebebasan ini disebut juga kebebasan dari (*freedom from*). Isaiah mencontohkan, jika saya dicegah orang lain dari melakukan apa yang bisa saya lakukan sebaliknya, sebetulnya saya tidak bebas. Dengan begitu Semakin besar

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Bebas” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 118

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Bebas” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 736

<sup>13</sup> Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, editor Henry Hardy (Newyork: Oxford University Press, 2002), 169

campur tangan, semakin seseorang dianggap melanggar kebebasan.<sup>14</sup>

Apakah ada kebebasan tanpa batas? Dalam tulisan itu, buru-buru Isaiah menandakan, hampir tidak mungkin ada kebebasan tanpa batas. Itu pula yang disetujui umumnya pemikir filsafat klasik Inggris. Jika Kebebasan tanpa batas terjadi, dampaknya mengganggu kebebasan orang lain dan dunia akan centang perenang.<sup>15</sup> Ini menjawab kekhawatiran dan pandangan sebagian kalangan di Indonesia, bahwa kebebasan itu benar-benar sebebas-bebasnya.

Makna kedua dari kebebasan adalah kebebasan positif (*positive freedom*). Kebebasan ini terkait dengan pertanyaan apa, atau siapa, yang menjadi sumber kontrol atau campur tangan yang memengaruhi seseorang melakukan atau menjadi “ini” ketimbang “itu”? Kebebasan ini disebut juga “kebebasan untuk” (*freedom to*). Makna itu berasal dari keinginan atas bagian dari individu demi menjadi tuannya sendiri. “Saya berharap hidup dan keputusan-keputusan saya, bergantung diri saya sendiri. Bukan pada kekuatan eksternal apapun,” kata Isaiah.<sup>16</sup>

Ketiadaan perbedaan tegas antara *freedom* dan *liberty* juga didapati dalam sejumlah kamus. Misalnya Kamus Oxford. Meski arti pertama kata *freedom* merujuk arti “kebebasan untuk” ala Isaiah, tapi arti yang lain juga berarti “kebebasan dari”. Begitupun dengan kata *liberty*.<sup>17</sup>

#### 1.4 Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama atau berkeyakinan (selanjutnya disebut kebebasan beragama) merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi 10 Desember 1948.<sup>18</sup> Selain Kebebasan beragama, DUHAM menegaskan rumpun hak asasi manusia lainnya, seperti hak kebebasan berpendapat dan

<sup>14</sup> Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 169

<sup>15</sup> Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 170

<sup>16</sup> Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 178

<sup>17</sup> *Freedom* diartikan dengan *the power or right to act, speak, or think as one wants*, tapi juga sebagai (*freedom from*) *the state of not being subject to or affected by (something undesirable)*. Lihat Oxford Dictionaries, “freedom”, dalam <http://oxforddictionaries.com/definition/english/freedom> (diakses 13 Desember 2012). *Liberty* juga berarti *the state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one's behaviour or political views*, tetapi juga *the power or scope to act as one pleases*. Lihat Oxford Dictionaries, “liberty”, dalam <http://oxforddictionaries.com/definition/english/liberty?q=liberty>

<sup>18</sup> Office of The High Commissioner For Human Rights and United Nations Staff College Project, “Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff,” 11 <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf> (diakses 2 Januari 2014)

berekspresi, kebebasan berpikir, atau hak mendapat pendidikan.

Hak-hak kemerdekaan beragama ini selanjutnya dibagi dalam dua wilayah, yaitu kebebasan internal (*forum internum*) dan kebebasan eksternal (*forum externum*).

**A. Kebebasan internal (*Forum Internum*)**, kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk mempertahankan menganut atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan.<sup>19</sup>

Hak-hak kebebasan ini telah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (*non-derogable rights*). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa (*coercion*) *forum internum* ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU HAM.

*Coercion* alias pemaksaan –selanjutnya menyebut dengan kata pemaksaan– dalam sejumlah standar internasional diletakkan di ranah *non-derogable rights*. Di sini pemaksaan diartikan sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan negara (*state*), termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum, demi memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati suatu kepercayaan. Dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik bertujuan atau berdampak serupa, misalnya kebijakan atau praktik yang membatasi akses akan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak lain yang dijamin juga dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahian G. Tahzib-Lie (eds), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, (Jakarta: Kanisius, 2010), hal. 19.

<sup>20</sup> Definisi diambil dari Komentar Umum 22 paragraf 5.

Tabel 1

Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Internum<sup>21</sup>

| FORUM INTERNUM                                 |                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak/Kebebasan                                  | Instrumen Hukum              | Pasal | Bunyi Pasal                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama. | DUHAM                        | 18    | “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”                                                                                                                               |
|                                                | ICCPR                        | 18    | “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri...”                                                                                                   |
|                                                | UUD 1945                     | 28I   | “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama...”                                                                                                                                                                   |
|                                                |                              | 29    | “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”                                                                                                                      |
|                                                | UU No. 39 / 1999 tentang HAM | 4     | “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”                                                                              |
|                                                |                              | 22    | “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<br><br>“(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” |

<sup>21</sup> Dirangkum dari: Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses 15 Nov 2011, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

|                                                                   |                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama. | DUHAM                                                                                    | 18         | “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                   | ICCPR                                                                                    | 18         | “(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                   | Deklarasi Universal 1981 tentang penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama | 1          | “(2) Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaannya menurut pilihannya.”                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB                                                      | Paragraf 5 | “Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.” |
|                                                                   | UU No. 39 / 1999 tentang HAM                                                             | 22         | “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**B. Kebebasan Eksternal (*forum externum*)**, yakni kebebasan baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi untuk memanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak



orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada instrumen-instrumen di bawah ini.

**Tabel 2**

**Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum<sup>22</sup>**

| FORUM EKSTERNUM                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak/<br>Kebebasan                                                                                         | Instrumen<br>Hukum           | Pasal  | Bunyi Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hak kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka | DUHAM                        | 18     | “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”                                    |
|                                                                                                           | ICCPR                        | 18     | “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.” |
|                                                                                                           | UUD 1945                     | 29     | “(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           | UU No. 39 / 1999 tentang HAM | 22     | (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<br>(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.                                                                                                                           |
|                                                                                                           |                              | 55     | “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           | Deklarasi Universal 1981     | 6      | “(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan...”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                           | Komentar umum 22             | Para 4 | “...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang...”                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>22</sup> Dirangkum dari: “Framework for communications, Special Rapporteur on freedom of religion or belief”, <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses 2 Januari 2014 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.



|                                                     |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah        | Deklarasi Universal 1981 | 6      | “(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu”                                                                                                                      |
| Hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama | Deklarasi Universal 1981 | 6      | “(c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan”                                                                                           |
|                                                     | Komentar Umum 22         | Para 4 | “...Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup-kepala...”                                  |
| Hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama      | Deklarasi Universal 1981 | 6      | “(h) Menghormati hari-hari istirahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang”                                                                                                                       |
|                                                     | Komentar Umum 22         | Para 4 | “...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat...”                   |
| Hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama       | Deklarasi Universal 1981 | 6      | “(g) Memilih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyarikat-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang”                                                                  |
|                                                     | Komentar Umum 22         | Para 4 | “...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru...” |

Berbeda dengan forum internum, forum externum sebagai bentuk kebebasan memanifestasikan agama dapat dibatasi dengan undang-undang. Pembatasan atas dasar keselamatan publik (*public safety*), kesehatan publik (*public health*), moral publik (*public moral*), ketertiban publik (*public order*), dan hak dasar orang lain. Prinsip ini tercantum dalam ICCPR yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.

Dalam konstitusi pasal pembatasan ini dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28 J ayat 2. Yang membedakan dengan UU No 12, dalam pasal 28 J ayat 2 mencantumkan “nilai-nilai agama” sebagai salah satu pertimbangan. Dalam ICCPR, nilai-nilai agama bisa dimasukkan dalam moral publik. Pertimbangan moral, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama dan tradisi, dimaksudkan bukan

|                                                    |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama | Deklarasi Universal 1981     | 6      | “(d) Menulis, menerbitkan dan menyebarkan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini”<br>(e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut”                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | Komentar Umum 22             | Para 4 | “...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk membuat dan menyebarkan teks-teks atau publikasi-publikasi agama.”                      |
| Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya  | ICCPR                        | 18     | “(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | Deklarasi Universal 1981     | 5      | “(1) Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa.”                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | ICESCR                       | 13     | “(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. |
|                                                    | UU No. 39 / 1999 tentang HAM | 55     | “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | Konvensi Hak Anak 1989       | 14     | “(2) Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orangtua serta, apabila dapat diterapkan, perwalian resmi, untuk memberi arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapasitas perkembangan anak.                                                                                                                                                                                           |

|                                                                          |                              |    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan | UU No. 39 / 1999 tentang HAM | 24 | “(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”                                                                                  |
| Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan    | Deklarasi Universal 1981     | 6  | “(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.” |

hanya berasal dari satu agama atau tradisi tertentu. Ia mencakup prinsip-prinsip universal yang ada dalam agama-agama atau keyakinan tertentu.

### 1.5 Pelanggaran Kebebasan Beragama

Dalam UU HAM, pelanggaran HAM didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Merujuk pengertian ini, pelaku pelanggaran HAM bisa seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara. Ini selaras dengan penjelasan dalam Deklarasi 1981 di mana kategori aktor pelanggaran diskriminasi dan intoleransi dibagi ke dalam tiga pihak: negara (*state*), institusi (*institution*), kelompok (*group of persons*), dan seseorang (*person*). Dalam wilayah hukum hak-hak manusia, diletakkan dalam relasi berduaan (*dyadic*) antara negara dengan individu atau kelompok orang.<sup>24</sup>

Tindakan atau perbuatan itu, merujuk UU HAM dibagi dalam dua kategori: disengaja dan tidak disengaja. Dua kategori itu adalah bentuk penerjemahan dari istilah *commission* maupun *omission*.

Tindakan yang disebut pelanggaran tadi, haruslah bertujuan atau berdampak

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 6

<sup>24</sup> Harry Wibowo dan Naning Mardiniah, “Pendahuluan,” dalam Abdul Mun'im DZ (ed), *Memeriksa Kewajiban Negara: Instrumen Monitoring Hak atas Pendidikan dan Kesehatan Dasar*, Jakarta: LP3ES, 2006, hal. 1.

pada mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Mempertimbangkan definisi dalam UU HAM, “pelanggaran kemerdekaan beragama” di sini kemudian dirumuskan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan beragama, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Sebagaimana hak di rumpun HAM lainnya, negara khususnya pemerintah merupakan pemikul tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia. Sebab kewajiban negara pertama-tama adalah menghormati (*to respect*) – tanpa campur tangan – setiap orang untuk menikmati kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diganggu, termasuk kebebasan yang terkait dan bergantung dengan kebebasan itu. Bila seseorang atau kelompok orang penganut suatu agama terancam kebebasannya, negara berkewajiban melindungi (*to protect*) mereka dari ancaman atau gangguan pihak ketiga. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan hukum (UU) dan proses penegakan hukum. Sebagai pemangku dan pelaksana kewajiban, maka negara jugalah yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran hak-hak manusia.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama antara lain :

1. *Pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik*, Tindakan ini merupakan tindakan aparat negara seperti polisi, tentara, atau Satpol PP yang melakukan ancaman penggunaan fisik atas dasar agama terhadap seseorang atau kelompok penganut agama atau kepercayaan;
2. *Pemaksaan ancaman sanksi hukum*, Tindakan ini merupakan tindakan aparat negara yang mengancam atas nama agama seseorang atau

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 6

<sup>26</sup> Definisi di atas juga memasukan definisi yang dicantumkan dalam pasal 2 Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan Tahun 1981.

penganut suatu agama atau kepercayaan dengan ancaman sanksi hukum seperti penjara, denda, tidak menerima KTP atau bentuk-bentuk administrasi lainnya;

3. *Kriminalisasi keyakinan*, berupa tindakan penerapan sanksi dalam peraturan undangan, umumnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Tindakan dapat berbentuk penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, penuntutan ke pengadilan hingga pemenjaraan terhadap seorang atau sekelompok orang yang divonis melakukan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.
4. *Pemaksaan dengan kebijakan*. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara yang menerapkan sanksi hukum atau kebijakan tertentu seperti tidak mengeluarkan kartu identitas atau tidak mencatat akta perkawinan karena seseorang bagian dari sekte tertentu seperti Ahmadiyah, misalnya.<sup>27</sup>
5. *Pembatasan ibadah*, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk beribadah baik di rumah ibadah atau tempat ibadah tertentu.
6. *Pelarangan Ibadah* merupakan tindakan aparat negara yang melarang seseorang atau sekelompok orang, melalui surat resmi pelarangan maupun tindakan melarang beribadah.
7. *Pembiaran*, merupakan tindakan pengabaian atau kelalaian negara mencegah pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara atas dasar agama. Tindakan ini dapat berbentuk tidak mencegah kekerasan yang belum terjadi, tidak melakukan upaya yang sesuai prosedur hukum untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan oleh kelompok agama lain, dan tidak mengambil tindakan hukum yang semestinya terhadap para pelaku kekerasan atas nama agama, baik secara individu maupun kelompok. Dalam tindakan pembiaran ini, aparat negara biasanya berdalih bahwa mereka tidak mampu mencegah atau menghentikan kekerasan karena minimnya personel, atau dalih untuk menghindari konflik yang lebih besar. Aparat negara sebaliknya mengevakuasi korban kekerasan dengan dalih untuk mengamankan

---

<sup>27</sup> Kategori kesatu hingga keempat bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai pemaksaan (*coercion*) yang mengacu dan berhubungan pada hak-hak yang tidak dapat kurang (*non-derogable*).

mereka, atau meminta korban pindah ke tempat lain agar tidak menjadi korban kekerasan berikutnya.

8. *Pembatasan aktivitas keagamaan*, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan aktivitas keagamaan seperti pemilihan pimpinan agama, penyebaran ajaran keagamaan, dan lain-lain.
9. *Pelarangan aktivitas keagamaan*, berupa larangan aparat negara, resmi maupun kebijakan saat di lapangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu.
10. *Penyegelan tempat ibadah* merupakan tindakan pencabutan izin, pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah, dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.

## 1.6 Isu-Isu Terkait Kemerdekaan Beragama

Di luar kategori *forum internum* dan *forum externum*, masih ada sejumlah istilah dan kategori-kategori terkait isu ini, antara lain diskriminasi, kelompok rentan, isu-isu persimpangan dengan isu-isu HAM lain, isu-isu irisan (*cross-cutting issues*).

Pada isu diskriminasi, ada dua isu penting yang muncul: diskriminasi atas dasar agama dan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Kelompok yang dikategorikan rentan dikelompokkan menjadi enam: perempuan, orang yang dirampas kebebasannya (*persons deprived of their liberty*), pengungsi, anak-anak, kelompok minoritas, dan buruh migran.<sup>28</sup>

Rapporteur's Digest juga menyebut isu yang dikategorikan sebagai isu yang berada di persimpangan (*intersection issues*) dengan HAM di rumpun lain. Tiga isu itu: *pertama*, kebebasan berekspresi, termasuk pernyataan-pernyataan terkait konflik keagamaan, intoleransi keagamaan, dan ekstrimisme. *Kedua*, hak hidup dan hak untuk bebas. *Ketiga*, larangan penyiksaan, perlakuan kejam, dan hukuman tidak manusiawi atau merendahkan.

Adapun isu irisan (*cross cutting issues*) berupa pengurangan (*derogation*), pembatasan (*limitation*), isu-isu legislasi (*legislative issues*), pembela kebebasan beragama atau kepercayaan, dan organisasi non-pemerintah.

<sup>28</sup> "Rapporteur's Digest on Freedom of Religion or Belief."

### a. Diskriminasi dan Intoleransi

Dalam Deklarasi 1981, dua istilah ini tidak tegas dibedakan. Keduanya disebutkan bersamaan, yakni setiap perbedaan, pengecualian pembatasan atau preferensi berdasarkan agama atau kepercayaan dan yang mempunyai tujuan atau membawa akibat hilang atau rusaknya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan atas dasar yang setara.<sup>29</sup>

Tindakan intoleransi maupun diskriminasi—yang karena sebabnya menghalangi orang dalam menikmati kebebasan mendasar seseorang—dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran (*violation*) terhadap HAM dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam DUHAM dan diuraikan secara terperinci dalam berbagai Persetujuan-persetujuan Internasional tentang HAM. Negara-negara yang menyetujui instrumen ini diwajibkan untuk membuat regulasi domestik untuk meminimalisir aksi-aksi tersebut.

UU HAM menyebut diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>30</sup> Diskriminasi dalam ranah kemerdekaan agama adalah manakala tindakan tersebut dilakukan atas dasar agama atau keyakinan tertentu.

Sementara itu, intoleransi keagamaan (*religious intolerance*) merupakan sebuah pengertian yang luas, mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan terhadap afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini memberi jalan untuk sewaktu-waktu menjelma dalam aksi intimidasi atau kekerasan bermotif pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya, dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.

Bruce A. Robinson merumuskan bentuk-bentuk tindakan *religious intolerance*.

---

<sup>29</sup> Lihat pasal 2 ayat 2 deklarasi penghapusan semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan agama atau Keyakinan tahun 1981

<sup>30</sup> UU HAM pasal 1 ayat (3)



Dalam tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants on Religious Tolerance, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontario, Kanada, itu menyebut tujuh kategori tindakan intoleransi beragama.<sup>31</sup> *Pertama*, penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktiknya, meski ketidakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki. *Kedua*, penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok, misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku immoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya. *Ketiga*, mengejek dan meremehkan kelompok keyakinan tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut. *Keempat*, mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka. *Kelima*, pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisadiidentifikasi. *Keenam*, mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat. *Ketujuh*, menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Dalam “Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace, human rights and democracy”, yang diterbitkan UNESCO, pengertian intoleransi tidak hanya semata-mata “hasil”, tapi juga sebuah gejala-gejala yang bisa dideteksi dalam bentuk tindakan tertentu. Intoleransi dinilai sesuatu yang membawa pada potensi lahirnya penyakit sosial yang mengancam kehidupan (*a life-threatening social illness*) bernama kekerasan. Bentuk-bentuknya sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Bahasa (*language*). Bahasa eksklusif, merendahkan, dan fitnah yang mengurangi, merendahkan, dan mendehumanisasi kelompok-kelompok budaya, ras, nasional, atau seks.
2. Stereotip (*stereotyping*). Penggambaran seluruh anggota atau kelompok yang digolongkan dengan sesuatu yang negatif.
3. Mengolok-olok (*teasing*). Penyebutan terhadap tindakan, atribusi, dan karakteristik manusia tertentu yang cenderung mengejek atau menghina.
4. Buruksangka (*prejudice*). Penilaian oleh individu atau kelompok berdasarkan generalisasi negatif dan stereotip ketimbang berdasarkan fakta terhadap

<sup>31</sup> Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm>, diakses 20 Desember 2011

<sup>32</sup> Unesco, *Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace, human rights and democracy* (Paris: Unesco, 1994), 16



kasus atau tindakan sebuah kelompok atau individu.

5. Pengambinghitaman (*scapegoating*), menyalahkan peristiwa-peristiwa traumatis atau masalah sosial pada kelompok tertentu.
6. Diskriminasi (*discrimination*). Pengecualian dari penikmatan atas manfaat atau aktivitas-aktivitas sosial, utamanya didasarkan lantaran buruk sangka.
7. Pengabaian. Berperilaku seolah-olah yang lain tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara atau mengakui yang lain, atau budaya mereka (termasuk *ethnocide*).
8. Pelecehan (*harassment*), perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan orang lain, sering dimaksudkan sebagai sarana memaksa mereka keluar dari organisasi, komunitas atau kelompok tertentu.
9. Gertakan (*bullying*): Penggunaan superioritas karena kapasitas fisik atau angka yang lebih besar (mayoritas) untuk mempermalukan orang lain atau menghalangi mereka dari kepemilikan.
10. Pengusiran (*expulsion*): pengusiran secara resmi atau dengan paksa, mengusir atau menolak masuk atau kehadiran, kelompok sosial, profesi atau kegiatan kelompok tertentu di sebuah tempat, termasuk di mana kelangsungan hidup mereka tergantung, seperti tempat kerja, tempat tinggal, dan lain-lain.
11. Pengecualian (*exclusion*), tindakan menyangkal individu atau kelompok tertentu agar mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mendasar dan atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.
12. Segregasi (*segregation*), pemisahan paksa orang dari ras, agama atau jenis kelamin yang berbeda biasanya untuk merugikan satu kelompok tertentu (termasuk Apartheid).
13. Penindasan (*repression*), pencegahan kuat dari penikmatan HAM.
14. Penumpasan (*destruction*), tindakan penghapusan suatu komunitas dari daerah tempat tinggal atau lokasi mencari nafkah melalui penyerangan dan pembunuhan (termasuk genosida).

Sebagai sebuah “gejala”, intoleransi pada ujungnya bisa meledak dalam bentuk tindakan-tindakan serius dalam konteks pelanggaran HAM. Tindakan

itu antara lain seksisme, rasisme, etnosentrisme, antisemitis, fasisme, senofobia, imperialisme, eksploitasi, atau represi keagamaan.<sup>33</sup>

Meskipun demikian, beberapa hal yang tidak termasuk dalam kategori intoleransi keagamaan adalah; 1) memperdebatkan atau melakukan kritik atas klaim keagamaan tertentu, seperti mengkritisi tentang asumsi kesesuaian ajaran dengan konsep tertentu atau klaim keunggulan satu agama atas yang lain; 2) mengecam atau melarang tindakan-tindakan ilegal; 3) menolak klaim sebuah gerakan “atas nama agama” jika terdapat bukti yang cukup bahwa agama dalam kasus tersebut hanya dijadikan sebagai kedok belaka (politisasi agama tertentu).<sup>34</sup>

### **b. Ujaran Kebenciaan (*Hate Speech*) atas Dasar Agama**

Pasal 20 (2) ICCPR mendefinisikan ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai “segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.”

Article 19, sebuah organisasi yang didirikan pada 1987 untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi, mendefinisikan empat kata kunci dalam ujaran kebencian.<sup>35</sup>

*Pertama*, kebencian (*hatred*), yakni sebuah kondisi pikiran atau mental yang dicirikan dengan emosi kuat dan irasional dari perasaan yang dikategorikan penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan besar terhadap kelompok sasaran tertentu. *Kedua*, diskriminasi, yakni setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis agama, keyakinan, kecacatan, usia, orientasi seksual, bahasa, politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status warna kulit lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi

<sup>33</sup> Definisi bentuk-bentuk intoleransi itu bisa dibaca lebih jauh dalam Unesco, *Tolerance: the threshold of peace* ..., 20

<sup>34</sup> “Religious Intolerance”, [http://www.sacbrant.ca/religious\\_oppression.asp](http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp), diakses 2 Januari 2014

<sup>35</sup> Article 19, “Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of incitement to hatred Work in Progress.” Kajian yang disiapkan untuk pertemuan ahli regional tentang Pasal 20 yang digelar Kantor Dewan Komisi HAM di Vienna, 8-9 February 2010, 7-8 bisa diakses pada <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf> (diakses 16 Desember 2012). Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat ILRC. Lihat 7-8 Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Jakarta: ILRC, 2012) 56-57

manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kehidupan publik lainnya. *Ketiga*, kekerasan, yaitu penggunaan dengan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan atau penghilangan hak asasi manusia lainnya. *Keempat*, permusuhan (*hostility*) sebagai wujud tindakan –bukan hanya suatu keadaan pikiran, tetapi juga menyiratkan sebuah keadaan pikiran yang ditindaklanjuti permusuhan –. Bahwa permusuhan merupakan wujud dari emosi kuat dan irasional yang dikategorikan sebagai penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran tertentu.<sup>36</sup>

Tindakan ujaran kebencian ini merupakan tindakan yang tak perlu membuktikan adanya terjadinya sebuah praktik diskriminasi, permusuhan atau kekerasan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Sebab larangan ini dibuat justru untuk menghindari unsur-unsur tersebut.

---

<sup>36</sup> Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat ILRC. Lihat 7-8 Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Jakarta: ILRC, 2012) 56-57



## **BAGIAN III**

### **TEMUAN-TEMUAN**

#### **1.1 Trend Regulasi Keagamaan tahun 2015**

Tren regulasi keagamaan yang muncul pada tahun 2015 ini adalah wacana penyusunan Rancangan Undang Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Bahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah sejak akhir 2014 menyampaikan bahwa Kementrian yang dipimpinnya sedang menyiapkan RUU PUB.

Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap begitu banyaknya kasus penindasan hak-hak umat beragama dalam beberapa tahun terakhir. Kasusnya terentang dari pelarangan dan ancaman terhadap pembangunan rumah ibadat (misalnya kasus Gereja Yasmin di Bogor), pelarangan beribadat (misalnya kasus pelarangan shalat Jumat jemaat Ahmadiyah di Jakarta), penyerangan fisik terhadap kalangan beragama yang dianggap berbeda dengan yang diyakini permuka agama setempat (misalnya penyerangan terhadap Islam Syiah di Madura), serta berbagai persoalan pendirian rumah ibadah.

Menurut Menteri Agama, RUU itu dirancang untuk mengatasi berbagai kasus intoleransi keagamaan dan pelanggaran kebebasan beragama yang kerap terjadi, untuk melindungi seluruh umat beragama, sebagai pelaksanaan dari pasal 28 dan 29 UUD 1945.

Namun hingga akhir 2015, RUU ini belum diluncurkan ke publik karena masih dianggap perlu penyempurnaan. Karena itu Menteri Agama mengundang masyarakat sipil, akademisi, praktisi lembaga keagamaan dan ormas-ormas yang memiliki kepedulian pada isu ini untuk memberikan masukan. Kementerian Agama juga mengirim draft sementara ke beberapa lembaga secara terbatas, misalnya berbagai Majelis Agama, Komnas HAM dan beberapa LSM yang menaruh kepedulian terhadap isu agama.

Beberapa waktu lalu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, dalam persiapan RUU tersebut, ada lima isu pokok yang akan didiskusikan bersama para tokoh dan majelis keagamaan. Pertama, yakni perihal bagaimana menyikapi hadirnya aliran-aliran keagamaan baru. Kedua, terkait penyebaran atau siar keagamaan. Di tengah era globalisasi seperti sekarang

ini, Lukman menilai, penyiaran agama juga perlu diatur atau diberi batas-batas tertentu.

Ketiga, berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Menurutny, hal ini juga perlu mendapat perhatian. Mengingat masih ada sejumlah kendala yang kerap dialami umat beragama ketika hendak membangun rumah ibadahnya. Keempat, perihal paham keagamaan atau gerakan keagamaan. Pada poin ini, Menteri Agama lebih menitikberatkan pada soal, siapa lembaga yang berhak atau berwenang dalam menentukan menyimpang atau tidaknya paham keagamaan tertentu? Kelima, soal penguatan forum kerukunan umat beragama (FKUB). Hal ini juga diharapkan mampu menjadi penopang kerukunan umat beragama di Indonesia.

Menteri Agama mengungkapkan, gagasan pokok dari RUU PUB adalah memastikan perlindungan umat beragama, terutama dalam dua hal: kemerdekaan memeluk agama, dan kemerdekaan menjalankan agama sesuai keyakinan yang dipeluk. Jaminan ini sebenarnya sudah ditemukan dalam konstitusi UUD 45. Namun, belum ada UU turunan yang mengimplementasikan jaminan konstitusi.

Menteri Agama berharap RUU PUB ini bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menganut agama di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. "Kami rasakan saat ini ada perilaku diskriminatif terhadap masyarakat di luar keenam agama itu," ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya spirit berbeda dengan Rancangan UU Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) yang sama sekali tidak mempersoalkan posisi agama dan keyakinan di luar enam agama yang diakui negara. Hal ini mengindikasikan ada paradigma melindungi dan menghormati, bukan mengatur dan mengontrol.

Paradigma mengatur dan mengontrol lebih dominan dalam perbincangan RUU KUB, yang diproyeksikan sebagai alat mengintegrasikan dan merekayasa sosial. Dengan demikian, RUU KUB memang diproyeksikan untuk mengintegrasikan, mengontrol, dan merekayasa masyarakat. Hal itu tak bisa dilepaskan dari kepentingan orang atau kelompok yang memegang kekuasaan. Dari perspektif ini jelas paradigma yang digunakan adalah menempatkan masyarakat sebagai "obyek" yang perlu diintegrasikan, dikontrol, dan direkayasa. Negara dan kelompok mayoritas adalah "subyek" yang mengontrol, mengintegrasikan, dan

merekayasa. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan negara dan juga mayoritas. Dengan demikian, kepentingan-kepentingan rakyat, terutama minoritas, tetap harus disubordinasikan dalam kepentingan negara dan mayoritas.<sup>37</sup>

Menteri Agama menyatakan hingga saat ini masih menjaring aspirasi untuk menyiapkan RUU PUB tersebut. Penjaringan aspirasi ini melibatkan tokoh-tokoh agama, majelis keagamaan, akademisi, dan pers.

### **Pro-Kontra**

Seperti halnya rancangan undang-undang lain, RUU PUB juga tidak sepi dari pro-kontra di tengah masyarakat.

Rumadi Ahmad salah seorang pegiat hak-hak beragama secara diplomatis memberi dukungan terhadap RUU PUB dengan sejumlah catatan. Menurutnya, RUU PUB yang digagas Menteri Agama akan punya arti penting jika ada spirit sungguh-sungguh untuk melindungi dan memfasilitasi warga negara agar dapat menjalankan agama dan keyakinannya dan tak dihantui diskriminasi. Ini penting ditegaskan karena dalam praktiknya, istilah melindungi sering dibelokkan jadi membelenggu dan membatasi.

RUU PUB juga harus dipastikan bisa menghilangkan diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan. Harus diakui, sekarang ini masih ada perlakuan diskriminatif terhadap pemeluk keyakinan keagamaan di luar enam agama yang dianggap sah. Hal ini sudah berjalan puluhan tahun dan tak ada terobosan hukum untuk menghilangkan. RUU PUB harus mampu menerobos hal ini.

Hal ini bisa dilakukan jika definisi agama diperluas sehingga bisa mencakup semua jenis kepercayaan keagamaan, termasuk agama lokal yang banyak hidup di seluruh Nusantara. Bukan pembuat UU yang mendefinisikan sebuah kepercayaan atau tidak, tetapi pemeluknya sendiri. Jika hal ini gagal dilakukan, bukan tak mungkin, meski RUU-nya "perlindungan", justru berisi represi dan legalisasi diskriminasi.

Lebih jauh Rumadi menegaskan bahwa jika UU ini diniatkan jadi obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan kehidupan beragama, maka bisa pastikan RUU ini bukan jawaban yang tepat. Intoleransi terjadi di mana-mana bukan karena

---

<sup>37</sup> Lihat, "RUU Perlindungan Umat Beragama" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/09184961/RUU.Perlindungan.Umat.Beragama>, diakses 23 Februari 2016.

kekosongan hukum, melainkan lebih akibat lemahnya penegakan hukum dan kepemimpinan. Menurutnya, regulasi kehidupan keagamaan pada tingkat tertentu dibutuhkan, tetapi harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, regulasi keagamaan melalui perumusan pasal-pasal dalam UU tak berarti bisa menyelesaikan semua problem kehidupan beragama. Pasal-pasal UU tak ada artinya jika relasi sosial keagamaan di Indonesia tak cukup sehat, aparat pemerintah dan penegak hukum tak punya kapasitas melakukan penegakan hukum, atau budaya hukum tak mendukung. Karena itu, hal yang jauh lebih penting adalah membangun sistem kehidupan keagamaan yang sehat, terbuka, dan adil. Tanpa itu, aturan sebagus dan sedetail apa pun tidak akan banyak gunanya, bahkan bisa menjadi sumber konflik baru.

Kedua, menggunakan paradigma yang benar: dari mengatur menjadi melayani; dari mengontrol menjadi melindungi. Perubahan paradigma ini harus diikuti *sense of minority*, sebuah sikap sensitif terhadap kebutuhan kelompok minoritas. *Sense of minority* inilah yang selama ini absen dalam pembahasan kehidupan keagamaan.

Dalam soal tempat ibadah, misalnya, mengatur masjid bagi Muslim di Jawa tak bisa disamakan dengan masjid bagi muslim di Papua atau Manado. Begitu juga mengatur pura umat Hindu di Bali tak bisa disamakan dengan pura di Jawa dan seterusnya. Ketiadaan *sense of minority* ini kemudian melahirkan aturan-aturan yang justru menyulitkan kalangan minoritas. Alih-alih *sense of minority*, yang dikedepankan, justru yang tampak adalah sikap dan cara berpikir untuk melindungi kepentingan mayoritas dari ancaman minoritas.

Ketiga, harus dipastikan, RUU PUB bisa menghilangkan diskriminasi berdasar agama dan keyakinan, tidak justru melanggar diskriminasi. Jika hal itu dilakukan, RUU PUB akan membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa.<sup>38</sup>

Dukungan terhadap RUU PUPB isampaikan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) namun dengan catatan bukan untuk mencabut atau menggantikan UU Penodaan Agama. “Kalau dalam perspektif untuk menggantikan UU penodaan agama tidak setuju karena bahaya,” kata Fahmi Salim, Ketua MIUMI. Fahmi menganggap bahaya jika isi RUU PUB tidak

---

<sup>38</sup>Lihat, “RUU Perlindungan Umat Beragama’ dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/O9184961/RUU.Perlindungan.Umat.Beragama>, diakses 23 Februari 2016.



memperkuat UU sebelumnya yaitu UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Tetapi bila RUU PUB itu memperkuat UU No.1/ PNPS/ 1965, maka pihaknya menyatakan sepakat.

Dalam pandangan Fahmi, umat Islam selalu diobok-obok atau diresahkan dengan wacana aturan pemerintah. Sebelumnya Menteri Agama Lukmah Hakim Saifuddin juga menyampaikan, RUU PUB akan menjadi penegasan dari aturan yang sudah ada. Seperti aturan tentang pendirian rumah ibadah yang masih berbentuk Peraturan Bersama Menteri, aturan tentang penyiaran agama juga masih berbentuk SKB, termasuk juga aturan tentang UU Penodaan Agama yang sudah puluhan tahun belum direvisi.<sup>39</sup>

Penolakan tegas terhadap RUU PUB datang dari Syarikat Islam. Ketua Umum DPP Syarikat Islam, Rahardjo Tjakraningrat menyatakan pihaknya menentang keras RUU PUB yang kini tengah digodok Kementerian Agama RI. RUU tersebut dinilai akan merugikan umat Islam karena berasal dari pihak asing.<sup>40</sup>

### **Meneruskan Inisiatif Lama**

Menurut Menteri Agama, RUU PUB merupakan hasil *forum group discussion* yang dilakukan Kementerian Agama dengan melibatkan tokoh-tokoh dari beberapa agama (28/10/2014). Keinginan Kementerian Agama untuk menginisiasi lahirnya UU seperti ini sudah ada sejak lama meski dengan nama berbeda.

Tahun 2010, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri disepakati percepatan pembahasan RUU Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Tempat Ibadah juga disepakati dinaikkan statusnya menjadi UU.

Gagasan membuat RUU KUB muncul seiring banyaknya kasus kekerasan bermotif agama, termasuk penusukan terhadap pendeta gereja HKBP Ciketing, Bekasi. Jauh sebelum itu, tahun 2003 sudah beredar RUU KUB yang diduga dikeluarkan Litbang Departemen Agama (sebelum jadi Kementrian Agama)

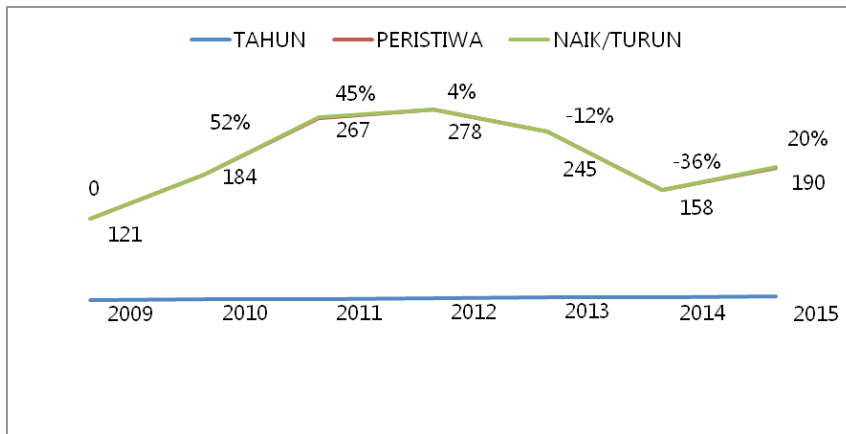
<sup>39</sup> Lihat "MIUMI : Bahaya Kalau RUU PUB Gantikan Penodaan Agama" dalam <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/12/24/nh2wjv-miumi-bahaya-kalau-ruu-pub-gantikan-penodaan-agama>, diakses tanggal 23 Februari 2016.

<sup>40</sup> Lihat "Sangat Berbahaya RUU Perlindungan Umat Beragama Bagi Masa Depan Islam" dalam <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2015/01/22/35177/sangat-berbahaya-ruu-perlindungan-umat-beragama-bagi-masa-depan-islam/>, diakses 23 Februari 2016.

meskipun itu tidak diakui instansi negara itu. Pada Agustus 2011, beredar dokumen naskah akademik dan draf RUU KUB dari Baleg DPR yang isinya ada kemiripan dengan RUU KUB Litbang Kemenag 2003.<sup>41</sup>

### 3.2 Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2015 sebanyak 190 peristiwa dengan 249 tindakan. Jumlah ini naik 20 % dari tahun 2014. Pada 2014 jumlah peristiwa yang dilaporkan sebanyak 158 peristiwa dengan 187 tindakan.

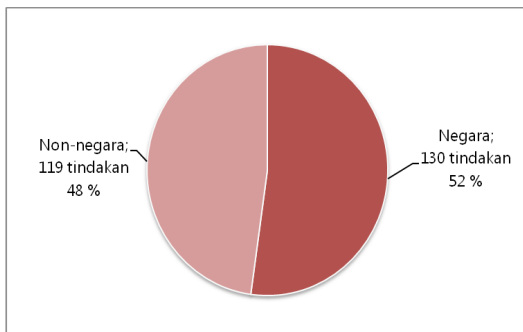


Gambar 1. Tren Pelanggaran dari tahun ke tahun

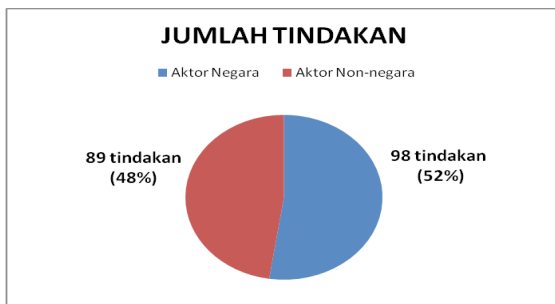
#### 3.2.1 Aktor Pelanggaran

Pada 2015, tindakan pelanggaran terbanyak masih dilakukan negara sebanyak 130 tindakan atau 52 %. Sementara sisanya, 119 tindakan atau 48% dilakukan aktor non-negara. Hal yang sama terjadi pada 2014, aktor negara juga lebih banyak melakukan tindakan pelanggaran ketimbang non negara. Sebanyak 98 tindakan (52%) dilakukan negara, sisanya 89 tindakan (48%) melibatkan non negara.

<sup>41</sup>Lihat, "RUU Perlindungan Umat Beragama" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/O9184961/RUU.Perlindungan.Umat.Beragama>, diakses 23 Februari 2016.



Gambar 2. Aktor Pelanggaran Berdasarkan Tindakan tahun 2015

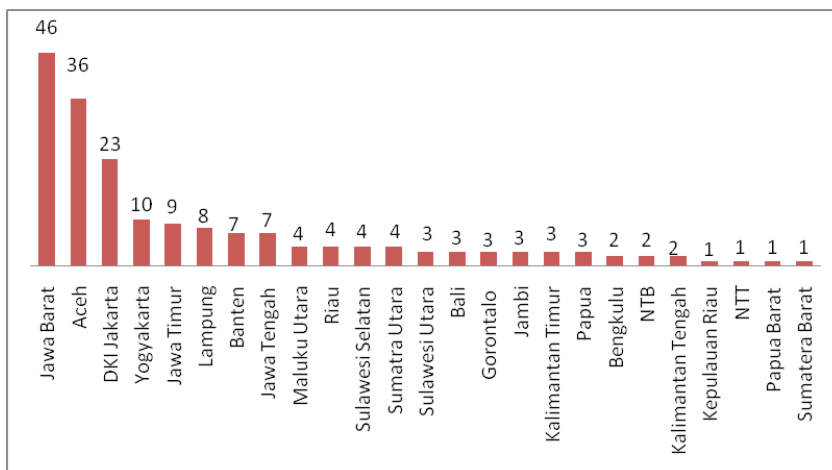


Gambar 3. Aktor Pelanggaran Berdasarkan Tindakan tahun 2014

### 3.2.2 Sebaran Wilayah

Dari segi sebaran wilayah, peristiwa pelanggaran KBB ditemukan terjadi di 25 propinsi. Peristiwa pelanggaran KBB terbanyak masih terjadi di Jawa Barat (46 peristiwa). Disusul Aceh (36 peristiwa), DKI Jakarta (23 peristiwa), Yogyakarta (10 peristiwa), Jawa Timur (9 peristiwa), Lampung (8 peristiwa), Banten, dan Jawa Tengah (masing-masing 7 peristiwa).

Selengkapnya:



Gambar 4. Jumlah Peristiwa Pelanggaran KBB berdasarkan Sebaran Wilayah

### 3.2.3 Sebaran Waktu

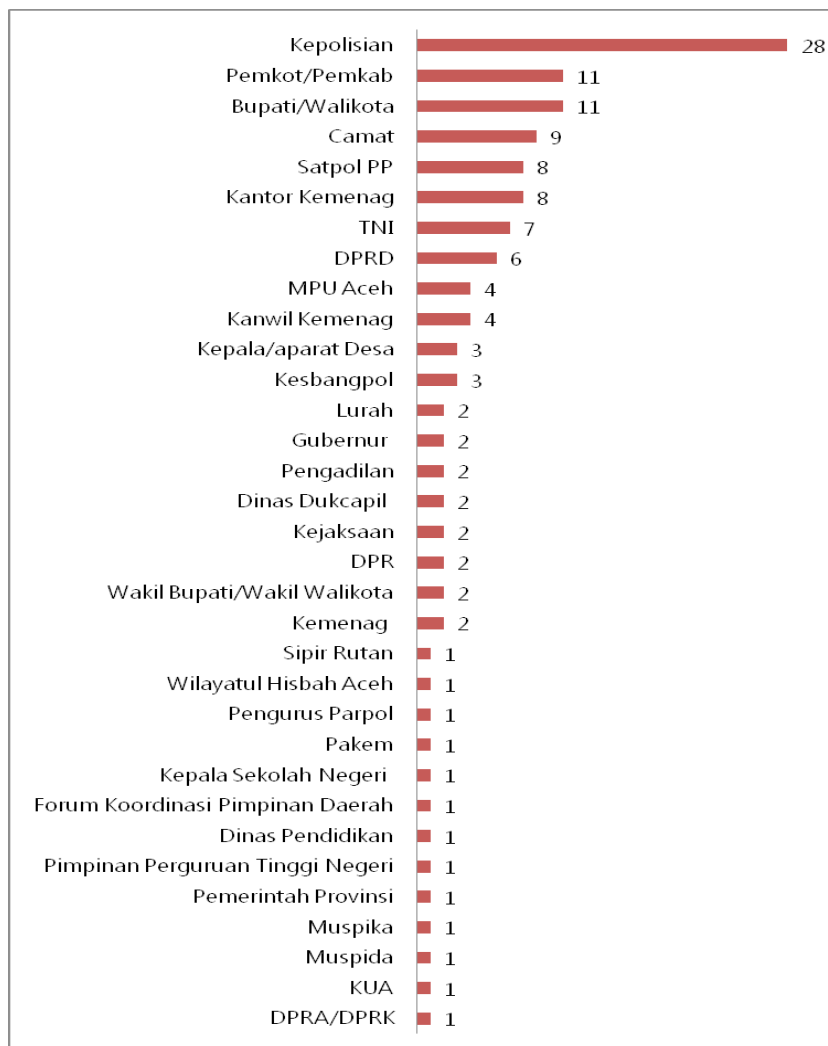
Dari segi sebaran waktu, selama 2015 rata-rata terjadi 15 peristiwa pelanggaran KBB per bulan. Ini lebih tinggi dibanding tahun 2014, yang memiliki rata-rata 13 peristiwa per bulan. Nopember menjadi bulan tertinggi terjadinya peristiwa pelanggaran (25 peristiwa); berikutnya terjadi di bulan Januari dan Februari (masing-masing 23 peristiwa).



Gambar 5. Peristiwa Pelanggaran KBB berdasarkan Sebaran Waktu

### 3.2.4 Aktor Negara

Dari sisi aktor yang terbanyak melakukan pelanggaran masih ditempati aktor negara yaitu kepolisian dengan 28 tindakan. Disusul pemerintah kota (pemkot) atau pemerintah kabupaten sebanyak 11 tindakan; bupati/walikota 11 tindakan; camat 9 tindakan; Satpol PP dan Kantor Kemenag masing-masing 8 tindakan.



Gambar 6. Aktor Negara

### 3.2.5 Aktor Non Negara

Tahun ini tiga aktor non negara yang banyak terlibat tindakan pelanggaran diduduki masing-masing oleh massa (29 tindakan), Majelis Ulama Indonesia (21 tindakan), dan Front Pembela Islam (13).

| AKTOR NON-NEGARA             | JUMLAH TINDAKAN |          |
|------------------------------|-----------------|----------|
|                              | KELOMPOK        | INDIVIDU |
| Massa                        | 29              | -        |
| MUI                          | 21              | -        |
| FPI                          | 13              | -        |
| ANNAS                        | 3               | -        |
| FUI                          | 3               | -        |
| Pelaku tidak teridentifikasi | 3               | 2        |
| Simpatisan ISIS              | 3               | -        |
| FKUB                         | 2               | -        |
| Almanar                      | 2               | -        |

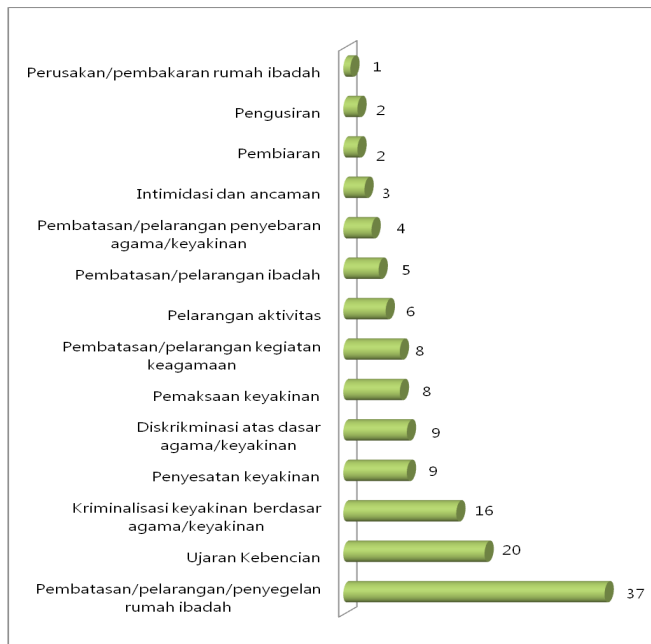
|                                                                      |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|
| Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil                                     | 2 | - |
| Angkatan Muda Siliwangi                                              | 1 | - |
| Forum Komunikasi Masyarakat Sulawesi Utara Peduli Toleransi (FKMSPT) | 1 | - |
| Forum Pondok Pesantren Subang                                        | 1 | - |
| Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta                                    | 1 | - |
| Front Jihad Islam (FJI)                                              | 1 | - |
| GARIS                                                                | 1 | - |
| Komite sekolah                                                       | 1 | - |
| Lubis Institute                                                      | 1 | - |
| MIUMI                                                                | 1 | - |
| Pembela Ahlus Sunnah (PAS) Jawa Barat                                | 1 | - |
| Ormas Islam tidak teridentifikasi                                    | 1 | - |
| Tokoh Masyarakat                                                     | 1 | 2 |
| Santri                                                               | 1 | - |
| Pelajar                                                              | 1 | - |
| Warga Komplek                                                        | 1 | - |
| Manajemen Toko Swalayan                                              | 1 | - |
| Kelompok GOIB Sukabumi                                               | 1 | - |
| Massa GIDI Tolikara                                                  | 1 | - |
| Komite Pemuda Islam Makassar                                         | 1 | - |
| LUIS Surakarta                                                       | 1 | - |
| MPU Aceh                                                             | 1 | - |
| Pekat IB Kuningan                                                    | 1 | - |
| Aliansi Aksi Umat Islam Indonesia                                    | 1 | - |
| Rizieq Shihab                                                        | - | 1 |
| Tokoh agama                                                          | - | 2 |
| Abu Jibril                                                           | - | 1 |
| GAPAS                                                                | - | 1 |
| MMI                                                                  | - | 1 |
| Koordinator senat Mahasiswa                                          | - | 1 |
| Pengguna Media Sosial                                                | - | 2 |

*Tabel 7. Aktor Non negara*

Secara umum potret aktor non negara dalam berbagai peristiwa pelanggaran tidak berbeda jauh dari tahun 2014. Tindakan massa masih mendominasi kasus-kasus pelanggaran. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di sejumlah tempat menjadi aktor kedua terbanyak. Tindakan yang biasanya dilakukan MUI adalah memfatwa sesat bagi kelompok yang berbeda. Tindakan lain biasanya mendesak aparat negara menghukum mereka yang dinilai sesat dan menodai agama. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan FPI, pada umumnya penolakan kegiatan keagamaan, penolakan atau pelarangan rumah ibadah, intimidasi dan ancaman, dan upaya kriminalisasi. Harus diakui, di tahun 2015 kasus-kasus kekerasan dan serangan fisik dalam isu KBB ini berkurang.

### 3.2.6 Tindakan Aktor Negara

Tiga bentuk tindakan pelanggaran terbanyak dilakukan aktor negara adalah pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah (37 tindakan); ujaran kebencian (20 tindakan); dan kriminalisasi keyakinan atas dasar agama/keyakinan (16 tindakan) .



*Gambar 8. Bentuk-bentuk Tindakan Pelanggaran Negara*

### 3.2.7 Tindakan Aktor Non Negara

Sementara itu tiga bentuk tindakan pelanggaran terbanyak yang dilakukan aktor non negara yaitu, ujaran kebencian (24 tindakan), pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah (16 tindakan), dan penyesatan keyakinan (15 tindakan). Lebih rinci bentuk tindakan oleh aktor non negara, berikut ini:



*Gambar 9. Bentuk-bentuk Tindakan Pelanggaran Non Negara*

### 3.2.8 Korban Tindakan Negara

Dalam banyak kasus pelanggaran KBB, kelompok minoritas kebanyakan menjadi korbannya. Kelompok aliran terduga sesat merupakan korban terbanyak (30 tindakan), sedang individu yang diduga sesat: 6 tindakan. Kelompok kedua terbanyak yaitu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI): 12 tindakan, umat Kristen: 10 tindakan, GAFATAR: 9 tindakan. Sementara korban individu dari GAFATAR sebanyak 6 tindakan.

| KORBAN               | KELOMPOK | INDIVIDU |
|----------------------|----------|----------|
| Aliran terduga sesat | 30       | 6        |
| JAI                  | 12       |          |
| Umat Kristen         | 10       |          |
| Anggota GAFATAR      | 8        | 6        |
| Pasangan suami istri | 4        |          |
| Pondok Pesantren     | 4        |          |
| Umat Syiah           | 4        |          |
| Gereja               | 3        | 8        |
| LDII                 | 3        |          |
| SMP/SMA              | 2        |          |



|                                                 |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Penghayat kepercayaan                           | 2         | 1         |
| Umat Beragama Non GIDI                          | 2         |           |
| Agama yang Tidak Diakui                         | 1         |           |
| Calon Mahasiswa LN                              | 1         |           |
| Siswa muslim                                    | 1         |           |
| Warga masyarakat                                | 1         |           |
| Tareqat Naqshabandiyah                          | 1         |           |
| Calon Siswa SMP hingga Mahasiswa                | 1         |           |
| Aparat pemerintah                               | 1         |           |
| Falun Gong                                      | 1         |           |
| Pengelola/jemaah masjid                         | 1         |           |
| GKI Yasmin                                      | 1         |           |
| HKBP Filadelfia                                 | 1         |           |
| Pengelola/karyawan hotel, perkantoran, dan mall | 1         |           |
| Basuki Tjahaya Purnama                          |           | 1         |
| Dosen                                           |           | 1         |
| Tokoh agama                                     |           | 1         |
| Narapidana                                      |           | 1         |
| Individu                                        |           | 3         |
| Undang-undang                                   |           | 2         |
| Jemaah Annadzir                                 |           | 8         |
| Pelaku dituduh Menodai agama                    |           | 2         |
| <b>JUMLAH</b>                                   | <b>96</b> | <b>40</b> |

*Tabel 10. Korban Pelanggaran Negara*

### 3.2.9 Korban Tindakan Aktor Non Negara

Tidak berbeda jauh dengan korban tindakan negara. Kelompok terbanyak yang menjadi korban adalah kelompok aliran terduga sesat (15 tindakan). Disusul Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) : 14 tindakan, umat Kristiani dan dan Syiah: masing-masing 10 tindakan, jemaat gereja: 6 tindakan, dan kelompok dan individu GAFATAR masing-masing 4 tindakan. Selengkapnya:

| KORBAN                                          | KELOMPOK | INDIVIDU |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| Aliran terduga sesat                            | 15       | 7        |
| JAI                                             | 14       |          |
| Umat Kristiani                                  | 10       |          |
| Umat Syiah                                      | 10       | 2        |
| pengelola/karyawan hotel, perkantoran, dan mall | 7        |          |
| Jemaat Gereja                                   | 6        |          |
| GAFATAR                                         | 4        | 4        |
| Pondok Pesantren                                | 4        |          |
| Tarekat Naqsyabandiyah                          | 3        |          |

|                                   |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Umat Islam                        | 3         |           |
| Pengelola/jemaah masjid           | 3         |           |
| Pengahayat kepercayaan            | 2         | 1         |
| Calon mahasiswa LN                | 1         |           |
| Eks anggota PKI                   | 1         |           |
| Guru                              | 1         |           |
| Karyawan perempuan                | 1         |           |
| Pasangan suami istri              | 1         |           |
| Patung                            | 1         |           |
| Penganut Baha'i                   | 1         |           |
| Pengelola hotel                   | 1         |           |
| Perguruan Tinggi                  | 1         |           |
| Simbol negara                     | 1         |           |
| Warga masyarakat anti ISIS        | 1         |           |
| Warga non-muslim                  | 1         |           |
| Warga umum                        | 1         |           |
| Sejuk                             | 1         |           |
| Pengelola Rausyan Fikr Yogyakarta | 1         |           |
| Warga umum                        | 1         |           |
| Basuki Tjahaya Purnama            |           | 1         |
| Dosen/akademisi                   |           | 3         |
| Individu                          |           | 2         |
| Khatib                            |           | 1         |
| Petugas keamanan                  |           | 1         |
| Saksi di pengadilan               |           | 1         |
| Sutradara film                    |           | 1         |
| Tokoh agama                       |           | 1         |
| Imigran Iran                      |           | 30        |
| Dedi Mulyadi                      |           | 2         |
| Muhammad Nur Maulana              |           | 1         |
| Calon walikota dan wakil walikota |           | 2         |
| Rizieq Shihab                     |           | 1         |
| Pelaku dituduh Menodai agama      |           | 3         |
| <b>JUMLAH</b>                     | <b>97</b> | <b>64</b> |

*Tabel 11. Korban Pelanggaran Non negara*

### 3.3 Kemajuan dan Praktik Baik

Pada tahun 2015, The Wahid Institute meningkatkan pemantauan pada sisi praktik baik kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Langkah ini dilakukan guna mendorong agar praktik-praktik tersebut menjadi inspirasi bagi berbagai pihak agar lebih menghormati hak atas KBB, dan terbangun toleransi antar pemeluk agama dan keyakinan di Indonesia.

Selama tahun 2015, The Wahid Institute mencatat 117 praktik baik di berbagai wilayah di Indonesia. Praktik baik ini mencakup statement publik, kebijakan negara dan program-program yang mendukung KBB dan toleransi.

Bentuk praktik baik yang paling banyak dilakukan adalah promosi keragaman (40 peristiwa), diikuti praktik toleransi di berbagai daerah (36 peristiwa), dan menghormati keyakinan (16 peristiwa). Ada juga praktik baik dalam bentuk program deradikalisasi (8 peristiwa).

Salah satu contoh promosi keragaman yang tercatat misalnya dilakukan oleh IAIN Purwokerto bekerjasama dengan Gusdurian Banyumas yang menyelenggarakan seminar “Titik Temu Sunni-Syiah, Memperkokoh Islam Nusantara” di tengah derasnya upaya mempertentangkan antara Sunni dan Syiah di Indonesia.



*Gambar 10. Bentuk-bentuk Praktik Baik*

Bila dicermati selama satu tahun ini, praktik-praktik baik menunjukkan tren terus meningkat. Praktik baik paling tinggi terjadi pada bulan Desember: 36 peristiwa, diikuti bulan Juli: 18 peristiwa, Oktober: 13 peristiwa, dan Pebruari: 10 peristiwa.

Fakta ini dapat menjadi gambaran optimistis, meskipun selama tahun 2015 terjadi peningkatan pelanggaran KBB, namun hal itu juga diimbangi oleh praktik-praktik baik yang terus meningkat.

Salah satu praktik baik pada bulan Desember misalnya dilakukan oleh masyarakat Papua yang menyelenggarakan Perayaan Natal Mama dan Anak, tahun 2015 yang berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR) Cenderawasih.

Dalam perayaan tersebut, puluhan pemuda-pemudi muslim mengulurkan tangan sukseskan acara tersebut.



*Gambar 11. Sebaran Praktik Baik Per-bulan*

Dari segi sebaran wilayah, praktik baik terbanyak terjadi di Jakarta (31 peristiwa), diikuti Jawa Barat (15 peristiwa), Jawa Tengah dan Jawa Timur (11 peristiwa) dan Papua (8 peristiwa).

Praktik baik paling banyak terjadi di Jakarta mencakup program-program promosi keragaman, tindakan-tindakan menghormati keyakinan dan program-program deradikalisasi. Sementara praktik-praktik baik yang paling banyak terjadi di Jawa Barat meliputi, program promosi keragaman dan advokasi keyakinan.

Salah satu model praktik toleransi di Jakarta adalah kehidupan rukun masyarakat Jakarta di RT 06 / RW 16 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di permukiman dekat pelabuhan dan terminal ini, sebuah gereja dan masjid berdiri berdampingan menghadap Jalan Enggano tanpa pernah ada konflik antara kedua umat beragama.

Fakta yang menarik lainnya adalah bahwa Jawa Barat menjadi wilayah dengan praktik baik tertinggi kedua, meskipun dalam temuan pelanggaran KBB, Jawa Barat adalah daerah dengan tingkat pelanggaran KBB tertinggi. Hal ini dapat menjadi gambaran meskipun pelanggaran dan intoleransi tinggi, masyarakat Jawa Barat terus mengimbangnya dengan berbagai praktik baik.

Salah satu yang penting diapresiasi di Jawa Barat adalah sikap Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Moechgiyanto yang melarang jajarannya untuk melakukan penyegelan rumah ibadah apabila ada sengketa terkait rumah ibadah, karena

yang berwenang melakukan penyegelan tersebut adalah pemerintah daerah melalui putusan pengadilan.



*Gambar 12. Sebaran Wilayah Praktik Baik*

Sementara dari aktor praktik baik, tercatat praktik baik terbanyak dilakukan oleh warga masyarakat (29 peristiwa), diikuti keluarga besar NU (11 peristiwa) dan tokoh agama (8 peristiwa). Dari aktor negara tercatat kepolisian paling banyak melakukan praktik baik (8 peristiwa).

Fakta ini menunjukkan bahwa warga masyarakat di berbagai daerah sesungguhnya masih mempertahankan modal sosial dalam bentuk keragaman dan penghormatan terhadap keragaman tersebut dengan berbagai cara, baik yang sudah ada maupun cara-cara baru.

Bahkan ormas keagamaan, dalam hal ini NU masih merupakan jangkar keragaman yang menonjol di Indonesia. Organisasi ini terus menunjukkan peran yang signifikan dalam menjaga keragaman tersebut.

| PELAKU            | JUMLAH |
|-------------------|--------|
| Warga masyarakat  | 29     |
| Keluarga Besar NU | 11     |
| Tokoh agama       | 8      |
| Kepolisian        | 8      |
| Pemda             | 6      |
| Kementerian Agama | 5      |
| FKUB              | 5      |
| Gubernur          | 5      |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| MUI                              | 4          |
| TNI                              | 4          |
| Menteri Dalam Negeri             | 3          |
| Anggota DPR                      | 3          |
| Muhammadiyah                     | 3          |
| Muslim Tionghoa                  | 2          |
| Universitas                      | 2          |
| GIDI Papua                       | 2          |
| Umat Kristen                     | 2          |
| Mahasiswa                        | 2          |
| Dosen                            | 1          |
| Presiden                         | 1          |
| Ibu Negara                       | 1          |
| Kelompok belajar                 | 1          |
| Majelis agama                    | 1          |
| Forkopimda                       | 1          |
| Wakil Bupati                     | 1          |
| Yayasan Hakka Aceh               | 1          |
| Calon Bupati                     | 1          |
| Keluarga Besar Kesultanan Banten | 1          |
| Pemangku adat Jimbaran           | 1          |
| Pendidik PAUD                    | 1          |
| KPU/ KPUD                        | 1          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>117</b> |

*Tabel 12. Pelaku Praktik Baik*

## BAGIAN IV

### ANALISIS

#### **4.1 Peristiwa Pelanggaran**

##### **4.1.1 Mengapa Naik?**

Meningkatnya jumlah pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) pada tahun 2015, bila dibandingkan tahun 2014, disebabkan tidak adanya perubahan signifikan dalam pola penanganan kasus-kasus pelanggaran KBB oleh pemerintah, meskipun telah terjadi perubahan kepemimpinan nasional. Pola penanganan pelanggaran KBB oleh pemerintah, seperti penegakan hukum, pemulihan hak korban dan inklusi antar para pihak yang terlibat konflik agama, terlihat kurang sistematis dan hanya bersifat sporadis.

Memang harus diakui, ada keinginan yang kuat terutama dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan KBB dan intoleransi yang dianggap sebagai salah satu problem utama bangsa. Namun niat tersebut tidak kunjung diimplementasikan dengan langkah konkret dengan menuntaskan berbagai masalah yang masih menggantung, seperti masalah pengungsi umat Syiah Sampang, masalah GKI Yasmin, masalah pembakaran dan penutupan gereja-gereja di Aceh Singkil, masalah masjid di Manokwari dan Bitung dan berbagai permasalahan lainnya. Akibatnya korban pelanggaran masih terus mengalami pembiaran. Ibarat utang warisan, utang tersebut tak kunjung terlunasi.

##### **4.1.2 Mengapa aktor negara lebih banyak?**

Tren negara sebagai aktor paling banyak terlibat pelanggaran KBB dibanding non negara menunjukkan adanya intensitas dan massifnya pengarusutamaan (*mainstreaming*) intoleransi di kalangan aparat pemerintah, terutama di lingkungan Pemerintah Daerah. Posisi ini tidak berbeda dengan temuan tahun lalu.

Harus dikatakan meski ada upaya serius dalam merespons kasus-kasus pelanggaran KBB, namun menyangkut visi pemenuhan hak beragama dan sensitivitas terhadap isu-isu intoleransi masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Potret ini hendak pula mengingatkan bahwa peran negara, khususnya pemerintah sebagai pelaksana pemenuhan hak beragama, memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi arah dan pemenuhan hak KBB. Upaya menurunkan tindakan-tindakan pelanggaran KBB yang dilakukan negara, kemungkinan berdampak besar terhadap turunya peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB secara keseluruhan.

#### **4.1.3 Mengapa Jawa Barat dan Aceh?**

Persoalan tingginya angka pelanggaran KBB di Jawa Barat selalu menjadi tanda tanya besar dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang lima tahun terakhir, Laporan The Wahid Institute menempatkan Jawa Barat dalam posisi pertama provinsi dengan peristiwa pelanggaran terbanyak di Indonesia. Selain laporan ini, beberapa laporan dari organisasi masyarakat sipil maupun lembaga negara seperti Komnas HAM pada tahun 2015 juga demikian: Jawa Barat menjadi provinsi paling rentan terjadinya pelanggaran KBB.

Salah satu faktor yang sering diungkapkan menjadi faktor pendorong tingginya pelanggaran KBB di Jawa Barat adalah massifnya pertumbuhan kelompok-kelompok intoleran, seperti ormas-ormas keagamaan garis keras, bila dibandingkan dengan wilayah lain. Kelompok-kelompok intoleran ini seringkali menggunakan isu-isu keagamaan, seperti penertiban rumah ibadah tidak berijin, dan pemberantasan aliran sesat sebagai jargon-jargon mereka. Kelompok-kelompok ini tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, namun aksi-aksi yang mereka lakukan seringkali menjangkau daerah-daerah di luar domisili mereka. Hal ini seringkali dikeluhkan berbagai pihak sebagai intervensi pihak luar yang memperkeruh konflik agama di satu daerah.

Sepanjang tahun ini, kasus yang menonjol di Jawa Barat yaitu kasus-kasus seperti pemukulan terhadap petugas keamanan kompleks Az Zikra yang dipimpin Arifin Ilham, pada pertengahan Februari 2015. Kasus tersebut terkait dengan spanduk anti-Syiah di kompleks tersebut. Kasus-kasus yang menimpa anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di sejumlah daerah di Jawa Barat juga masih terjadi. Misalnya pelarangan penggunaan masjid JAI di Kota Banjar pada Maret 2015.

Sementara itu, permasalahan yang terjadi di Aceh sedikit berbeda. Pada tahun 2015 ini tindak pelanggaran KBB di Aceh mengalami peningkatan



drastis hingga menempati posisi kedua setelah Jawa Barat. Apabila dilihat dari permasalahan-permasalahan yang muncul, maka dapat disimpulkan bahwa masalah utama di Aceh adalah karena negara justru paling banyak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Persoalan GAFATAR, masalah gereja di Aceh Singkil dan isu kristenisasi justru mendapat respon yang paling banyak dari aktor negara. Fakta ini menunjukkan bahwa ada persoalan mendasar dalam penghormatan dan jaminan hak atas KBB oleh negara di Aceh. Bahkan hingga saat ini masalah gereja di Aceh Singkil tidak kunjung selesai karena negara lebih tunduk kepada kehendak kelompok intoleran.

#### **4.1.4 Mengapa DKI Jakarta?**

Temuan cukup mengejutkan dalam laporan ini adalah munculnya DKI Jakarta sebagai wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi ketiga. Menjadi mengejutkan karena Jakarta adalah ibukota negara dan menjadi barometer bagi wilayah lain di Tanah Air.

Salah satu faktor utama tingginya angka pelanggaran di Jakarta adalah permasalahan JAI Bukit Duri yang tidak kunjung terselesaikan. Permasalahan JAI yang muncul karena adanya penolakan dari sebagian warga, yang justru direspon Pemkot Jakarta Selatan dengan melarang JAI beribadah dengan alasan perijinan.

Faktor lain yang juga menonjol adalah massifnya ujaran kebencian terhadap identitas agama dan etnis Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Ahok kerap kali menjadi korban ujaran kebencian karena sikapnya yang dianggap resisten terhadap ormas-ormas tertentu. Ujaran-ujaran kebencian terhadap Ahok tidak hanya melibatkan sebagian warga melainkan juga pejabat pemerintah seperti anggota DPRD DKI Jakarta.

Di sisi yang lain, respons dan tindakan pihak kepolisian terhadap berbagai ujaran kebencian ini juga kurang tegas. Sehingga tindakan yang sama terus diulang oleh berbagai pihak.

Meski “turun peringkat” ke posisi empat, Yogyakarta masih menjadi wilayah yang menghadapi tantangan serius pelanggaran KBB. Tahun ini beberapa isu yang menguat antara lain terkait kasus pembangunan gereja dan Syiah. Pada tahun 2014, Yogyakarta menempati posisi kedua.

#### **4.1.5 Mengapa Lampung?**

Yang menarik, tahun ini Lampung menempati wilayah keenam paling banyak terjadinya peristiwa pelanggaran. Di propinsi ini, dua peristiwa yang menonjol terkait Pesantren Nurul Ulum pimpinan Adi Suhandoyo yang dianggap sesat di Kemiling, dan kasus pelarangan beribadah di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) di kecamatan Tanjung Bandar Lampung.

#### **4.1.6 Mengapa Kepolisian dan Pemerintah Daerah paling banyak?**

Seperti analisis dan temuan tahun lalu, posisi kepolisian yang masih menjadi aktor negara terbanyak melakukan pelanggaran kemungkinan besar disebabkan beberapa hal. *Pertama*, institusi kepolisian merupakan institusi terdepan dalam tiga tugas dan wewenangnya, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga peluang dicatat dan dilaporkan, lebih sering dibanding dengan institusi lain. *Kedua*, hal ini juga menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih belum maksimal dalam menjalankan fungsi perlindungan, pemenuhan, dan mempromosikan hak-hak kemerdekaan beragama. Tindakan yang masih sering ditemukan adalah kasus-kasus kriminalisasi penganut agama/keyakinan dengan menggunakan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Sementara itu aktor terbanyak kedua adalah pemerintah daerah (terdiri dari pemkot/pemkab, bupati/walikota, camat, satpol PP, kantor kemenag). Ini menunjukkan bahwa tantangan utama pemenuhan dan perlindungan hak kemerdekaan beragama terletak di tingkat kota atau kabupaten, bahkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini berarti keberhasilan mengatasi kasus-kasus pelanggaran KBB, atau upaya preventif sangat terkait dengan kapasitas aparat di tingkat daerah. Para aparat pemerintah penting untuk mengedepankan prinsip layanan publik non diskriminatif.

#### **4.1.7 Mengapa Pendirian Rumah Ibadah & Ujaran Kebencian paling tinggi?**

Dari data di atas, terlihat bahwa tantangan sepanjang tahun 2015 terkait dengan pengelolaan dan pendirian rumah ibadah. Masalah ini juga tidak

berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Masalah ini muncul mulai dari Aceh hingga Papua, dan melibatkan pelaku tidak hanya dari satu agama. Hal ini menunjukkan bahwa pola penanganan konflik rumah ibadah yang ada selama ini tidak efektif. Selain itu juga menunjukkan bahwa regulasi terkait rumah ibadah, dalam hal ini PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, tidak efektif mengurai permasalahan pendirian rumah ibadah.

Masalah pendirian rumah ibadah pada umumnya adalah gereja. Tetapi di sejumlah wilayah berpenduduk minoritas muslim, pendirian masjid juga menjadi kendala. Misalnya kasus Masjid di Tolikara (Juli 2015) atau Masjid Syuhada di Sulawesi Utara (Nopember 2015). Dari kasus-kasus ini, bisa dikatakan bahwa ini bukan hanya faktor agama, tetapi faktor “relasi kekuasaan” antara kelompok yang memiliki kekuasaan yang besar (mayoritas) dengan mereka yang lebih kecil (minoritas). Karena itu penting mendorong sensitivitas di kalangan aparat negara terkait hak dan eksistensi kelompok-kelompok minoritas berbasis agama/keyakinan.

Ujaran kebencian (*hate speech*) ternyata tidak hanya mewabah di masyarakat sipil. Di kalangan aparat, ujaran kebencian masih menjadi “ancaman” serius kedua setelah kasus rumah ibadah. Kasus-kasus ujaran kebencian ini biasa ditujukan kepada kelompok-kelompok yang didugut sesat. Aparat dan pejabat masih sering menggunakan istilah “aliran sesat”. Dalam sejumlah kasus bahkan menyatakan agar hati-hati terhadap bahaya aliran sesat. Jika tidak segera dihentikan, tindakan-tindakan tersebut bisa menyuburkan kebencian terhadap kelompok tertentu di tengah masyarakat. Pandangan tersebut juga menyebabkan aparat tidak *fair* dan adil dalam melindungi dan melayani hak-hak minoritas sebagai warga negara. Pemantauan Wahid Institute menunjukkan bahwa ujaran kebencian menjadi jalan pertama menuju kasus-kasus kekerasan.

Patut dicatat keberadaan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian belum menunjukkan efektifitasnya dalam mengatasi masalah ini. Selain SE ini baru keluar pada triwulan terakhir 2015, sosialisasi dan penegakan di lapangan juga belum optimal.

Jika dibandingkan, ternyata dua tindakan pelanggaran terbanyak yang dilakukan negara sejalan dengan pelanggaran yang dilakukan aktor non negara: pembatasan/pelarangan/ penyegelan rumah ibadah, dan ujaran kebencian.

Dalam banyak kasus, apa yang dilakukan non negara seakan-akan dilegitimasi kebijakan negara.

#### **4.1.8 Lima kelompok minoritas paling rentan**

Perlu dicatat, setidaknya lima kelompok terbanyak menjadi korban adalah aliran diduga sesat dan umat Kristen. Di antara kelompok yang diduga sesat dan menodai agama adalah JAI, Syiah, dan GAFATAR. Puluhan nama kelompok yang diduga sesat bisa dilihat di atas. Terkait dengan aliran diduga sesat, data ini sesungguhnya sebanding dengan dampak ikutan dari tindakan terbanyak oleh aktor negara dan non negara, yaitu penyebaran ujaran kebencian. Tindakan lain yang membuat kelompok ini makin rentan adalah kriminalisasi dan diskriminasi. Sudah saatnya negara maupun masyarakat memperkuat sensitivitas terhadap kelompok rentan ini, baik melalui kebijakan maupun gerakan di akar rumput. Tanpa upaya ini kemungkinan kasus-kasus dan korban masih terus terjadi di tahun mendatang.

#### **4.1.9 Mengapa massa, MUI dan FPI menjadi pelaku pelanggaran terbanyak?**

Pelaku pelanggaran non-negara sejak tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa massa, MUI dan FPI selalu menempati posisi teratas. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, belum adanya tindakan tegas aparat yang dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran hukum yang melibatkan ketiga entitas tersebut, misalnya aksi kekerasan, intimidasi maupun penyebaran ujaran kebencian.

*Kedua*, MUI seringkali menggunakan otoritas keagamaan mereka sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang paham keagamaan tertentu secara kurang bijaksana, dan tanpa mempertimbangkan dampak sosiologis di masyarakat.

*Ketiga*, organisasi keagamaan seperti FPI seringkali menggunakan alasan mencegah kemungkaran atas nama agama dengan mengutamakan pendekatan koersif ketimbang persuasif.

### **4. 2 Meningkatnya Praktik Baik**

Selama tahun 2015, The Wahid Institute menemukan ada 117 praktik

baik di berbagai wilayah di Indonesia. Praktik baik ini mencakup statement publik, kebijakan negara dan program-program yang mendukung KBB dan toleransi. Jumlah praktik baik di atas menunjukkan bahwa praktik toleransi dan penghormatan terhadap hak KBB masih menjadi modal sosial di Indonesia yang terus dijaga oleh masyarakat.

Selain itu, meningkatnya praktik baik pada bulan Desember 2015 didorong oleh keinginan kuat pemerintah untuk mengantisipasi konflik keagamaan mengingat pada bulan tersebut berlangsung dua perayaan besar keagamaan yang berhimpitan, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW dan Natal. Selain itu, berbagai elemen pemerintah berlomba-loma melakukan promosi keragaman pada bulan itu guna mencegah terulangnya konflik keagamaan. Mereka berkaca pada konflik antar umat beragama seperti yang terjadi beberapa bulan sebelumnya di Tolikara, Papua dan Singkil, Aceh.



## **BAGIAN V**

### **REKOMENDASI**

Dari temuan dan analisis di atas, The Wahid Institute merekomendasikan:

#### **Kepada Pemerintah dan DPR:**

1. Mendesak kepada Presiden dan Pemerintah Pusat untuk lebih serius dalam melaksanakan visi dan program Nawacita yang telah dicanangkan sebagai panduan arah kebijakan pemerintah khususnya dalam meningkatkan jaminan perlindungan hak beragama dan toleransi. Dengan adanya kenaikan jumlah pelanggaran KBB selama tahun 2015 ini menunjukkan bahwa visi dan arah kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara optimal.
2. Mendesak Pemerintah dan DPR agar melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah khususnya dalam kaitannya dengan intervensi sejumlah Pemerintah Daerah terhadap urusan beragama masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
3. Mendesak Pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah Peraturan Perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang melanggar hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan dan diskriminatif. Antara lain:
  - a. Undang-undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
  - b. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - c. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
  - d. Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

- Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- e. Berbagai Peraturan Daerah tentang Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah.
  4. Mendesak Pemerintah dan DPR agar segera menyusun Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh rakyat Indonesia,
  5. Khusus kepada Presiden Joko Widodo, agar segera merealisasikan janji-janji untuk menegakkan konstitusi dan menjamin setiap warga negara terlindungi hak dan kebebasannya dalam beragama. Kami meminta Presiden untuk membuktikan komitmen dan janji tersebut dengan menyelesaikan kasus-kasus KBB:
    - a. Pemulangan pengungsi warga Syiah Sampang dari tempat pengungsian di Surabaya Jawa Timur.
    - b. Pemulangan warga Ahmadiyah Lombok dari tempat pengungsian di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
    - c. Kasus Mushalla Assyafiiyah di Kota Denpasar Bali.
    - d. Kasus GKI Taman Yasmin Bogor Jawa Barat.
    - e. Kasus penyegelan gereja-gereja di Aceh Singkil.
    - f. Kasus gereja HKBP Filadelfia di Bekasi Jawa Barat.
  6. Mendesak Pemerintah dan DPR agar terus memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan hak beragama di Indonesia. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan regulasi yang melindungi peran dan keberadaan mereka sebagai pendamping masyarakat dan mitra pemerintah.
  7. Terkait dengan berbagai praktik baik, mendesak Pemerintah Pusat untuk meningkatkan dukungan terhadap berbagai praktik toleransi di masyarakat dengan mendorong, memfasilitasi dan mereplikasi praktik-praktik tersebut di daerah lain sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

### **Kepada Pemerintah Daerah**

1. Mendesak kepada Pemerintah Daerah seperti Jawa Barat, Aceh, DKI Jakarta dan Yogyakarta untuk lebih menyadari persoalan keagamaan di wilayah masing-masing dengan melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor



yang mendorong berbagai pelanggaran KBB dan diskriminasi di wilayah ini. Hal ini sangat penting agar dapat dirumuskan model penanganan yang tepat terhadap pelanggaran KBB dan diskriminasi tersebut.

2. Khusus kepada Pemerintah Jawa Barat, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar lebih memprioritaskan program-program pemerintah dalam mengurangi dan mencegah praktik-praktik pelanggaran KBB dan diskriminasi. Misalnya, dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak KBB bagi aparat pemerintah. Hal ini sangat penting mengingat kecenderungan praktik-praktik pelanggaran KBB di Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun.
3. Kepada Pemerintah Jawa Barat agar mendorong berbagai praktik baik yang sudah ada terus dikembangkan, dan bila perlu didukung oleh program-program pemerintah termasuk menyediakan anggaran untuk memperbanyak praktik-praktik tersebut di daerah-daerah dengan tingkat pelanggaran KBB yang tinggi.

### **Kepada Aparat Kepolisian**

1. Mendesak kepada pimpinan kepolisian agar terus meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dalam menangani tindak pelanggaran KBB, termasuk dalam menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok intoleran. Hal ini sangat penting agar aparat kepolisian tidak terseret dan terlibat menjadi pelaku pelanggaran.
2. Mendesak kepada kepolisian untuk meningkatkan sosialisasi dan penegakan Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian, baik kepada internal institusi kepolisian maupun kepada masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat praktik pelanggaran KBB dalam bentuk ujaran kebencian masih tinggi.

### **Kepada Lembaga Yudikatif**

1. Mendesak kepada Pengadilan dan Mahkamah Agung agar lebih serius menegakkan hukum dalam melindungi kelompok minoritas. Kami juga mendesak agar institusi peradilan tidak lagi tunduk kepada tekanan sebagian masyarakat yang selama ini cenderung menjadikan minoritas

dan pihak yang lemah yang justru dikriminalisasi. Sebagai penjaga kedaulatan hukum, peradilan tidak boleh ragu dalam menerapkan hukum kepada siapapun, apapun agama dan keyakinannya.

### **Kepada Komnas HAM**

1. Agar melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan diskriminasi di berbagai wilayah. Kami mendesak agar Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikan tersebut kepada publik sebagai konsekuensi atas hak untuk tahu bagi masyarakat.
2. Mendesak agar Komnas HAM meningkatkan pendidikan HAM bagi aparatur pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

### **Kepada Organisasi Keagamaan**

1. Mendesak kepada organisasi-organisasi keagamaan untuk terus meningkatkan sikap toleransi dan penghormatan hak beragama kepada pengikutnya serta menghindarkan diri dari tindakan persekusi kepada kelompok lain yang berbeda keyakinan, mencegah tindak kekerasan kepada kelompok lain baik secara fisik maupun dalam bentuk penyebaran kebencian,
2. Agar para pemimpin ormas keagamaan terus mendorong dialog-dialog yang produktif membangun toleransi dan menghormati perbedaan.

[end]

# **Matriks 1**

**Pelanggaran, Intoleransi dan Diskriminasi  
2015**



### Matriks Pelanggaran, Intoleransi dan Diskriminasi 2015

| No. | PERISTIWA                                                | DESKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KOTA/<br>KABUPATEN | PROVINSI   | WAKTU   | TINDAKAN                                      | NEGARA/<br>NON-NEG-<br>ARA | AKTOR                                | KORBAN            |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1   | Diancam Karena Ajarkan Toleransi                         | Pada 06 Januari 2015, Rosnida Sari, dosen IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh mendapat ancaman dari ratusan temannya di Facebook karena menerbitkan tulisannya di salah satu media di Australia yang menceritakan dirinya yang mengajak para mahasiswa mengetahui agama lain dengan berkunjung ke sebuah gereja di Banda Aceh. Rosnida dituduh melakukan "permurtadan." Dia dipersoalkan karena tak pakai jilbab serta merangkul anjing di Australia. Dia banyak dapat kecaman dan ancaman. Hari ketiga setelah tulisannya diterbitkan, dia meninggalkan Banda Aceh | Banda Aceh         | Aceh       | Januari | Intimidasi dan ancaman                        | Non-negara                 | Pengguna media sosial                | Rosnida Sari      |
| 2   | Pemerintah Tuduh Gafatar di Gorontalo Lakukan Pemurtadan | Pada 06 Januari 2015, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi, mengatakan, aliran Gafatar yang marak beredar di wilayah Gorontalo perlu diwaspadai karena melakukan pemurtadan kepada masyarakat. "Kami sudah menyelidiki aliran yang masuk melalui Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang; Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito dan Anggrek, merupakan aliran pemurtadan bagi masyarakat yang beragama," ujar Wahab.                                                                                                     | Gorontalo          | Gorontalo  | Januari | Ujaran kebencian                              | Negara                     | Kepala Kesbangpol Gorontalo          | Gafatar Gorontalo |
| 3   | Dipanggil Dekan Karena Ajarkan Toleransi                 | Pada 07 Januari 2015, Rosnida Sari, dosen IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dipanggil Dekan Pakultas Dakwah IAIN Ar Raniry karena mempublish tulisannya di salah satu media Di Asustralia yang menceritakan dirinya yang mengajak para mahasiswa mengetahui agama lain dengan berkunjung ke sebuah gereja di Banda Aceh. Rosdiana mendapat teguran dari dekan karena tulisannya tersebut.                                                                                                                                                                         | Banda Aceh         | Aceh       | Januari | Intimidasi dan ancaman                        | Negara                     | Dekan Fakultas Dakwah IAIN Ar Raniry | Rosnida Sari      |
| 4   | Satpol PP Segel Masjid Ahmadiyah Depok                   | Pada 07 Januari 2015, Masjid jemaah Ahmadiyah, di Jalan Raya Sawangan Depok, kembali disegel petugas Satpol PP, Penyegehan ini menyusul adanya laporan kegiatan jemaah Ahmadiyah di dalam masjid tersebut. Kabid PSD Satpol PP Depok, Pribadi Ikbal menuturkan, pihaknya terpaksa menyegel kembali masjid ini lantaran segel yang ada telah dirusak.                                                                                                                                                                                                                 | Depok              | Jawa Barat | Januari | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara                     | Satpol PP Depok                      | JAI Depok         |

|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |         |                                                       |            |                              |                    |
|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| 5 | Warga Grebeg Kantor Gafatar Aceh                | Pada 07 Januari 2015, Puluhan warga Lamgapang, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, bereaksi keras atas kehadiran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh di Krueng Barona Jaya menggerebek Kantor Gafatar yang baru sebulan dibuka di Desa Lamgapang, karena stafnya diduga warga menganut dan menyebarkan aliran sesat. Penggerebakan juga melibatkan aparat Desa Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, bersama sejumlah personel dari Polsek Krueng Barona Jaya                                                                                                                                                   | Aceh Besar | Aceh       | Januari | Pembatasan/pelarangan/penyebaran agama atau keyakinan | Non-negara | Sekelompok massa             | Gafatar Aceh Besar |
|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |         | Pembatasan/pelarangan/penyebaran agama atau keyakinan |            |                              |                    |
| 6 | Upaya Penyerangan Karena Ajarkan Toleransi      | Pada 08 Januari 2015, rumah milik Rosnida Sari, dosen IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh hampir diserang dan dirusak sejumlah massa yang marah karena Rosnida mempublikasikan tulisannya di salah satu media Di Asustralia yang menceritakan dirinya yang mengajak para mahasiswanya mengetahui agama lain dengan berkunjung ke sebuah gereja di Banda Aceh. Rosnida akhirnya mengungsikan keluarganya ke tempat yang aman                                                                                                                                                                             | Banda Aceh | Aceh       | Januari | Intimidasi dan ancaman                                | Non-negara | Sekelompok massa             | Rosnida Sari       |
| 7 | Karyawan Tak Boleh Pakai Jilbab di Mataram NTB  | Beberapa perusahaan di wilayah Kota Mataram masih ditemukan menerapkan aturan yang diskriminasi terhadap karyawannya. Perlakuan diskriminasi tersebut ditemukan saat tim Disosnakertrans Kota Mataram dan Disnakertrans NTB melakukan sidak di Tiara Group di Mataram Mall, Kamis (08/01/2015). Dalam sidak yang dipimpin langsung oleh Kadis Sosnakertrans Kota Mataram, Akhsanul Khalik, terungkap di perusahaan penjualan baju dan pakaian di Mataram Mall tersebut tidak memperbolehkan pramuniaganya menggunakan jilbab pada saat bekerja.                                                          | Mataram    | NTB        | Januari | Pelarangan aktifitas atas dasar agama                 | Non-negara | Tiara Dept. Store            | Karyawan perempuan |
| 8 | FPI Desak Pemkot Depok Bongkar Masjid Ahmadiyah | Pada 11 Januari 2015, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Depok Idrus Algadri mendesak Pemkot Depok untuk membongkar masjid Ahmadiyah di wilayah Sawangan Kota Depok. Alasannya masjid tersebut tidak memiliki izin. "FPI minta bangunannya dibongkar kalau tidak ada izin dan disalahgunakan. Saya sudah koordinasi dengan DPC FPI Sawangan dan Bojong Sari terkait kasus ini," beber Ketua FPI Depok, Idrus Algadri. Alasan lain, warga Ahmadiyah Sawangan merusak segel yang telah dipasang sebelumnya. FPI mendesak agar aparat keamanan segera bertindak karena ia nilai sudah melanggar undang-undang. | Depok      | Jawa Barat | Januari | Pembatasan/pelarangan/penyebaran rumah ibadah         | Non-negara | FPI Depok                    | JAI Depok          |
| 9 | Pemaksaan Penghentian Kegiatan JAI              | Pada 14 Januari 2015, MUI bersama sejumlah Ormas Islam di Sukabumi meminta Pimpinan JAI Kabupaten Sukabumi untuk menghentikan aktifitas keagamaan di Sukabumi. Alasannya karena aktifitas JAI di Sukabumi mengganggu ketertiban dan keamanan. Permintaan tersebut dilakukan dengan membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani Pimpinan JAI Sukabumi.                                                                                                                                                                                                                                             | Sukabumi   | Jawa Barat | Januari | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan              | Non-negara | MUI dan sejumlah ormas Islam | JAI Sukabumi       |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |         |                                             |            |                                                                          |                                 |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10 | Pemaksaan Penghentian Kegiatan JAI        | Pada 14 Januari 2015, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Sukabumi meminta Pimpinan JAI Kabupaten Sukabumi untuk menghentikan aktifitas keagamaan di Sukabumi. Alasannya karena aktifitas JAI di Sukabumi mengganggu ketertiban dan keamanan. Permintaan tersebut dilakukan dengan membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani Pimpinan JAI Sukabumi.                                                                                                                                                                                  | Sukabumi     | Jawa Barat  | Januari | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan    | Negara     | Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama | JAI Sukabumi                    |
| 11 | Didemo Karena Dianggap Melecehkan Allah   | Pada 19 Januari 2015, sekitar 50 massa yang tergabung dalam Barisan Tatar Bojonagara (Batara) menggeruduk Hotel Zodiak di Jalan Sutami, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka tersinggung dengan logo yang disebut-sebut menggunakan lafaz Allah secara terbalik.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kota Bandung | Jawa Barat  | Januari | Intimidasi dan ancaman                      | Non-negara | Sekelompok massa                                                         | Pengelola Hotel Zodiak          |
| 12 | MUI Minta Pengikut Aliran Sesat Ditangkap | Pada 19 Januari 2015, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain meminta masyarakat melaporkan ke polisi bila menemukan aliran yang mereka anggap sesat. "Kalau ketemu (aliran sesat), lapor polisi saja. Biar ditangkap," tegas Zulkarnaen di Jakarta, Senin (19/1). Menurutnya, saat ini, ada 300 aliran sesat dalam agama Islam yang tersebar di Indonesia. Peringkat pertama ditempati aliran Ahmadiyah. Salah satu aliran sesat dilaporkan tersebar di SMP Proklamasi, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aliran sesat itu yakni Isa Bugis. | Jakarta      | DKI Jakarta | Januari | Ujaran kebencian                            | Non-negara | MUI Pusat                                                                | JAI Aliran Isa Bugis            |
| 13 | Penyebaran Kebencian terhadap Film Hijab  | Pada 19 Januari 2015, seorang penonton menilai, film "Hijab" garapan Hanung yang mengkritisi para pengguna jilbab yang digambarkan sebagai keterpaksaan dan kemunafikan telah melecehkan Islam. "Sungguh bukan film yang patut ditonton, kecuali Anda ingin membuat orang-orang pembenci Islam semakin kaya raya," tulis seorang penonton yang disiarkan di satu media Islam.                                                                                                                                                                                                      | Jakarta      | DKI Jakarta | Januari | Ujaran kebencian                            | Non-negara | Pengguna media sosial                                                    | Hanung Bramantyo/Sutradara film |
| 14 | Polda Riau Larang Polwan Berjilbab        | Beredar telegram Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan nomor ST/68/1/2015 tertanggal 19 Januari 2015 untuk anggota polisi di jajaran Polda Riau. Telegram tersebut berisi imbauan tentang penundaan penggunaan jilbab bagi Polisi wanita (Polwan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pekanbaru    | Riau        | Januari | Diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara     | Kapolda Riau                                                             | Polisi perempuan di Riau        |
| 15 | Pemkot Bekasi Selidiki Aliran Bunda       | Pada 21 Januari, Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tengah menyelidiki adanya dugaan praktik aliran sesat bernama ajaran Bunda yang meresahkan warga Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan. "Saya sudah utus tim ke alamat orang yang melakukan praktik aliran sesat dan menurut saya memang ada praktik-praktik yang menjurus ke sana," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi Momon Sulaiman di Bekasi                                                                                                                    | Bekasi       | Jawa Barat  | Januari | Penyebaran keyakinan                        | Negara     | Kesbang-pol Bekasi                                                       | Aliran Bunda                    |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |         |                                                       |            |                                  |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 16 | MUI Minta Sekolah yang Ajarkan Aliran Isa Bugis Dibubarkan     | Pada 23 Januari 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor meminta Dinas Pendidikan harus melarang SMP Proklamasi yang mengajarkan aliran Isa Bugis. Menurut Dewan Penasehan MUI Kabupaten Bogor, KH Khoirul Yunus memberikan beberapa saran kepada pemerintah terkait aliran Isa Bugis. Pemerintah harus mengesahkan untuk menutup dan membubarkan SMP Proklamasi. Sebab jika tidak dibubarkan maka akan banyak anak muda harapan bangsa serta orang tua yang mengingkari sunnah, akibat terkontaminasi akidah aliran Isa Bugis.                                           | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Januari | Pembatasan/pelarangan/penyebaran agama atau keyakinan | Non-negara | MUI Kabupaten Bogor              | Aliran Isa Bugis                    |
| 17 | MPU Fatwa Sesat Gafatar di Aceh                                | Pada 26 Januari 2015, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa bahwa organisasi Gafatar Aceh beraliran sesat. Fatwa MPU menegaskan bahwa ajaran, pikiran, dan keyakinan organisasi ini sesat dan menyesatkan. Fatwa ini dikeluarkan setelah melakukan rapat paripurna pada 21-22 Januari 2015. Sidang paripurna ini dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan MPU, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali mengimbau seluruh anggota Gafatar untuk bertaubat dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. | Banda Aceh      | Aceh       | Januari | Penyebaran keyakinan                                  | Negara     | MPU Aceh                         | Gafatar Aceh                        |
| 18 | Polisi Aceh Tahan Pengikut Gafatar                             | Pada 28 Januari 2015, Polisi menahan enam pengurus ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh yang telah difatwa sesat oleh ulama setempat. Mereka disangka melakukan penistaan agama. "Sekarang lagi kami proses penyidikannya, nanti ditunggu saja hasilnya," kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Zulkifli                                                                                                                                                                                                                                                                        | Banda Aceh      | Aceh       | Januari | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan          | Negara     | Kepolisian Banda Aceh            | 6 orang pengikut Gafatar Banda Aceh |
| 19 | Pemerintah Banda Aceh Cabut Status Warga Pasangan Suami-Isteri | RS (41) dan istrinya WM (40) yang tertangkap tangan membagi-bagikan buku ajaran Kristen di kompleks Taman Rusa, Lamtanjong, Aceh Besar, terhitung 28 Januari 2015 tidak lagi merupakan warga Kota Banda Aceh. Mereka akan pindah domisili ke daerah asalnya, Desa Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Sekretaris Kecamatan Kuta Alam, Reza Kamilin SSTP dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh                                                                                                                              | Banda Aceh      | Aceh       | Januari | Pengusiran                                            | Negara     | Camat Kota Alam                  | Dua orang pasangan suami istri      |
|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |         | Pengusiran                                            | Negara     | Kepala Dinas Dukcapil Banda Aceh |                                     |



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |         |                                               |            |                             |                                |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 20 | Kantor Gafatar Halmahera Barat Diobrak-abrik Massa    | Pada 29 Januari, Kantor Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Halmahera Barat (Halbar) di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, diobrak-abrik masyarakat. Perusakan ini menyusul fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI setempat. Pengurus mengklaim sejumlah barang di dalam kantor, termasuk satu unit laptop, dirusak warga. Surat-surat penting juga diambil. Setelah kejadian itu, pengurus memilih meninggalkan Halbar dan sementara waktu berkantor di Sofifi (Ibu Kota Maluku Utara) untuk mengamankan diri. "Sekretariat kami telah diacak-acak oleh masyarakat. Kejadian itu akibat dari fatwa sesat MUI Halbar dan melarang kami beraktivitas karena atas fitnah dari Kepala Kesbangpol bahwa kami (Gafatar) menganut paham Mila Abraham," kata Ketua DPK Gafatar Halbar, M Kharir. | Halmahera Barat | Maluku Utara | Januari | Serangan fisik/ perusakan properti            | Non-negara | Sekelompok massa            | Kantor Gafatar Halmahera Barat |
| 21 | Kesbangpol Halmabar Sesatkan Gafatar                  | Pada 29 Januari 2015, Kepala Kesbangpol dan Limnas, M Syarif Ali, mengungkapkan, paham Millah Abraham yang dianut para pengurus Gafatar sudah dinyatakan sesat. Dengan demikian segala aktivitas yang digelar pengurus Gafatar pun menjadi ilegal. Semula Pemkab berencana menggelar dialog antara pengurus Gafatar dan MUI bersama ormas Islam. Namun urung dilaksanakan karena dikhawatirkan akan melahirkan konflik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Halmahera Barat | Maluku Utara | Januari | Penye-satan keyakinan                         | Negara     | Kepala Kes-bangpol Halmabar | Aliran Gafatar Halmahera Barat |
| 22 | MUI Fatwa Sesat Aliran Isa Bugis                      | Pada 29 Januari 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjatuhkan fatwa sesat atas aliran Isa Bugis. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Tengku Zulkarnain, aliran Isa Bugis telah memenuhi 10 kriteria ajaran sesat. Salah satu poinnya, ialah aliran Isa Bugis terbukti melawan rukun iman dan rukun Islam. "Ya mereka sebagai pengikut aliran Isa Bugis sudah masuk 10 kriteria sesat MUI. Mereka melawan Alquran dan hadis, juga rukun iman dan rukun Islam," ujar KH Tengku Zulkarnain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jakarta         | DKI Jakarta  | Januari | Penye-satan keyakinan                         | Non-negara | MUI                         | Aliran Isa Bugis               |
| 23 | Ormas Islam Minta Terduga Pelaku Kristenisasi Dihukum | Setelah kecaman mengalir untuk RS (41) dan WM (40), pasangan suami istri (pasutri) yang tertangkap tangan menyebarkan buku Kristen di Taman Rusa, Aceh Besar, dan kemudian ditahan polisi, kini sejumlah ormas Islam juga meminta pasutri tersebut diberi hukuman setimpal karena perbuatannya itu. Hal itu disampaikan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam rapat jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forko-pimda) bersama ormas Islam di Aula Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh pada 29 Januari 2015                                                                                                                                                                                                                                             | Aceh Besar      | Aceh         | Januari | Krimi-nalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Non-negara | FPI Aceh Besar HUDA         | Dua orang pasangan suami istri |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |          |                                              |            |                                    |                                |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 24 | Larangan Misa Karena Lokasi Berdekatan Dengan Masjid | Pada 01 Februari 2015, sebuah kegiatan ibadah misa di rumah (Alm) Ibu Sri Muryati di Kadipaten Wetan (Lingkungan st. Columbanus Kadipaten wetan, Wilayah kadipaten, paroki Pugeran Yogyakarta dilarang oleh sebagian warga sekitar dengan alasan lokasi misa berdekatan dengan masjid. Misa peringatan 1 tahun meninggalnya salah satu umat Katolik tersebut memang berada persis di depan masjid. Ada komplain dari warga yang keberatan bila misa dilakukan di depan masjid. Diduga tidak hanya warga sekitar yang menyatakan keberatan, karena ketika aksi penolakan terjadi, ada 10 motor parkir di masjid tersebut. Diduga pemilik motor adalah warga yang datang dari luar Pugeran. | Yogyakarta  | Yogyakarta  | Februari | Pembatasan/pelarangan ibadah                 | Non-negara | Sekelompok massa                   | Paroki Pugeran Yogyakarta      |
| 25 | Pemkot Bekasi Relokasi Jemaat Gereja ke Kuburan      | Seluruh jemaat tiga gereja di Kelurahan Perwira RT 003/24, Bekasi Utara, Kota Bekasi yang dipaksa oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melaksanakan peribadatan rutinnya di sebidang tanah berukuran 6 x 8 meter di dalam areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Perwira, Kota Bekasi pada 01 Februari 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kota Bekasi | Jawa Barat  | Februari | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan     | Negara     | Pemkot Bekasi                      | HKBP                           |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |          | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan     | Negara     | Pemkot Bekasi                      | Gereja Pentakosta GKRI         |
| 26 | WH Aceh Tahan Pasangan Suami Istri                   | Pada 03 Februari 2015, pasangan suami istri (pasutri) penyebar buku yang berisi ajaran Yehuwa Kristen, RS dan WM, hingga ditahan di ruang tahanan kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Banda Aceh  | Aceh        | Februari | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara     | WH Aceh                            | Dua orang pasangan suami istri |
| 27 | ANNAS Nyatakan Syiah Bukan Islam                     | Pada 04 Februari 2015, anggota Dewan Syuro Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Abu Jibril mengatakan bahwa Syiah bukan Islam karena mereka (Syiah) menganggap diri mereka sebagai kelompok minoritas. Padahal menurut Abu Jibril Islam di Indonesia itu mayoritas dan mereka yang mengaku umat Islam tidak bisa mengklaim diri sebagai minoritas, karena bertentangan dengan fakta yang ada. Abu Jibril juga mensinyalir bahwa syahadat orang Syiah berbeda dengan umat Islam pada umumnya.                                                                                                                                                                                               | Jakarta     | DKI Jakarta | Februari | Ujaran kebencian                             | Non-negara | Abu Jibril                         | Umat Syiah                     |
| 28 | Pembimas Kristen Kecam Isu Kristenisasi di Aceh      | Pada 05 Februari 2015, Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen Kanwil Kemenag Aceh, Samarel Telaumbanua, juga ikut mengecam. Pihaknya sangat menyayangkan pengiriman buku-buku tersebut, dan seharusnya tidak terjadi di Aceh. "Aceh adalah provinsi yang mayoritas muslim dan kearifan lokalnya sangat tinggi," kata Samarel dalam rapat bersama ormas Islam yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh di aula kantor setempat.                                                                                                                                                                                                      | Banda Aceh  | Aceh        | Februari | Ujaran kebencian                             | Negara     | Pembimas Kristen Kanwil Agama Aceh | dua orang pasangan suami istri |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |          |                                                       |            |                                  |                         |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 29 | Dituduh Sesat, SMP-SMA Ditutup                    | Pada 06 Februari 2015, Dinas pendidikan Kabupaten Bogor, menutup sekolah SMP dan SMA Proklamasi 1945 di Parung, karena diduga kuat mengajarkan aliran sesat, mirip aliran Isa Bugis yang sudah resmi dilarang MUI. Para orang tua murid kini resah, akan nasib anak anaknya, apalagi sebentar lagi akan menghadapi ujian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Februari | Pelarangan aktifitas atas dasar agama                 | Negara     | Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor | SMP SMA Proklamasi      |
| 30 | Warga Minta Sekolah Tinggi Dibubarkan             | Pada 07 Februari 2015, ratusan warga menggelar protes mendesak penutupan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ali bin Abi Tholib di Jalan Sidotopo Kidul 51, Surabaya. Mereka menuding, kampus tersebut mengajarkan aliran agama yang sesat. Selain berorasi, mereka juga membentangkan spanduk ukuran besar yang bertuliskan, "Warga sepakat atas pemberhentian aktivitas STAI Ali bin Abi Tholib". Warga pengunjung rasa juga memblokir Jalan Sidotopo Kidul. Puluhan polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi protes itu. Dalam orasinya, warga mengutuk ajaran-ajaran yang diterapkan oleh pihak STAI Ali bin Abi Thalib. Mereka menilai dakwah dan aliran yang diajarkan STAI tak sesuai keyakinan agama Islam yang dianut warga sekitar. | Surabaya        | Jawa Timur | Februari | Penye-satan keyakinan                                 | Non-negara | Sekelompok massa                 | STAI Ali Bin Abi Thalib |
| 31 | Kongres Umat Islam Indonesia Tak Undang Ahmadiyah | Pada 08 Februari 2015, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin membenarkan bahwa Ahmadiyah dan kelompok Syiah, tidak diundang dalam acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-VI tersebut karena merupakan paham aliran yang sudah jelas sesat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yogyakarta      | Yogyakarta | Februari | Ujaran kebencian                                      | Non-negara | MUI Pusat                        | JAI                     |
| 32 | Kongres Umat Islam Indonesia Tak Undang Syiah     | Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) keenam pada Ahad malam (08/02/2015) dibuka di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Dalam acara kongres tersebut perwakilan dari Syiah dan Ahmadiyah tidak diundang dengan beragam alasan. Menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain, KUII ke-VI memang tidak mengundang Syiah karena dinilai bukan bagian dari Islam. "Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) tidak diundang dalam Kongres Umat Islam. Mereka bukan bagian dari Islam," ujar Tengku                                                                                                                                                                                                     | Yogyakarta      | Yogyakarta | Februari | Ujaran kebencian                                      | Non-negara | MUI                              | Umat Syiah              |
| 33 | Camat Kemling Hentikan Kegiatan Ponpes Nurul Ulum | Camat Kemling Thomas Amirico, memerintahkan pimpinan pondok pesantren Imam, untuk menghentikan sementara aktivitas pondok pesantren Nurul Ulum sampai ada keputusan resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandar Lampung. Pasalnya, diduga mengajarkan aliran sesat yang dituduhkan masyarakat sekitar terhadap perkumpulan jamaah ini. "Tadi malam (9/2), kita sudah minta kegiatan untuk disetop untuk mencegah penyebaran isu yang ada di masyarakat," jelas Thomas saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/02/2015).                                                                                                                                                                                                                | Bandar Lampung  | Lampung    | Februari | Pembatasan/pelarangan/penyebaran agama atau keyakinan | Negara     | Camat Kemling                    | Ponpes Nurul Ulum       |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |          |                                                            |            |                                           |                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 34 | MUI Nyatakan Ponpes Nurul Ulum di Kemiling Sesat                   | Pada 10 Februari 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung meminta Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Paham Keagamaan pada Masyarakat (Bakorpaker) Bandar Lampung untuk menutup kegiatan di Pesantren Nurul Ulum pimpinan Adi Suhandoyo yang dianggap sesat di Kemiling. "Gak benar, itu sesat. Saya sudah berikan penjelasan supaya untuk pengamanan diserahkan pada Bakorpaker yang anggotanya dari Polres, TNI, Kemenag, Kesbang, MUI, Dinas kesehatan dan FKUB. Aliran keagamaan kalau meresahkan masyarakat, Bakorpaker berhak menutup dan melarang kegiatan itu," tegas Ketua MUI Lampung Mawardi AS | Bandar Lampung  | Lampung          | Februari | Penye-<br>satan<br>keyakinan                               | Non-negara | MUI<br>Bandar<br>Lampung                  | Pesantren<br>Nurul Ulum                    |
| 35 | Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Tolak Nyanyikan "Indonesia Raya" | Pada 11 Februari 2015, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, Irfan S Awwas menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya saat penutupan Kongres, Irfan tampak tetap duduk, sementara seluruh peserta berdiri saat menyanyikan Lagu Kebangsaan 'Indonesia Raya'. Irfan mengatakan tak ada satu pun aturan yang mengharuskan seseorang harus berdiri saat menyanyikan lagu kebangsaan. Berdiri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah sikap yang dibuat-buat. "Tak ada undang-undangnya." Irfan justru balik menuding mereka yang berdiri menyanyikan Indonesia Raya sebagai pengkhianat.                                          | Yogyakarta      | Yogya-<br>karta  | Februari | Ujaran<br>kebencian                                        | Non-negara | Ketua MMI                                 | Simbol<br>negara                           |
| 36 | Kekerasan di Komplek Bukit Az Zikra Bogor                          | Pada 12 Februari 2015, gara-gara pemasangan spanduk tersebut, kompleks Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor didatangi puluhan orang tidak dikenal. Kedatangan mereka disinyalir karena masalah spanduk penolakan paham Syiah tersebut. Puluhan orang tersebut kemudian terlibat pemukulan terhadap petugas keamanan kompleks Az Zikra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kabupaten Bogor | Jawa Barat       | Februari | Serangan<br>fisik/<br>perusakan<br>properti                | Non-negara | Sekelom-<br>pok massa                     | Petugas<br>keamanan<br>Komplek Az<br>Zikra |
| 37 | Pengadilan Negeri Medan Gelar Sidang Penistaan Agama               | Pengadilan Negeri (PN) Medan kembali menggelar sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Syekh Muda Ahmad Arifin, Selasa (12/02/2015), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Syekh Muda Ahmad Arifin disidang dengan tuduhan melakukan penistaan agama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kota Medan      | Sumatra<br>Utara | Februari | Krimi-<br>nalisasi<br>atas dasar<br>agama dan<br>keyakinan | Negara     | Pengadilan<br>Negeri<br>Medan             | Syekh Muda<br>Ahmad<br>Arifin              |
| 38 | Spanduk Anti Syiah di Sentul Bogor                                 | Pada 12 Februari, sebagian warga perumahan Bukit Az Zikra Sentul Bogor Jawa Barat memasang spanduk penolakan paham syiah di komplek tersebut. Spanduk tersebut berbunyi "Kami Warga Pemukiman Muslim Bukit Az zikra Sentul Menolak Paham Syiah" dan di bagian bawah spanduk tertulis "Pengurus RW/RW Bukit Az Zikra Sentul". Salah seorang petugas keamanan Az-Zikra, Abdullah, menyatakan, spanduk itu sebelumnya dipasang oleh Kasni. Kasni merupakan pengurus RT Kampung Al - Ikhlas 3. "Spanduk itu panjangnya sekitar empat meter dan lebarnya satu meter," kata Abdullah                                               | Kabupaten Bogor | Jawa Barat       | Februari | Ujaran<br>kebencian                                        | Non-negara | Warga<br>Peruma-<br>han Bukit<br>Az Zikra | Umat Syiah                                 |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |          |                                                         |            |                                                                  |                          |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 39 | Dituduh Sesat, Ponpes Di Cirebon Digeruduk Warga         | Sekelompok orang yang mengaku dari Ormas GAPAS di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mendatangi Pondok Pesantren yang diduga mengajarkan aliran sesat dan penipuan dengan menjual benda yang disebut pusaka atau jimat, Minggu (15/02/2015). Pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Nurul Quran, di Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Mereka membentangkan beberapa kertas karton, yang berisi tuduhan, Pondok Pesantren malah mengajarkan aliran sesat, dan menyimpang dari ajaran Islam.                                                                                 | Cirebon       | Jawa Barat  | Februari | Serangan fisik/ perusakan properti                      | Non-negara | GAPAS                                                            | Pesantren Nurul Quran    |
| 40 | Kemenag Jombang Desak Stiker Shalat Tiga Waktu Ditarik   | Pada 17 Februari 2015, kementerian Agama (Kemenag) Jombang mendesak Ponpes UW (Pondok Pesantren Urwatu Wutsqo) segera menarik stiker salat tiga waktu yang beredar di masyarakat. Kemenag khawatir imbauan tersebut menjadi salah paham di masyarakat awam. Selain itu, Kemenag juga akan melakukan koordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) setempat guna menyikapi persoalan itu. "Stiker himbauan salat tiga waktu itu bisa menjadikan masyarakat salah paham. Makanya kami meminta agar Ponpes UW segera menarik stiker tersebut dari peredaran," ujar Kepala Kemenag Jombang, H Barozi, | Jombang       | Jawa Timur  | Februari | Pembatasan/ pelarangan/ penyebaran agama atau keyakinan | Negara     | Kantor Kemenag Jombang                                           | Pesantren Urwatul Wustqo |
| 41 | Spanduk Anti Syiah di Jogja                              | pada 19 Februari 2015, beberapa spanduk yang mengkampanyekan anti Syiah dipasang di beberapa tempat di Yogyakarta. Di antara spanduk tersebut bertuliskan "Syiah bukan Islam, Syiah mengancam Aqidah dan Stabilitas Bangsa". Spanduk dengan panjang kurang lebih 5 meter misalnya terlihat terpasang di depan Masjid Gedhe Kauman (Masjid Agung Kraton Kasultanan Yogyakarta). Spanduk lain juga terlihat terpasang di perempatan Ngipik, perempatan Wojo, perempatan Kasihan dan perempatan Wirosaban.                                                                                             | Yogyakarta    | Yogyakarta  | Februari | Ujaran kebencian                                        | Non-negara | Sekelompok massa                                                 | Umat Syiah               |
| 42 | Gus Nuril Diminta Turun Saat Ceramah tentang Kebhinekaan | KH Nuril Arifin yang biasa disapa Gus Nuril Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Jakarta yang juga anggota Dewan Khos PSNU Pagar Nusa mengalami "pengusiran" yang dilakukan Habib Ali bin Husein Assegaf Pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Habib pada Jumat malam (20/02/2015) saat sedang menyampaikan ceramah Maulid Nabi Muhammad saw di masjid Assu'ada Jatinegara Kaum, Jakarta Timur.                                                                                                                                                                                                           | Jakarta Timur | DKI Jakarta | Februari | Intimidasi dan ancaman                                  | Non-negara | Habib Ali bin Husein Assegaf Pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Habib | Gus Nuril                |
| 43 | Santi di Sidoarjo Tolak Patung Jayandaru                 | Puluhan massa di Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa di alun-alun Sidoarjo, Jumat (20/02/2015), menolak berdirinya patung Jayandaru di alun-alun Sidoarjo. Aksi itu dilakukan dengan menggelar spanduk, memanjat patung, dan menutupi kepala patung dengan kantong plastik. Serta memasang spanduk di sekitar area patung bertuliskan "patung harus diturunkan, Sidoarjo kota santri tak pantas dikotori patung".                                                                                                                                                                                    | Sidoarjo      | Jawa Timur  | Februari | Ujaran kebencian                                        | Non-negara | Puluhan santri                                                   | Patung                   |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |          |                                              |        |                         |                           |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|
| 44 | Walikota Bandar Lampung Larang Aktifitas Yayasan Nurul Ulum | Pada 23 Februari 2015, menyikapi sikap Yayasan Nurul Ulum yang tetap beraktifitas, Walikota Bandarlampung Herman HN menyatakan geram, dia meminta agar yayasan tersebut ditutup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bandar Lampung | Lampung     | Februari | Pelarangan aktifitas atas dasar agama        | Negara | Walikota Bandar Lampung | Pesantren Nurul Ulum      |
| 45 | Menteri Agama Ajukan Definisi Agama                         | Pada 26 Februari 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menyatakan Kementerian Agama tengah merumuskan persyaratan sebuah agama bisa diakui negara sebagaimana yang telah diterima oleh Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Menuutnya, syarat tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam materi Rancangan Undang Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) yang sedang digodog Kemenag.                                                                                                                                                             | Jakarta        | DKI Jakarta | Februari | Diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan  | Negara | Menteri Agama           | Agama yang tidak diakui   |
| 46 | Kriminalisasi 6 Pengikut Gafatar Aceh                       | Kepolisian Banda Aceh telah merampungkan berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka enam pengurus ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh. Berkas itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh, untuk didakwakan ke pengadilan. "Berkasnya sudah kami limpahkan ke kejaksaan, sekarang sudah di jaksa kami harap jangan dikembalikan lagi," kata Kasat Reskrim Polres Kota Banda Aceh, Kopol Supriadi kepada media, Sabtu (28/02/2015).                                                                                                             | Banda Aceh     | Aceh        | Februari | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara | Kepolisian Banda Aceh   | Enam anggota Gafatar Aceh |
| 47 | Pemcam KemlingTutup Yayasan Nurul Ulum                      | Pada Selasa (03/03/2015), aparat Kecamatan Kemiling, Polisi Subsektor dan Kodim setempat, serta warga mendatangi yayasan yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro Gang Melati II, Sumberejo. Mereka memasang plang penyegelangan di depan gerbang yayasan. "Mulai sekarang, semua aktivitas pengajian Yayasan Nurul Ulum tidak boleh dilakukan lagi," kata Camat Kemiling Thomas Amirico usai memasang plang berukuran sekitar 1 meter persergi berwarna putih bertuliskan: "Ditutup dan Dihentikan, Segala Aktivitas Pondok Pesantren Nurul Ulum".                         | Bandar Lampung | Lampung     | Maret    | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan     | Negara | Camat Kemling           | Pesantren Nurul Ulum      |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |          | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan     | Negara | Polisi Subsektor        |                           |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |          | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan     | Negara | Kodim                   |                           |
| 48 | Non-Muhrim di Aceh Utara Dilarang Berboncengan              | Pada 06 Maret 2015, Badan Legislati (Banleg) DPRK Aceh Utara telah menerima kembali hasil revisi provinsi terhadap Rancangan Qanun (Raqa) tentang Kemaslahatan dan Ketertiban Umum di kabupaten itu. Salah satu isinya mengatur tentang larangan berboncengan naik sepeda motor bagi pria dan wanita yang bukan muhrim dalam wilayah hukum Aceh Utara. Kecuali dalam keadaan darurat. Di dalam raqa tersebut pemilik/penyewa toko juga dilarang memajang di tokonya manekin (patung fiber untuk memajang pakaian) yang dapat membangkitkan berahi orang yang memandangnya. | Aceh Utara     | Aceh        | Maret    | Diskriminasi atas dasar agama                | Negara | DPRK Aceh Utara         | Warga Non Muhrim          |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |       |                                              |            |                    |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|----------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| 49 | Pelajar di Banda Aceh Demo Tolak Aliran Sesat                | Pada 06 Maret 2015, ratusan pelajar di Banda Aceh menggelar aksi damai di Mapolresta Banda Aceh, Kejari dan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Mereka mendesak para penegak hukum segera mengirim para penyebar aliran sesat ke meja hijau. Para pelajar yang mengenakan seragam lengkap itu, awalnya menggelar aksi di depan Mapolresta Banda Aceh. Mereka berorasi secara bergantian dengan menggunakan pengeras suara.                                                                                                                                | Banda Aceh     | Aceh        | Maret | Ujaran kebencian                             | Non-negara | Sekelompok pelajar | Aliran terduga sesat        |
| 50 | Pemkab Pidie Bentuk Tim Pakem untuk Atasi Aliran Sesat       | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie telah membentuk tim Penanggulangan Keamanan Aliran Kemasyarakatan (Pakem) dari berbagai unsur guna mengatasi masuknya aliran sesat serta pendangkalan aqidah umat. Bupati Pidie, Sarjani Abdullah bersama Wakil Bupati M Iriawan SE kepada Serambinews.com, Jumat (06/03/2015) mengatakan, munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pidie Development Ekonomi Kemanusiaan (PI-Dek) baru-baru ini di tengah masyarakat yang disinyalir kuat untuk merekrut masyarakat dan selanjutnya digiring kepada perpindahan aqidah umat muslim. | Pidie          | Aceh        | Maret | Penye-satan keyakinan                        | Negara     | Pemkab Pidie       | Aliran terduga sesat        |
| 51 | Diduga Rasis, Politikus Partai Gerindra Dilaporkan ke Polisi | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan melaporkan salah satu oknum DPRD DKI Jakarta, lantaran melontarkan umpatan kepada Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat rapat mediasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Polda Metro Jaya, Kemarin (09/03/2015). "Senin, tanggal 9 Maret 2015, kami atas nama masyarakat Indonesia, warga DKI, LBH Pendidikan melaporkan oknum DPRD ke Polda Metro Jaya karena mengeluarkan umpatan," ujar Direktur LBH Pendidikan, Ayat Hadayat                                                                                | Jakarta        | DKI Jakarta | Maret | Ujaran kebencian                             | Negara     | Prabowo            | Ahok                        |
| 52 | Kejari Banda Aceh Tahan Tersangka Kasus Dugaan Aliran Sesat  | Enam tersangka kasus dugaan aliran sesat atau Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), ditahan Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, Senin (09/03/2015), setelah berkas perkara dari Polresta setempat dinyatakan lengkap (P-21). Penyerahan berkas perkara dari Polresta Banda Aceh ke Kejari Banda Aceh berlangsung di ruang Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum), Amriyata. Dari Polresta Banda Aceh, dihadiri langsung oleh Kasiintel, AKP Supriadi dan beberapa stafnya.                                                                                         | Banda Aceh     | Aceh        | Maret | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara     | Kejari Banda Aceh  | Gafatar Aceh                |
| 53 | Jamaah Ponpes Nurul Ulum Dibina MUI Bandar Lampung           | Selepas ajaran Imam Al Ahdi Kar-ramullah difatwa sesat Pada 10 Maret 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bandar Lampung, jamaah Pondok Pesantren Nurul Ulum di Kemiling, dibina para ustaz dari MUI Bandar Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bandar Lampung | Lampung     | Maret | Pemak-saan keyakinan                         | Non-negara | MUI Bandar Lampung | Jamaah Pesantren Nurul Ulum |



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |                              |            |                                                         |                                      |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 54 | Kepala Sekolah di Lamongan Larang Siswa Shalat        | Pada 10 Maret 2015, Samsul Huda, kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri Jubel Lor 1 dan 2 Kecamatan Sugio, Lamongan. Meskipun Muslim, Samsul Huda melarang siswanya melaksanakan shalat di lingkungan sekolah. Akibatnya, puluhan siswa SD Negeri itu pun menggelar demonstrasi layaknya mahasiswa perguruan tinggi. "Kami orang Islam masak gak sholat; Ngaji kok dilarang; sekolah jangan rampas hak ku," tulis siswa dalam spanduknya                                                                                             | Lamongan   | Jawa Timur | Maret | Pembatasan/pelarangan ibadah | Negara     | Kepala SDN Lor 1 dan 2 Kec. Sugio                       | Siswa muslim                         |
| 55 | Penganut Syiah Dirukyt dan Dipaksa Tobat              | Pada 12 Maret 2015, sebanyak 34 penganut Syiah dari Majelis Hubbul Islah di rukyah dan diminta bertobat oleh sekelompok orang karena telah menganut aliran sesat. Penganut ini ditahan di Mapolres Bogor. Kepolisian Bogor memfasilitasi pemaksaan ini dengan memberi izin pelaku untuk masuk ke ruang tahanan sementara keluarga dan Komnas kesulitan mengakses                                                                                                                                                                  | Bogor      | Jawa Barat | Maret | Pemaksaan keyakinan          | Non-negara | Pelaku tidak teridentifikasi                            | Umat Syiah dari Majelis Hubbul Islah |
|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |       | Pemaksaan keyakinan          | Negara     | Kepolisian Bogor                                        | Umat Syiah dari Majelis Hubbul Islah |
| 56 | Libatkan Ulama dalam Tes Keimanan Penerima Beasiswa   | Pada 13 Maret 2015, Koordinator Humas Senat Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Lismijar MA mengatakan, pihaknya sangat mendukung usulan tes keimanan bagi calon penerima beasiswa ke luar negeri (LN) 2015. Karena itu, ia menyarankan perlu melibatkan para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam proses seleksi itu.                                                                                                                                                                                      | Banda Aceh | Aceh       | Maret | Pemaksaan keyakinan          | Non-negara | Koordinator Senat Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar Raniry | Calon mahasiswa luar negeri          |
| 57 | Penerima Beasiswa LN Perlu Tes Keimanan               | Anggota DPR Aceh dari Komisi V DPR Aceh menyarankan agar penerima beasiswa Pemerintah Aceh untuk pendidikan di luar negeri (LN) agar dites keimanan. Saran tersebut disampaikan dalam rapat Komisi V DPRA dengan pengurus Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh, Jumat (13/03/2015). Ketua Komisi V DPRA, Mohd Al Fatah, mengungkapkan bahwa di Aceh ada beberapa mahasiswa yang telah terpengaruh dengan paham atau aliran Islam dan non-Islam dari negara tempatnya belajar.                                    | Banda Aceh | Aceh       | Maret | Pemaksaan keyakinan          | Negara     | Anggota DPR Aceh                                        | Calon mahasiswa luar negeri          |
| 58 | Ajaran Membunuh Kafir di Buku Agama Islam SMA Jombang | Pada 19 Maret 2015, buku Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas XI SMA yang berisi ajaran berbau radikalisme ala Islamic State of Iraqy/Syam (ISIS) beredar di sejumlah sekolah di Jombang. Menyusupnya materi radikal itu tak ayal membuat resah para guru agama serta orang tua murid. Pada halaman 78 buku tersebut disebutkan, jika orang menyembah selain Allah atau nonmuslim boleh dibunuh. Ajaran itu tidak jauh beda dengan yang dipegang oleh jaringan ISIS. Buku tersebut salah satunya ditemukan di SMA Negeri 1 Jombang. | Jombang    | Jawa Timur | Maret | Ujaran kebencian             | Non-negara | Simpatizan ISIS                                         | Non-Muslim                           |



|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |       |                                               |            |                       |                                              |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 59 | Buku Agama Berisi Ajaran Radikal Menyebar di Surabaya    | Pada 20 Maret 2015, munculnya ajaran mirip paham Islamic State Iraq and Syria (ISIS) di buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti di tingkat SMA meluas ke seluruh sekolah di Surabaya. Buku kurikulum 2013 terbitan pemerintah tersebut ternyata bisa diunggah secara bebas. Buku tersebut juga didistribusikan oleh Kemendikbud berupa soft copy.                                                                                                                                                           | Surabaya    | Jawa Timur | Maret | Ujaran kebencian                              | Non-negara | Simpatisan ISIS       | Warga masyarakat anti ISIS                   |
| 60 | FPI Banjar Larang Ahmadiyah Gunakan Masjid               | Pada 20 Maret 2015, Jemaah Ahmadiyah Kota Banjar, Jawa Barat dilarang menggunakan masjid untuk melakukan shalat Jumat berjamaah. Menurut jemaah Ahmadiyah Kota Banjarmasin Agus Abdul Qoyum, pelarangan masjid untuk digunakan beribadah berdasarkan surat peraturan Walikota Banjar yang isinya melarang jemaah Ahmadiyah melakukan shalat berjamaah dan perorangan di masjid. Kata dia, masjid dijaga kepolisian untuk mencegah jemaah Ahmadiyah menggunakan masjid tersebut.                                                       | Banjar      | Jawa Barat | Maret | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Non-negara | FPI Banjar            | JAI Banjar                                   |
| 61 | Terkait Buku Berisi Ajaran Radikal, Guru Mengaku Diteror | Guru SMA Negeri 1 Jombang, Jawa Timur, mendapat teror dari orang tidak dikenal. Ini terkait Buku Pendidikan Agama Islam yang diduga bermuatan paham radikalisme. Wakil Bupati Jombang, Mundijah Wahab, mengatakan guru tersebut sudah melapor ke Pemerintah Kabupaten Jombang atas teror tersebut. "Ya sempat SMS saya," jelas Mundijah kepada KBR, Ahad (22/03/15).                                                                                                                                                                  | Jombang     | Jawa Timur | Maret | Intimidasi dan ancaman                        | Non-negara | Simpatisan ISIS       | Sejumlah guru                                |
| 62 | Masjid Jemaah Ahmadiyah di Tasikmalaya Disegel Satpol PP | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyegele masjid yang belum rampung milik Jemaah Ahmadiyah di Kampung Gadel, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalon-tang, Selasa, 31 Maret 2015. Tempat ibadah disegel karena tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). "Tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai Perda/Perbup Nomor 5 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Imam Ghazali saat ditemui di lokasi penyegehan masjid, Selasa, 31 Maret 2015. | Tasikmalaya | Jawa Barat | Maret | Pembatasan/pelarangan/penyegehan Rumah Ibadah | Negara     | Satpol PP Tasikmalaya | JAI Tasikmalaya                              |
| 63 | Penganut Agama Lokal Ditolak Masuk TNI                   | Diskriminasi dialami seorang pemuda Batak bernama Darman Gerfasius Purba, penganut penghayat Ugomo Batak. Darman sedang mengikuti pembinaan untuk masuk TNI Angkatan Darat di Banda Aceh. Setelah mengikuti pendidikan beberapa hari, ia diberitahu oleh pelatih dari Kodam Iskandar Muda bernama Ricky dan Perwira Ajendam Mayor Cecep, bahwa Darman yang di KTP-nya tidak tercantum agama (kosong) tidak mungkin diterima menjadi tentara. Perwira itu menyebutkan syarat masuk TNI Angkatan Darat harus beragama (07/04/2015)      | Banda Aceh  | Aceh       | April | Diskriminasi atas nama agama dan keyakinan    | Negara     | TNI                   | Calon anggota TNI dari penghayat kepercayaan |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |       |                                             |            |                                   |                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 64 | MUI Malut Minta Gafatar Hentikan Aktivitas                                           | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara (Malut) meminta kepada pengurus dan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Malut untuk menghentikan seluruh kegiatannya di daerah ini. "MUI Malut telah mengeluarkan fatwa bahwa Gafatar adalah organisasi yang sesat dan menyesatkan, oleh karena itu mereka harus menghentikan kegiatannya agar tidak terjadi konflik di masyarakat," kata Ketua MUI Malut Yamin Hadad di Ternate, Selasa (07/04/2015) menanggapi masih beraktivitasnya Gafatar di Malut.                                                                                           | Ternate    | Maluku Utara | April | Penye-satan keyakinan                       | Non-negara | MUI                               | GAFATAR                      |
| 65 | Demi Tiongkok, Polda Jabar akan Larang Ajaran Falun Gong di Indonesia                | Kepolisian Jawa Barat bakal melarang keberadaan ajaran Falun Gong. Hal ini dikatakan oleh Kepala Polisi Jawa Barat Mohammad Iriawan, usai gelar pasukan pengamanan Konferensi Asia Afrika ke 60 di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa (14/04/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bandung    | Jawa Barat   | April | Diskrimi-nasi atas nama agama dan keyakinan | Negara     | Kepolisian                        | Pengikut ajaran Falun Gong   |
| 66 | MUI Kota Serang: Yayasan Luqmanul Hakim Sesat                                        | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang mengeluarkan Fatwa bahwa ajaran Yayasan Luqmanul Hakim (Insan Kamil) di Kompleks Permata Banjar Asri, Cipocok Kota Serang, menyimpang dan sesat. Fatwa tersebut dikeluarkan pada Selasa, 14 April 2015. Sekretaris MUI Kota Serang Amas Tajudin menjelaskan seluruh kegiatan dan ajaran yang dilakukan Yayasan Luqmanul Hakim adalah menyimpang. "Dalam Fatwa MUI Ada sebelas kegiatan dan ajaran yang menyimpang dan ada dua kegiatan dan ajaran yang dinyatakan sesat. Maka sejak hari ini, tiga belas kegiatan tersebut harus dihentikan," tegas Amas. | Serang     | Banten       | April | Penye-satan keyakinan                       | Non-negara | MUI                               | Yayasan Luqmanul Hakim       |
| 67 | Forum Umat Islam Yogya Merasa Keberatan dengan Perayaan Paskah Bersama di Yogyakarta | Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta mendatangi Polda DIY untuk menyampaikan keberatan terkait rencana perayaan paskah bersama di Lapangan Kridosono, Kota Jogja, Kamis (16/04/2015). Sesuai berita yang di terima FUI, dikabarkan ada agenda pemur-tadan pada perayaan paskah dengan tema "Bertobatlah! Kenapa harus binasa?" tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                               | Yogyakarta | Yogya-karta  | April | Pem-batasan/ pelarangan ibadah              | Non-negara | Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta | Umat Kristiani di Yogyakarta |
| 68 | Deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah di Bandung                                     | Perwakilan ulama se-Indonesia berkumpul di kota Bandung, Minggu (20/04/06), dalam acara Deklarasi Anti Syiah yang digelar oleh Aliansi Nasional Anti Syiah, untuk mengupayakan penghapusan keberadaan Syiah di Indonesia. Selain dihadiri oleh para ulama, acara deklarasi ini dihadiri pula oleh ribuan umat Islam dan Organisasi Masyarakat atau ormas Islam dari berbagai daerah di Indonesia.                                                                                                                                                                                                   | Bandung    | Jawa Barat   | April | Ujaran kebencian                            | Non-negara | Aliansi Nasional Anti-Syiah       | Jamaah Syiah                 |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |       |                                             |            |                   |                               |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|---------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| 69 | Wakil Bupati Kutai Timur Nyatakan Guru Bantil Sesat           | Wakil Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyatakan pada 23 April 2015, bahwa Guru Bantil, warga Kampung Rantau Bemban, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, mengajarkan ilmu yang sangat membahayakan akidah masyarakat khususnya umat Islam. Arsiansyah berharap permasalahan Bantil dapat segera teratasi. Jika memang Bantil tidak mau bertobat maka tidak menutup kemungkinan dirinya bisa kembali terjerat pasal penistaan agama dan penipuan, seperti yang telah didakwakan pada dirinya sekarang | Kutai Timur     | Kalimantan Timur  | April | Penye-satan keyakinan                       | Negara     | Wakil Bupati      | Pengikut aliran terduga sesat |
| 70 | Polisi di Kutai Timur Tangkap Guru Bantil                     | Polisi Kutai Timur menangkap pria yang digelar Guru Bantil karena diduga dan didakwa melakukan penistaan agama dan penipuan, Kamis (23/04/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kutai Timur     | Kalimantan Timur  | April | Kriminalisasi atas nama agama dan keyakinan | Negara     | Kepolisian        | Pengikut aliran terduga sesat |
| 71 | Walikota Palangkaraya Nyatakan Ada Aliran Sesat di Wilayahnya | Ketua Komunitas Intelegen Daerah kota sekaligus Wali Kota Palangka Raya, Riban Satia mengatakan, ada indikasi ajaran sesat masuk ke daerah tersebut. "Ada indikasi yang telah sampai pada kita. Saya ketua Kominda, menerima laporan bahwa sebenarnya ada semacam aliran yang melenceng dari ajaran agama Islam masuk ke daerah kita," katanya di Palangka Raya (27/04/2015)                                                                                                                                      | Palangkaraya    | Kalimantan Tengah | April | Ujaran kebencian                            | Negara     | Walikota          | Pengikut aliran terduga sesat |
| 72 | Bupati Seruyan Imbau Warga Waspada Aliran Sesat               | Warga di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah diimbau mewaspadaai masuknya berbagai aliran sesat di wilayahnya masing-masing. "Kita mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadaai penyebaran dan masuknya berbagai aliran-aliran tertentu yang berpotensi membawa kepada kesesatan," kata Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Rabu (29/04/2015)                                                                                                                                                            | Seruyan         | Kalimantan Tengah | April | Ujaran kebencian                            | Negara     | Bupati            | Pengikut aliran terduga sesat |
| 73 | Warga dan Lurah Bukit Duri Jakarta Halangi Ibadah Ahmadiyah   | Musala An-Nur yang diduga sebagai rumah ibadah jemaah Ahmadiyah, di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu, RT 2 RW 3, Tebet, Jakarta Selatan dikosongkan secara paksa oleh warga sekitarnya. Pengosongan rumah ibadah itu berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Warga berkumpul di depan rumah wakaf itu dan berteriak-teriak, meminta jemaah Ahmadiyah agar keluar rumah pada Jumat (12/07/2015)                                                                                                                         | Jakarta Selatan | DKI Jakarta       | April | Pembatasan/pelarangan ibadah                | Negara     | Lurah             | Jemaah Ahmadiyah              |
| 74 | Warga dan Lurah Bukit Duri Jakarta Halangi Ibadah Ahmadiyah   | Musala An-Nur yang diduga sebagai rumah ibadah jemaah Ahmadiyah, di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu, RT 2 RW 3, Tebet, Jakarta Selatan dikosongkan secara paksa oleh warga sekitarnya. Pengosongan rumah ibadah itu berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Warga berkumpul di depan rumah wakaf itu dan berteriak-teriak, meminta jemaah Ahmadiyah agar keluar rumah pada Jumat (12/07/2015)                                                                                                                         | Jakarta Selatan | DKI Jakarta       | April | Pembatasan/pelarangan ibadah                | Non-negara | Warga Masyarakat  | Jemaah Ahmadiyah              |
| 75 | Nistakan Agama, Pengurus Gafatar Aceh Divonis 4 Tahun         | Sebanyak enam pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh divonis masing-masing 3 dan 4 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah dalam kasus penistaan agama oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin, 15 Juni 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Banda Aceh      | Aceh              | Mei   | Kriminalisasi atas nama agama dan keyakinan | Negara     | Pengadilan Negeri | GAFATAR                       |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |     |                                              |            |                                   |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 76 | Mulai SMP Hingga Kuliah Tak Boleh Satu Ruang Pria-Wanita             | Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara, Kamis (30/04/2015) men-sahkan qanun tentang kemaslahatan dan ketertiban umum yang salah satu isinya mengatur pemisahan ruang belajar laki-laki dan perempuan mulai tingkat SMP sederajat hingga bangku kuliah. Pemisahan juga berlaku untuk pengunjung wanita dan pria pada objek-objek wisata.                                         | Aceh Utara    | Aceh        | Mei | Diskrimi-nasi atas nama agama dan keyakinan  | Negara     | DPRD                              | Calon siswa SMP hingga Mahasiswa |
| 77 | MUI Lebak: Aja-ran Balakasuto Sesat                                  | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ka-bupaten Lebak, Banten, menetapkan ajaran Balakasuto yang berkembang di Kecamatan Lebak Gedong sesat dan menyesatkan. "Kami melarang ajaran itu berkembang di Lebak, karena sangat menyesatkan umat," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Lebak KH Baijuri saat dihubungi di Lebak, Senin (18/05/2015).                                         | Lebak         | Banten      | Mei | Penye-satan keyakinan                        | Non-negara | MUI                               | Pengikut ajaran Balakasuto       |
| 78 | Aliansi Aksi Umat Islam Indonesia Demo Tolak Syiah                   | Ratusan massa yang menamakan diri mereka Aliansi Aksi Umat Islam Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Selasa (19/05/2015). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah agar menutup pergerakan ideologi syiah yang dianggap sesat dan sudah mulai marak di masyarakat.                                                                 | Bandung       | Jawa Barat  | Mei | Pelarangan aktifitas atas dasar agama        | Non-negara | Aliansi Aksi Umat Islam Indonesia | Jamaah Syiah                     |
| 79 | Mangkir di Isra Miraj, Pejabat Dipotong Tun-jangan Kinerja           | Gara-gara tidak mengikuti kegiatan Isra Mi'raj yang digelar pada Se-lasa (19/05/2015) malam, sejumlah pejabat eselon II, III dan IV akan dikenakan sanksi. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Jumat, mengatakan, sanksi tersebut berupa penghapusan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk satu bulan yaitu Juni 2015.                                                               | Gorontalo     | Gorontalo   | Mei | Pemak-saan keyakinan                         | Negara     | Gubernur                          | Pejabat Eselon                   |
| 80 | Nistakan Agama, Dosen UI Dilaporkan ke Polisi                        | Dosen UI Ade Armando dipolisikan karena statusnya di Twitter yang mengatakan bahwa Allah bukan orang Arab menanggapi kontroversi langgam Quran dalam bahasa Jawa menyusul pembacaan Quran di Istana Negara dalam peringatan Isra' Mi'raj pada 17 Mei 2015. Laporan ini dilakukan oleh seorang yang bernama Johan pada 23 Mei 2015                                                 | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mei | Kriminal-isasi atas nama agama dan keyakinan | Non-negara | Warga Masyarakat                  | Dosen, akademisi                 |
| 81 | Peradilan Gafatar Kembali Digelar, Pengun-jung Intimidasi Saksi Ahli | Selasa, 26 Mei 2015 Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh kembali menggelar sidang ke-9 perkara dugaan tindak pi-dana penodaan agama oleh Pengurus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Sidang dengan agenda pemeriksaan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) Terdakwa berlangsung rusuh. Pengadilan diduduki oleh ratu-san massa.                                              | Banda Aceh    | Aceh        | Mei | Intimidasi dan anca-man                      | Non-negara | Gabungan Ormas Islam              | Saksi Ahli Gafatar               |
| 82 | Tuntut Adili Ga-fatar, Organisasi Islam Demo PN Banda Aceh           | Seratusan masa dari lintas organisasi Islam mendemo Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa, 26 Mei 2015. Mereka meminta pengadilan menghukum Gafatar seberat-berat-nya. Pendemo itu berasal dari FPI, PGRI, BKPRMI, dan Forum Keuchik. Menurut jadwal, hari ini pengadilan kembali menggelar persidangan kasus aliran sesat organisasi Gafatar dengan menghadirkan saksi ahli. | Banda Aceh    | Aceh        | Mei | Kriminal-isasi atas nama agama dan keyakinan | Non-negara | Gabungan Ormas Islam              | GAFATAR                          |

|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |      |                                             |            |                  |                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|---------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| 83 | Pengurus Gafatar Dituntut 4 Tahun                                         | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuntut enam pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) selama empat tahun penjara pada Jumat (29/05/2015). Mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan penistaan agama dengan mengakui bahwa Mesias atau Ahmad Musadeq sebagai juru selamat atas kondisi peradaban yang sedang hancur ini.                                                                                                                                                                                     | Banda Aceh    | Aceh           | Mei  | Kriminalisasi atas nama agama dan keyakinan | Negara     | Jaksa            | GAFATAR                       |
| 84 | Ketua FPI Ancam Duduki Balai Kota Jika Ahok Tak Diturunkan                | Rizieq mengatakan jika DPRD DKI tidak juga menggelar sidang paripurna untuk menanggapi permintaan mereka menurunkan Ahok lewat penyampaian Hak Menyatakan Pendapat terhadap sang Gubernur, mereka siap menduduki Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuding Ahok membuat kebijakan yang melanggar ajaran agama Islam seperti ide lokalisasi Pekerja Seks Komersial dan membenarkan minuman keras dalam sebuah demonstrasi pada 01 Juni 2015 di depan Gedung Balaikota Jakarta                                                        | Jakarta Pusat | DKI Jakarta    | Juni | Intimidasi dan ancaman                      | Non-negara | FPI              | Gubernur DKI Jakarta          |
| 85 | Jemaat Tarekat di Batubara Diusir Saat Berzikir dan Tempat Ibadah Dirusak | Belasan jamaah Tarekat Naqshabandiyah dipaksa angkat kaki dari Dusun VII, Desa Mekar Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Senin (01/06/2015) sekitar pukul 13.00 WIB. Sementara tempat peribadatan mereka rusak setelah dilempari batu oleh ratusan massa. Masyarakat merasa resah karena mereka tidak bermasyarakat, selain ajaran mereka yang dinilai sesat sebagaimana fatwa MUI                                                                                                                                                 | Batubara      | Sumatera Utara | Juni | Perusakan/pembakaran rumah ibadah           | Non-negara | Warga Masyarakat | Jamaah Tarekat Naqshabandiyah |
| 86 | Kades, FKUB, dan Polisi Ikut Menyesatkan                                  | Kepala Desa Mekar Laras Muhammad Atan, di mana jamaah Tarekat Naqsyabandiah tinggal, mengakui masyarakat sudah lama meresahkan aktivitas ajaran yang ada di tempat itu. "Selama ini masyarakat di sini sudah sangat diresahkan dengan ajaran agama yang sudah difatwakan oleh MUI Batubara itu sesat. Selama ini, kami sudah melarang, tapi mereka membandel dan tetap menjalankan ajarannya. Kami juga sudah membuat surat ke MUI agar menghentikan ajaran itu, dan menghentikan pembangunan rumah ibadah mereka," katanya (02/06/2015) | Batubara      | Sumatera Utara | Juni | Penyesatan keyakinan                        | Non-negara | Kades            | Jamaah Tarekat Naqshabandiyah |
| 87 | Kades, FKUB, dan Polisi Ikut Menyesatkan                                  | Kapolres Batubara AKBP M Agung Suyono SiK, melalui Kapolsek Labuhan Ruku AKP Nasib Manurung, kepada wartawan mengatakan MUI sudah memfatwakan ajaran tarekat Naqsyabandiyah tersebut sesat. "Jadi masyarakat tidak menginginkan mereka di sini. Ajaran ini sudah lama, hari ini masyarakat turun dan karena situasi memanas maka kami turun bersama FKUB, dan semuanya dapat diantisipasi," katanya (02/06/2015)                                                                                                                         | Batubara      | Sumatera Utara | Juni | Penyesatan keyakinan                        | Negara     | Kepolisian       | Jamaah Tarekat Naqshabandiyah |
| 88 | Kades, FKUB, dan Polisi Ikut Menyesatkan                                  | Ketua FKUB Batubara Drs Abdul Rahman MSi, mengatakan, ajaran tarekat Naqsyabandiyah sesat pada 02 Juni 2015. Apalagi sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batubara menyangkut aliran ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Batubara      | Sumatera Utara | Juni | Penyesatan keyakinan                        | Non-negara | FKUB             | Jamaah Tarekat Naqshabandiyah |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |      |                                            |            |                              |                                    |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| 89 | Rutan KPK Batasi Hak Tahanan untuk Beribadah          | Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali membuat surat pada tanggal 05 Juni 2015 perihal penistaan agama Islam. Surat tersebut ditandatangani sepuluh tahanan rutan guntur lainnya. Dalam surat itu menyebutkan, petugas Rumah Tahanan KPK Guntur membatasi tahanan melakukan ibadah. Petugas dinilai bertindak di luar batas dengan menghina keyakinan agama Islam. Selain itu, petugas melakukan pengusiran, penghentian secara paksa saat tahanan berzikir, membaca Alquran dan membaca (surat) Yasin.                         | Jakarta Pusat   | DKI Jakarta    | Juni | Pembatasan/pelarangan ibadah               | Negara     | Sipir Rumah Tahanan KPK      | Narapidana                         |
| 90 | Tempat Ibadah Diduga Aliran Sesat Dirobohkan          | Sebuah gedung yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah kelompok aliran sesat di Desa Mekar Laras, Kecamatan Tanjuntirum, Kabupaten Batubara, dirobohkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kamis (11/06/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Batubara        | Sumatera Utara | Juni | Perusakan/pembakaran rumah ibadah          | Negara     | Satpol PP                    | Pengikut aliran terduga sesat      |
| 91 | Warga Geruduk Rumah Ahmadiyah di Bukit Duri           | Ratusan warga RT 02 RW 08 Kelurahan Bukit Duri bersama dengan anggota Front Pembela Islam (FPI), Jumat 12 Juni 2015, membubarkan aktivitas salah satu rumah yang dijadikan pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah. Rumah tersebut berada di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu No. 13 RT. 02 RW 08 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                               | Jakarta Selatan | DKI Jakarta    | Juni | Pembatasan/pelarangan ibadah               | Non-negara | FPI                          | Jamaah Ahmadiyah                   |
| 92 | Jamaah FPI Kepung Markas Ahmadiyah di Tebet           | Organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) mengepung markas Ahmadiyah di Jalan Bukit Duri Tanjakan RT 02, RW 08, Tanjakan Batu, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (14/06/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jakarta Selatan | DKI Jakarta    | Juni | Pembatasan/pelarangan ibadah               | Non-negara | FPI                          | Gubernur DKI Jakarta               |
| 93 | Gereja Dibakar Orang Tak Dikenal di Puncak Jaya       | Sebuah gedung Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Kampung Mondu, Puncak Jaya, Papua, dilaporkan dibakar orang tak dikenal pada Senin sore, 15 Juni 2015. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puncak Jaya     | Papua          | Juni | Perusakan/pembakaran Rumah Ibadah          | Non-negara | Pelaku tidak teridentifikasi | Jamaah gereja                      |
| 94 | Warga Bantul Tolak Ibadah Dayak Agabag                | Warga RT 02 Sonopakis Kidul, Pedukuhan X, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta menyatakan penolakan terhadap rencana ibadah menyambut mahasiswa baru yang akan diadakan Persekutuan Mahasiswa Dayak Agabag dari Kalimantan Utara (PMDKU) menyusul munculnya surat keberatan yang ditandatangani Ketua RT setempat tertanggal 17 Juni 2015                                                                                                                                                                                 | Bantul          | Yogyakarta     | Juni | Pembatasan/pelarangan ibadah               | Non-negara | Warga Masyarakat             | Persekutuan Mahasiswa Dayak Agabag |
| 95 | Ribuan Warga Ahmadiyah Kuningan Belum Dibuatkan e-KTP | Sedikitnya 2.772 warga Kabupaten Kuningan yang diketahui sebagai Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), belum bisa dibuatkan e-KTP seperti dinyatakan pihak Disdukcapil pada 18 Juni 2016 mengingat fatwa MUI terkait status aliran Ahmadiyah. Kondisi itu kontan membuat masyarakat yang mayoritas berdomisili di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana mengalami kehilangan hak pelayanan dalam memenuhi hajat hidup. Pasaunya, sejak awal tahun 2015, masing-masing warga JAI hanya dibekali surat keterangan dan domisili semata. | Kuningan        | Jawa Barat     | Juni | Diskriminasi atas nama agama dan keyakinan | Negara     | Disdukcapil                  | Jamaah Ahmadiyah                   |

|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |      |                                                    |            |                   |                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| 96  | FPI dan Santri Dayah Paksa Ubah Ritual Tata Cara Khutbah Jumat di Banda Aceh | Sekelompok santri Dayah Jumat siang (19/06/2015) mendatangi Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh untuk meminta sang Khatib memegang tongkat ketika khutbah Jumat. Padahal Khatib tersebut sudah bergelar doktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banda Aceh      | Aceh        | Juni | Intimidasi dan ancaman                             | Non-negara | FPI               | Khatib                           |
| 97  | Ancaman Kelompok FPI Terkait Penyege-<br>lan Masjid Al Furqon                | Anggota FPI yang berasal dari Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Garut, dan Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, telah berkumpul di tempat masing-masing. Massa itu akan menyerang Masjid Al-Furqon jika pemerintah tidak menyetelnya, sebagaimana yang mereka inginkan pada 29 Juni 2015                                                                                                                                                                                                   | Tasikmalaya     | Jawa Barat  | Juni | Intimidasi dan ancaman                             | Non-negara | FPI               | Jamaah Ahmadiyah                 |
| 98  | Satpol PP dan Polisi Kembali Segel Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya           | Upaya jemaat Ahmadiyah untuk kembali menggunakan Masjid Al Furqon di Desa Kersamaju, Tasikmalaya, gagal. Satpol PP dari Kecamatan Cigalentang dan polisi kembali menyegel bangunan masjid, Senin, 29 Juni 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tasikmalaya     | Jawa Barat  | Juni | Pembatasan/pelarangan/penyege-<br>lan rumah ibadah | Negara     | Satpol PP         | Jamaah Ahmadiyah                 |
| 99  | MUI Jambi Ses-<br>atkan Pengajian Ma'rifatullah                              | Yusuf Mu'az selaku sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi pada 02 Juli 2015 mengkonfirmasikan bahwa Majelis pengajian Ma'rifatullah yang di ajarkan oleh Hasbullah adalah sesat. MUI Provinsi mengkonfirmasi bahwa ada poin kesesatan majelis ini pertama meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Quran dan Sunnah), kedua mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan seorang muslim hanya karena bukan kelompok mereka. | Jambi           | Jambi       | Juli | Penye-<br>satan keyakinan                          | Non-negara | MUI Jambi         | Kelompok Pengajian Ma'rifatullah |
| 100 | Ormas Pekat Tolak Ahmadiyah Cantumkan Islam di E-KTP                         | Sekretaris Pekat IB (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu) Kuningan, H Nana Mulyana Latif mengatakan "Kami meminta pemerintah lebih arif dan bijak bahwa dari awal Ahmadiyah yang bukan bagian dari agama Islam, ini adalah kesepakatan umat Islam seluruh dunia dan telah difatwakan oleh MUI," kata dia pada 07 Juli 2015                                                                                                                                                                   | Kuningan        | Jawa Barat  | Juli | Ujaran kebencian                                   | Non-negara | PEKAT IB Kuningan | JAI Kuningan                     |
| 101 | Masjid JAI di Bukit Duri Tebet Disegel Pemkot                                | Sebuah rumah di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu No 13, RT 002/008, Kelurahan Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan disegel. Penyege-<br>lan dilaksanakan pagi ini sekitar pukul 07.40 WIB. "Penyege-<br>lan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan beragama yang kondusif di Kelurahan Bukit Duri dan Kecamatan Tebet," ujar Kasi Humas Mapolsek Tebet, Aiptu Recky Tansil dalam keterangannya, Rabu (08/07/2015).                                                                                        | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Juli | Pembatasan/pelarangan/penyege-<br>lan rumah ibadah | Negara     | Wali Kota Jaksel  | JAI Cabang Tebet Jakarta Selatan |
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |      |                                                    | Negara     | Polsek Tebet      |                                  |
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |      |                                                    | Negara     | Mapolres Jaksel   |                                  |
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |      |                                                    | Negara     | Satpol PP         |                                  |
| 102 | Warga JAI Bukit Duri Dilarang Ibadah di Masjid yang Telah Disegel Pemkot     | Sejumlah warga Bukit Duri mengu-<br>sir jemaat Ahmadiyah yang semula akan melakukan salat Jumat di Masjid An-Nur, tempat ibadah mereka di Tan-<br>jakan Batu, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/07/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Juli | Pembatasan/pelarangan/penyege-<br>lan rumah ibadah | Non-negara | Masyarakat        | JAI Cabang Tebet Jakarta Selatan |



|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |      |                                                |            |                                                                                                                                          |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 103 | Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Tanjung Senang Bandar Lampung Dilarang Kembali ke Gereja                       | Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) di kota Bandar Lampung , kecamatan Tanjung Senang dilarang beribadah. Sudah 1 tahun lamanya, kami harus pindah dari gereja dan beribadah di rumah karena masalah tersebut. Karena tidak ada penyelesaian yang baik dari pemerintah maka jemaat GPI memutuskan ingin kembali ke gereja. Hari Minggu, 12 Juli 2015, pukul 10.00 WIB, Jemaat GPI Tanjung Senang bergegas menuju gereja, namun jalan menuju gereja, dihadang dengan tumpukan kayu dan batu oleh massa. Pada akhirnya, kami harus kembali dan tidak bisa beribadah di sana. sebelum kami pulang, kami berdoa. namun saat kami berdoa, polisi pun meniupkan peluitnya dengan sekeras-kerasnya dan menyuruh kami berhenti. | Bandar Lampung | Lampung          | Juli | Pembatasan/ pelarangan ibadah                  | Negara     | Kepolisian Bandar Lampung                                                                                                                | Jemaat GPI Tanjung Senang |
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |      |                                                | Non-negara | Masyarakat                                                                                                                               |                           |
| 104 | Gereja HKI di Samarinda Dirubuhkan oleh Warga Setelah Rapat Bersama Pemerintah Kota Samarinda dan Aparat Keamanan | Bangunan semi permanen gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Perumahan Bukit Temindung Indah, Samarinda, dirubuhkan oleh warga sekitar pada hari Rabu subuh (15/07/2015), setelah sebelumnya disegel dan jalan masuk ke lokasi diportal. Bangunan diruntuhkan dengan memakai gergaji mesin sehingga rata dengan tanah. Pendeta gereja itu, Pdt. Ebsan JT Sumanjuntak S.Th, dalam keterangannya menjawab pertanyaan media (16/07/2015), mengatakan keputusan merubuhkan bangunan tersebut diduga diambil dalam rapat sepihak yang tidak diketahui pihak gereja, yang dihadiri Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Kapolres, Kapolsek, Danramil, Camat, Lurah dan RT setempat. Rapat itu berlangsung pada 14 Juli malam.     | Samarinda      | Kalimantan Timur | Juli | Pembatasan/ pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Non-negara | Masyarakat                                                                                                                               | Jemaat GHKI Samarinda     |
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |      |                                                | Negara     | Sekretaris Kota Samarinda                                                                                                                |                           |
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |      |                                                | Negara     | Kepolisian Samarinda                                                                                                                     |                           |
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |      |                                                | Negara     | Koramil Sungai Pinang                                                                                                                    |                           |
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |      |                                                | Negara     | Camat                                                                                                                                    |                           |
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |      |                                                | Negara     | Lurah Temindung Permai                                                                                                                   |                           |
| 105 | Sebuah Masjid di Tolikara Wamena Diserbui Massa dan Terbakar                                                      | Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar massa menjelang shalat led, sekitar pukul 07 00 WIT, Jumat (17/07/2015). Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan, kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan shalat Idul Fitri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tolikara       | Papua            | Juli | Perusakan/pembakaran rumah ibadah              | Non-negara | Jemaat GIDI Tolikara                                                                                                                     | Umat Islam Tolikara       |
| 106 | Camat Lebak Gedong, Banten Meminta Anggota Balakasuto Tidak Kembali Lagi ke Aliran Sesat                          | Sebanyak 14 jamaah ajaran Balakasuto di Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten kembali masuk agama Islam. "Semua jamaah Balakasuto itu sudah kembali menganut Islam," kata Camat Lebak Gedong Vidya Indra di Lebak, Jumat (17/07/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lebak          | Banten           | Juli | Pemaksaan keyakinan                            | Negara     | Camat                                                                                                                                    | Kelompok Balakasuto       |
| 107 | Kelompok Islam di Solo Tuntut Penutupan Gereja GIDI Joyotakan                                                     | Sehari setelah tragedi pembubaran paksa dan pembakaran Mushola Baitul Mustaqin di Komplek Koramil saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1436 H di Tolitara Papua, Sabtu sore (18/07/2015) Ratusan Umat Islam Solo mendatangi Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Joyotakan Solo. Umat Islam Solo meminta Pendeta T. Yusrina Sadeke, S.Th menutup dan tidak melakukan kegiatan peribadatan/ kebaktian karena belum mendapat ijin dari Walikota Solo.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Solo           | Jawa Tengah      | Juli | Pembatasan/ pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Non-negara | Laskar Umat Islam Solo (LUIS), JAT, JAS, Majelis Taklim Al Ishlah, Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Satgas MTA, Majelis Mujahidin | GIDI Joyotakan Solo       |



|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |      |                                               |            |                         |                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 108 | GKJ Tlepek Wetan Purworejo Diteror, Pintu Gereja Dibakar                                                                                  | Gereja Kristen Jawa (GKJ) Tlepek Wetan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mendapat teror dari orang tak bertanggung jawab. Kejadian berlangsung Senin (20/07/2015) dini hari, pintu gereja berupaya dibakar, namun tak berhasil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Purworejo               | Jawa Tengah | Juli | Perusakan/pembakaran rumah ibadah             | Non-negara | Orang Tak dikenal       | Jemaat GKJ Tlepek Wetan              |
| 109 | Pembakaran Gereja oleh Orang Tak Dikenal                                                                                                  | Senin (20/07/2015) dinihari kemarin, sebuah gereja yang berada di Bantul, DI Yogyakarta dibakar oleh orang tak dikenal. Gereja Baptis Indonesia Saman yang terletak di Dusun Saman, Bangunharjo, Sewon, Bantul dibakar sekitar pukul 02.45 WIB. Beruntung api tidak melahap seluruh bangunan gereja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bantul                  | Yogyakarta  | Juli | Perusakan/pembakaran rumah ibadah             | Non-negara | Orang tak Dikenal       | Jemaat Gereja Baptis Indonesia Saman |
| 110 | Tim Penanggulangan Aliran Sesat Ben-tukan Bupati Abdya Sebarakan Nama-nama Kelompok Aliran Sesat, Polres Siap Bantu Berantas Aliran Sesat | TIM Penanggulangan Aliran Sesat di Kabupaten Abdya, Aceh, menemukan satu aliran sesat (LDII) serta lima aliran yang terindikasi sesat dan menyebarkan yang beraktivitas di wilayah tersebut. Tim bentukan Bupati Abdya tersebut dan mendesak pemerintah dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian melarang aktivitas ajaran yang meresahkan masyarakat pada Rabu (22/07/2015). Kapolres Abdya, AKBP Hairajadi SH melalui Kasat Reskrim, AKP Misyanto dalam kesempatan yang sama mengaku siap untuk membantu ulama dalam membasmi aliran sesat. Pihaknya akan bertindak sesuai keputusan MPU terkait aliran yang dianggap sesat.                                    | Aceh Barat Daya (Abdya) | Aceh        | Juli | Ujaran kebencian                              | Negara     | Pemkab Abdya            | LDII                                 |
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |      |                                               | Negara     | Polres Abdya            | Kelompok Maimun                      |
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |      |                                               | Negara     | MPU Abdya               | Kelompok Laduni                      |
| 111 | Puluhan Massa Forum Umat Islam Sweeping Gereja                                                                                            | Massa yang tergabung dalam forum umat Islam Kendal, Rabu (22/07/2015) melakukan konvoi mendatangi gereja jemaat kristen Indonesia, gereja kristen Indonesia dan berakhir di gereja Santo Martinus Weleri. Di setiap gereja yang didatangi, massa menggelar orasi dan memberikan surat pernyataan sikap sebagai bentuk keprihatinan dan mengutuk pembakaran tempat ibadah yang terjadi di Tolikara Papua saat perayaan idul fitri.                                                                                                                                                                                                                               | Kendal                  | Jawa Tengah | Juli | Intimidasi dan ancaman                        | Non-negara | Massa FUI Kendal        | Umat Kristen Kendal                  |
| 112 | Pakem Provinsi Bengkulu Terus Awasi Aliran AKI                                                                                            | Setelah MUI Bengkulu menyatakan kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) sesat, Pakem Bengkulu akan terus awasi kelompok tersebut pada Kamis, 23 Juli 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bengkulu                | Bengkulu    | Juli | Pemaksaan keyakinan                           | Negara     | PAKEM Provinsi Bengkulu | Kelompok AKI                         |
| 113 | Pemda DKI Jakarta Minta GKPI Bongkar Gerekanya                                                                                            | Bangunan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jl Catur Tunggal RT 12 RW 01, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, akhirnya dibongkar secara sukarela oleh para jemaat dan segenap pengurusnya karena memang tidak memiliki izin untuk dijadikan sebagai rumah ibadah pada Jumat (24/07/2015). Meski telah dibongkar karena tidak memiliki izin, para jemaat dan pengurus gereja tetap akan melakukan kegiatan peribadatan di GKPI Jatinegara tersebut. perwakilan Gereja GKPI Jatinegara, Winter Sugiro mengatakan pihaknya akan segera mengurus Izin agar para jemaat dan pemuka agama dapat menggunakan bangunan tersebut sebagai tempat ibadah. | Jakarta Timur           | DKI Jakarta | Juli | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Negara     | Pemda Jakarta Timur     | GKPI Cipinang Muara                  |

|     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |         |                                               |            |                               |                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 114 | Penyegehan Ruko yang Difungsikan Menjadi Gereja                                              | Tempat usaha yang beralih fungsi menjadi tempat ibadah, sementara ditutup oleh pihak kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Jumat (24/07/2015). Pasalnya, bangunan tersebut tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, keberadaannya juga dikeluhkan oleh warga sekitar perumahan Cimone Permai.                                                                                                                                                                                      | Kota Tangerang | Banten         | Juli    | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Camat                         | Umat Kristen Karawaci                                       |
| 115 | Diduga IMB Palsu, Gereja ALKITAB Indonesia yang Berdiri selama 30 Tahun itu Akhirnya Disegel | Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara (Jakut) membekukan proses rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia di Jalan Jati II RT 02/05, Tanjung Priok. Pasalnya, gereja tersebut diduga menggunakan izin mendirikan bangunan (IMB) palsu selama 30 tahun. "Pihak gereja meyakini jika mereka memiliki IMB dengan nomor 253/IMB/2013. Tapi setelah kami cek, tidak ada nomor itu," ujar Kasudin Tata Kota, Monggur Siahaan di kantor Kelurahan Sungai Bambu, Senin (27/07/2015)                                  | Jakarta Utara  | DKI Jakarta    | Juli    | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Pemda Jakarta Utara           | Gereja Alkitab Indonesia Warakas                            |
| 116 | MUI Batam Masih Selidiki Gafatar                                                             | Ketua MUI Tanjung Pinang di Batam menyatakan bahwa rupanya masih ada agama diduga sesat berkedok organisasi. Penyebaran agama dianggap sesat ini terus ada dan bergonta-ganti cara. "Kita harus menelusuri dulu kasus ini. Di Batam masih ada agama diduga sesat yang terus berkembang. Jika lengah, mereka akan dengan leluasa bergerak bebas. Makanya, kita harus waspada," ungkap Usman Ahmad, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam pada Rabu (29/07/2015).                                   | Batam          | Kepulauan Riau | Juli    | Penyebaran keyakinan                          | Non-negara | MUI Batam                     | Gafatar                                                     |
| 117 | Politisi PKS Minta Gereja GIDI di Tolikara Ditutup                                           | Selain meminta proses hukum tetap berjalan, anggota Komisi III DPR itu meminta pemerintah agar menutup Gereja Injil di Indonesia (GIDI) di Tolikara Papua, sebab lanjut Nasir, terjadinya insiden di Tolikara berakar dari surat edaran badan pekerja GIDI wilayah Tolikara. "Kita minta pemerintah untuk menutup GIDI, sebab mereka menggunakan nama Indonesia tapi mereka tidak mengikuti aturan budaya dan norma yang ada di Indonesia," imbuhs Politisi PKS Nasir Djamil, Jumat (31/07/2015).     | Jakarta Pusat  | DKI Jakarta    | Juli    | Ujaran kebencian                              | Negara     | Politisi PKS Nasir Jamil      | GiDI Tolikara                                               |
| 118 | Perda Diskriminatif di Tolikara                                                              | Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, mengatakan memang ada peraturan daerah (Perda) yang menyatakan hanya kelompok Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang boleh membangun tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara, Papua. Ia menerangkan bahwa perda tersebut sudah disahkan oleh DPRD sejak tahun 2013.                                                                                                                                                                                               | Tolikara       | Papua          | Juli    | Diskriminasi atas dasar agama                 | Negara     | Bupati                        | Umat Beragama non GiDI di Tolikara                          |
|     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |         |                                               | Negara     | DPRD                          |                                                             |
| 119 | Muspika Kecamatan Sakra Timur Minta Keluarga Pemimpin Mbat Lauk Benang Suewat Bertobat       | Terkait keresahan warga terhadap aliran sesat Mbat Lauk Benang Suewat, Kades Gereneng & unsur Muspika Sakra Timur mendatangi rumah Samsul dan satu keluarga Amak L pemimpin kelompok itu di dusun Joet. Kedatangan pihak desa ini, melibatkan sejumlah pihak baik dari unsur pemerintah, tokoh agama dan aparat penegak hukum. "Kita datang sekitar pukul 09.30 WITA, bersama camat, KUA, dan unsur TNI dan Polri. Kita datang untuk silaturahmi," terang Kades Gereneng Budi, Sabtu, 08 Agustus 2015 | Lombok Timur   | NTB            | Agustus | Pemaksaan keyakinan                           | Negara     | Muspika Kecamatan Sakra timur | Keluarga Amak L (Pemimpin Kelompok Mbat Lauk Benang Suewat) |

|     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |         |                                               |            |                              |                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| 120 | Ormas Islam Bekasi Tolak pendirian Gereja Santa Clara                     | Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi, Jawa Barat, menggelar shalat Dzuhur berjamaah di lokasi badan Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Senin siang (10/08/2015). Mereka mengaku diinstruksikan untuk melakukan aksi, menolak pendirian gereja. "Kami diinstruksikan untuk menutup Jalan Ahmad Yani sampai Wali Kota Bekasi merestui tuntutan kami agar pembangunan Gereja Santa Clara dibatalkan," kata koordinator aksi, Ismail Ibrahim di Bekasi, Senin.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bekasi   | Jawa Barat       | Agustus | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Non-negara | Ormas Islam Bekasi           | Jemaat Santa Clara Bekasi |
| 121 | Aparat Kepolisian Banjar Turunkan Bendera Merah Putih di Masjid JAI       | Sebuah masjid milik warga JAI di Banjar, Jawa Barat. Namanya Masjid Istiqamah. Masjid ini sudah empat tahun dinyatakan status quo oleh Pemda Banjar. Bahkan, pada 2014 lalu, mesjid dirusak, genting-genting diturunkan, langit-langit dijebol dan beberapa kaca jendela hancur berantakan diterjang batu. Hingga kini tak seorang pun pelaku diadili. Tetapi sesuai nama masjid itu, Istiqamah yang artinya, "tetap teguh" begitu pula warga JAI Banjar. Ketika Agustusan tiba, yakni pada 12 Agustus 2015 lalu mereka memasang 9 buah bendera Merah Putih di area masjid. Namun, ironisnya, seminggu kemudian aparat kepolisian menurunkan bendera-bendera tersebut. Pihak aparat kepolisian memberikan alasan bahwa hal ini dilakukan karena ada tekanan dari Front Pembela Islam (FPI) Banjar. | Banjar   | Jawa Barat       | Agustus | Pelarangan aktifitas atas dasar agama         | Negara     | Kepolisian Banjar            | JAI Kabupaten Banjar      |
| 122 | Kampanye Komite Pemuda Islam Mengenai Penolakan terhadap JAI, Syiah & PKI | Komite Pemuda Islam (KPI) Sulawesi Selatan menggelar aksi kampanye penolakan keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) di Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur Makassar, Minggu (16/08/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Makassar | Sulawesi Selatan | Agustus | Ujaran kebencian                              | Non-negara | Komite Pemuda Islam Makassar | JAI, Syiah, Eks PKI       |
| 123 | FKUB Bali Waspadai Munculnya Baha'i                                       | Agama Baha'i muncul di Buleleng hingga membuat tokoh-tokoh lintas agama merapatkan barisan dengan menggelar pertemuan bersama Kapolres Buleleng dan Komisi IV DPRD Buleleng untuk menyikapi kemunculan agama yang baru tersebut. Dalam pertemuan yang digelar di Mapolres Buleleng, Rabu (19/08/2015) sejumlah tokoh agama termasuk tokoh adat mengkhawatirkan agama yang muncul tersebut sebagai ajaran sesat, terlebih lagi agama Baha'i yang belum mendapatkan kejelasan itu disebutkan sempalan salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah, dan dianggap sebagai sebuah sekte sesat.                                                                                                                                                                                                    | Buleleng | Bali             | Agustus | Ujaran kebencian                              | Non-negara | FKUB Buleleng                | Penganut Baha'i di Bali   |

|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |            |                                                  |            |                       |                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 124 | Indra Permana Dihakimi Massa Karena diduga Menyebarkan Aliran Sesat                      | Indra Okta Permana (35) alias Raden warga Kampung Cisoka Balaraja, Tangerang dihakimi massa di Kampung Gunungkarang Sukabumi, Jawa Barat. Indra kedatangan meminta salah seorang warga untuk membakar kitab suci Alquran. Raden dianiaya hingga pingsan, beruntung nyawa pemuda pengangguran itu berhasil diselamatkan oleh aparat kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada Selasa, 25/08/2015. Pelaku diancam dengan pasal penistaan agama dan penganiayaan, dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara. "Kita akan kembangkan lagi untuk mencari unsur-unsur lainnya, kita amankan sejumlah barang bukti salah satunya sisa Alquran yang dibakar," Kata Kasatreskrim Polres Sukabumi Kota AKP Sulaeman Salim. | Kota Sukabumi | Jawa Barat   | Agustus    | Serangan fisik/ perusakan properti               | Non-negara | Masyarakat            | Indra Okta Permana                  |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |            | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan     | Negara     | Polres Sukabumi       |                                     |
| 125 | Atas Rekomendasi MUI Ternate, Pemkot Ternate Membatasi Penyebaran Aliran Syiah Jafariyah | Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara akan menerbitkan aliran keagamaan diindikasikan sesat yang dipimpin Nawawi Husni alias Ong, menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Rabu 26/08/2015. Penjabat Wali Kota Ternate, Idrus Assagaf, di Ternate, Rabu, mengatakan, MUI setempat mengeluarkan fatwa bahwa aliran keagamaan yang mengatasnamakan Syiah Jafariyah diindikasikan sesat sehingga perlu ditertibkan.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ternate       | Maluku Utara | Agustus    | Pembatasan/ pelanggaran ibadah                   | Negara     | Pemkot Ternate        | Kelompok Syiah Jafariyah            |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |            | Penye-satan keyakinan                            | Non-Negara | MUI Maluku Utara      |                                     |
| 126 | Kakanmenag Sukabumi, Waspadai Penyebaran Aliran Sesat                                    | Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukabumi, Hilmy Rivai mengingatkan penyebaran aliran sesat sampai sekarang masih terjadi di tengah masyarakat. Hilmy mensinyalir, masyarakat di beberapa kawasan di Kabupaten Sukabumi masuk ke dalam kelompok rawan akidah yang mudah dipengaruhi oleh aliran sesat. "Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kawasan perkebunan dan pantai merupakan daerah sasaran yang sering didatangi oleh penganut aliran sesat," tegas Hilmy pada Kamis (27/08/2015).                                                                                                                                                                                           | Kab. Sukabumi | Jawa Barat   | Agustus    | Ujaran kebencian                                 | Negara     | Kepala Kantor Kemenag | Kelompok-kelompok yang diduga sesat |
| 127 | AS Disidang Warga Karena Dinilai Menyebarkan Ajaran Sesat                                | AS dipanggil puluhan warga dan tokoh agama di Mushola Al-Barokah, di Kampung Sodong, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Warga yang penasaran dengan tingkah laku AS yang belakangan diduga mulai menyimpang terus mencecar pertanyaan kepada AS yang mengaku Rasul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tangerang     | Banten       | Agustus    | Penye-satan keyakinan                            | Non-Negara | Masyarakat            | AS                                  |
| 128 | GOIB Meminta Pemkot Menindak JAI                                                         | Gabungan Ormas Islam Bersatu (GOIB) Sukabumi menilai Pemkot Sukabumi lemah dalam menghadapi JAI. "kami ingin Pemkot menutup masjid JAI di Sukabumi" Kata Ketua GOIB KH Asep Sirojudin, Selasa (01/09/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kota Sukabumi | Jawa Barat   | Sep-tember | Pembatasan/ pelanggaran/penye-gelan rumah ibadah | Non-negara | GOIB Sukabumi         | JAI Sukabumi                        |

|     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |            |                                       |                                                        |                                                                                                       |                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 129 | Gubernur Aceh Minta Masyarakat Waspada Aliran Sesat                                                                                                                                    | Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk mewaspadaai upaya pendangkalan akidah dan ajaran sesat yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dapat mengganggu kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Zulkifl Ahmad pada pembukaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terkait Kerukunan Umat Beragama dan Penanganan Aliran Sesat Di Aceh Tahun 2015, di Banda Aceh, Kamis (03/09/2015). | Banda Aceh    | Aceh       | Sep-tember | Ujaran kebencian                      | Negara                                                 | Gubernur                                                                                              | Kelompok-kelompok yang diduga sesat                    |
| 130 | MUI Sukabumi Tunda Pengambalian Masjid Bilal Milik JAI                                                                                                                                 | Sebelumnya Jemaah Ahmadiyah Sukabumi menerima surat dari MUI setempat bersama ormas intoleran untuk mengambil alih salat Jumat (11/09/2015). MUI beralih hal itu untuk pembinaan karena ajaran Ahmadiyah dilarang. Menanggapi hal itu, warga Ahmadiyah Sukabumi menolaknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kota Sukabumi | Jawa Barat | Sep-tember | Pembatasan/pelarangan ibadah          | Negara                                                 | MUI kota Sukabumi                                                                                     | JAI Kota Sukabumi                                      |
| 131 | Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rejang Lebong Menyampaikan kepada Para Tokoh agama dan Penyuluh Agama Honorer yang ada di Kecamatan Sindang Dataran agar Waspada terhadap Aliran Sesat | Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan kepada para tokoh agama dan penyuluh agama honorer yang ada di Kecamatan Sindang Dataran agar waspada terhadap aliran sesat pada Senin, 14 September 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rejang Lebong | Bengkulu   | Sep-tember | Ujaran kebencian                      | Negara                                                 | Kepala Kantor Kemenag Rejang Lebong                                                                   | Aliran diduga sesat                                    |
| 132 | MUI Pamekasan Hentikan Praktik Pengobatan Sambil Nyanyi Tombo Ati                                                                                                                      | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan meminta teknik pengobatan hipnoterapi dan bekam oleh Ali Syahbana di rumahnya, Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kamis (20/08/2015). Penghentian praktek tersebut tertuang dalam SKB yang ditandatangani Kakankemenag Pamekasan, Kapolsek Pegantenan, Danramil Pegantenan, ulama dan tokoh masyarakat serta Ali Syahbana selaku terduduh                                                                                                        | Pamekasan     | Jawa Timur | Sep-tember | Pelarangan aktifitas atas dasar agama | Non-negara<br>Non-negara<br>Negara<br>Negara<br>Negara | MUI Pamekasan<br>Tokoh Masyarakat Pamekasan<br>Kantor Kemenag Pamekasan<br>Kapolsek Pegantenan<br>TNI | Praktek pengobatan Alternatif yang diasuh Ali Syahbana |

|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |                |                                                                        |            |                                           |                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 133 | MUI Kabupaten Rokan Hilir Mendapat Laporan bahwa Khalifah Suwardi Mengaku sebagai Imam Mahdi. Laporan Tersebut Diterima MUI dari Mantan Murid Khalifah | Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Rokan Hilir mendapat laporan bahwa Khalifah Suwardi mengaku sebagai Imam Mahdi. Laporan tersebut diterima MUI dari mantan murid khalifah tersebut. Untuk mengklarifikasi kebenaran laporan tersebut, MUI memanggil Khalifah Suwardi yang difasilitasi pihak kecamatan Bangko. Pertemuan berlangsung di ruang Camat Bangko, Selasa, (29/09/15). Hadir Camat Bangko, Juliandra, Ketua MUI Wan Syaiful dan beberapa penghulu. Camat Bangko, Juliandra, S.Sos menyatakan, pihaknya memfasilitasi untuk meluruskan kalau ada yang bengkok, dan akan tetap mengawasi Khalifah Suwardi. Kelanjutannya akan mendiskusikan di Polsek atau Polres, jika ada unsur pidana, akan diserahkan kepada penegak hukum. | Rokan Hilir               | Riau       | September      | Penye-<br>satan<br>keyakinan                                           | Non-negara | MUI Kab.<br>Rokan Hilir                   |                                               |
|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |                | Krimi-<br>nalisasi<br>atas dasar<br>agama dan<br>keyakinan             | Negara     | Camat                                     |                                               |
| 134 | Kakanmenag Kota Bandung Siap Berantas Aliran Sesat                                                                                                     | Mengenai penanganan aliran keagamaan yang sesat, Athoillah menyatakan, jajaran Kemenag bekerja sama dengan polisi, kejaksaan, dan alim ulama dalam menanganinya. "Kewajiban tiap umat Islam untuk memantapkan akidah Muslimin lainnya sehingga mereka tak tergiur untuk masuk ke aliran sesat," katanya pada Rabu (30/09/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kota Band-<br>ung         | Jawa Barat | Sep-<br>tember | Ujaran<br>kebencian                                                    | Negara     | Kakanme-<br>nag Kota<br>Bandung           | Kelompok-<br>kelompok<br>yang diduga<br>sesat |
| 135 | Pemuda Tuntut Penutupan Gereja di Aceh Singkil                                                                                                         | Sekitar dua ratusan pemuda Aceh Singkil yang tergabung dalam Pemuda Peduli Islam berdemonstrasi di halaman kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (06/10/2015). Dalam orasi, Suryadi, Koordinator aksi demonstrasi menyatakan jika Singkil ingin kondusif dan aman, Pemkab Aceh Singkil harus membongkar gereja yang tidak memiliki izin dan menolak izin baru bagi gereja dan undung-undung. Massa mengancam, jika dalam waktu tujuh hari Pemkab tidak memberikan solusi atas tuntutan yang mereka minta, atas nama Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil akan merangkul seluruh lapisan masyarakat dan menyelesaikan masalah itu dengan caranya mereka sendiri.                                                                                      | Kabupaten<br>Aceh Singkil | Aceh       | Oktober        | Pem-<br>batasan/<br>pelaran-<br>gan/pe-<br>nyegelan<br>rumah<br>ibadah | Non-negara | Pemuda<br>Peduli<br>Islam Aceh<br>Singkil | Warga<br>Kristen                              |
| 136 | Ajakan Mem-<br>bongkar Gereja<br>Singkil via SMS                                                                                                       | Jumat (09/10/2015) beredar pesan singkat yang mengajak seluruh umat muslim agar bersatu padu mem-<br>bongkar gereja pada 13 Oktober 2015. Dalam SMS, ada ajakan umat Islam membawa peralatan senjata untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Pendeta Erde Berutu dari Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) sempat menerima pesan singkat tersebut. Pendeta Erde bahkan mengaku sempat menemui Bupati Aceh Singkil, Sapriadi untuk meminta perlindungan, namun tidak mendapatkan respons positif terkait pesan berantai tersebut.                                                                                                                                                                                                      | Kabupaten<br>Aceh Singkil | Aceh       | Oktober        | Ujaran<br>kebencian                                                    | Non-negara | Massa                                     | Warga<br>Kristen                              |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         |                                               |            |                  |                                                   |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|-----------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 137 | Rapat Pembongkaran 10 Gereja di Aceh Singkil | <p>Pada 12 Oktober 2015 di ruang pertemuan Setdakab Aceh Singkil, Pemkab Aceh Singkil memutuskan akan membongkar 10 gereja yang beroperasi tanpa izin di Aceh Singkil. Ini hasil Rapat antara Bupati Aceh Singkil, Anggota Dewan, FKUB, Ormas Islam serta tokoh masyarakat. Di antara kesepakatan tersebut adalah pembongkaran akan digelar Senin (19/10/2015) sampai dua pekan ke depan. Selanjutnya, rumah ibadah yang tidak dibongkar harus mengurus izin dengan tenggat waktu selama enam bulan. Kemudian tokoh ulama diminta menenangkan umat agar tidak terjadi hal tak diinginkan.</p> | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | Oktober | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Negara     | Bupati           | GKPPD Sukamakmur                                  |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Negara     | DPRA             | GKPPD Pertabas                                    |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Non-negara | FKUB             | GKPPD Kuta Tinggi;                                |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Non-negara | Ormas Islam      | GKPPD Tutuhan                                     |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Non-negara | Tokoh Masyarakat | GKPPD Danggunan, Kecamatan Simpang Kanan          |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         |                                               |            |                  | GKPPD Mandumpang                                  |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         |                                               |            |                  | GKPPD Siompin                                     |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         |                                               |            |                  | GMII (Gereja Misi Injili Indonesia) Siompin, Suro |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         |                                               |            |                  | GKPPD Situbuhutuh, Danau Paris                    |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |         |                                               |            |                  | Gereja Katolik Lae Balno, Danau Paris.            |



|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |         |                                               |            |                                  |                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 138 | Bupati Aceh Singkil Keluarkan Surat Perintah Pembongkaran Gereja | Pada Senin (12/10/2015) Bupati Aceh Singkil Safriadi memutuskan untuk membongkar puluhan bangunan Gereja, keputusan tersebut diambil setelah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabuten Aceh Singkil, Forum Komunikasi Umat Beragama, Ulama, dan sejumlah Ormas Islam di Aceh Singkil. Pertemuan tersebut melupakan kelompok gereja sebagai subyek pembicaraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | Oktober | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Bupati                           | Pimpinan/ jemaah gereja tidak berizin                       |
| 139 | Pembakaran Tiga Gereja di Aceh Singkil                           | Gereja HKI dan Gereja Katolik di Gunung Meriah serta satu Gereja GKPPD dirusak dan dibakar, Selasa (13/10/2015). Pelakunya massa dengan identitas ikat kepala putih plus bambu runcing dan senjata tajam. Beberapa sumber menyebut mereka berasal dari Pemuda Pemuda Islam (PPI) Aceh Singkil yang sebelumnya menuntut pembongkaran gereja tidak berizin. Sebelum bergerak ke arah Simpang Kanan massa sudah dihalau aparat keamanan bersenjata lengkap. Namun suasana sulit dikendalikan sehingga pembakaran rumah ibadah tak bisa dihindari. Dalam peristiwa ini seorang dikabarkan tewas, empat luka-luka. Akibat kerusuhan ini 300 kepala keluarga mengungsi ke Provinsi Sumatera Utara                                                                                      | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | Oktober | Perusakan/pembakaran rumah ibadah             | Non-negara | Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil | Warga<br>4 Warga luka-luka                                  |
| 140 | Gereja GPIB Patmos Dibakar Orang Tak Dikenal                     | Gereja GPIB Patmos di Tektok Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, dibakar orang tak dikenal, Jumat (16/10/2015) sekitar pukul 23.00 WIB. Akibat pembakaran tersebut ruangan konsistori gereja hangus. Gereja ini bertetangga dengan rumah Pendeta gereja, Noccon Rumampuk. Akibat kebakaran ini menghancurkan dan merusak beberapa barang seperti mixer sound system dan membakar sebagian jendela dan pintu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kota Sabang            | Aceh | Oktober | Perusakan/pembakaran rumah ibadah             | Non-negara | Pelaku tidak teridentifikasi     | Pengurus GPIB                                               |
| 141 | Pemkab Aceh Singkil Bongkar 3 Gereja di Aceh Singkil             | Sebagai tindak lanjut kesepakatan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membongkar 2 undung-undung (gereja ukuran kecil) dan satu gereja di Kecamatan Suro pada Senin 19 Oktober. Satu gereja dan dua undung-undung tersebut adalah GKPPD Desa Siompin, Undung-undung Katolik Desa Mandumpang, dan Gereja Masehi Indonesia Injil Indonesia (GMII) di Desa Siompin, Suro. Berdasarkan pantauan, pembongkaran dilakukan sekitar pukul 09.30 WIB terhadap Undung-Undung Katolik, yang berlokasi di Desa Mandumpang. Lalu, dilakukan untuk Gereja GKPPD Desa Siompin, kemudian Gereja Masehi Indonesia Injil Indonesia (GMII) di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Aceh Singkil. Pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP Aceh Singkil dengan kawalan lebih dari sekitar 100 polisi dan tentara | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | Oktober | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Kepolisian                       | Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GK-PPD) Desa Siompin |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |         | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | TNI                              | Undung-undung GMII Siompin                                  |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |         | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Satpol PP                        | Undung-undung Katolik Desa Mandumpang                       |



|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                |         |                                               |            |                                                                      |                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 142 | Ormas Adat Sulut Minta Masjid Tak Berijin Ditutup           | Forum Komunikasi Masyarakat Sulawesi Utara Peduli Toleransi (FKMSPT) menggelar aksi solidaritas terkait pembakaran gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Lapangan Sparta Tikala, Manado, senin (19/10/2015). Salah satu tuntutan massa yang berjumlah 250 orang ini meminta pemerintah menutup masjid dan tempat yang tidak memiliki izin; meminta kepada Pemerintah Pusat dan aparat kepolisian mengusut tuntas pembakaran gereja yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Massa juga menuntut masyarakat dan pemerintah tidak melakukan diskriminasi bagi kaum minoritas dan memberi hak yang sama dalam beribadah. | Kota Manado            | Sulawesi Utara | Oktober | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Non-negara | Forum Komunikasi Masyarakat Sulawesi Utara Peduli Toleransi (FKMSPT) | Minoritas muslim                      |
| 143 | Massa Menyerbu Penampungan Imigran Afganistan di Yogyakarta | Ratusan orang menyerbu penampungan 30 imigran asal Afghanistan di Pondok Pemuda, Ambarbinangun, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin malam 19 Oktober 2015. Alasan massa, para imigran menuding imigran menyebarkan paham Syiah. Salah satu buktinya kain panjang berwarna hitam dan ditulisi kalimat berbahasa arab dengan tinta cat putih. Terdapat kalimat arab berisi doa karena ada kata "assalamualaika". Ada juga kata fathimah (putri nabi Muhammad) dan kata "asyura" serta "karbala."                                                                                   | Bantul                 | Yogyakarta     | Oktober | Serangan fisik/perusakan properti             | Non-negara | Massa                                                                | 30 imigran                            |
| 144 | Pemkab Aceh Singkil Kembali Bongkar Dua Gereja              | Setelah membongkar dua undung-undung (gereja), Bupati Aceh Singkil Pemkab Aceh Singkil Syukriadi menginstruksikan pembongkaran dua gereja. Selasa (20/10/2015) GKPPD Kuta Tinggi dan GKPPD Tutuhan. Yang terlibat dalam pembongkaran adalah Satpol PP, dikawal polisi dan tentara. Berlanjut membongkar GKPPD di Desa Tutuhan di kecamatan yang sama. Bupati Aceh Singkil mengatakan penertiban gereja tersebut merupakan kesepakatan sejumlah pihak. Totalnya terdapat 10 gereja yang dibongkar, sisanya, 13 sedang dalam proses.                                                                                     | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh           | Oktober | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Bupati                                                               | Pengurus dan jemaat GKPPD Kuta Tinggi |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                |         | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Satpol PP                                                            | Pengurus dan jemaat GKPPD Tutuhan     |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                |         | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Kepolisian                                                           |                                       |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                |         | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | TNI                                                                  |                                       |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                |         | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan      | Negara     | Walikota                                                             | Syiah Kota Bogor                      |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |                                           |                                           |                         |                                       |                         |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 145 | Pelarangan Asyura di Bogor            | Walikota Bogor Bima Arya mengeluarkan Surat Edaran No 300/321-Kesbangpol tentang Himbauan Pelarangan Perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syiah) Bogor tertanggal 22 Oktober 2015. Isinya terdiri dua hal: melarang kegiatan perayaan yang dilakukan jemaat Syiah di Kota Bogor, melarang jemaat Syiah agar tidak memobilisir masyarakat baik internal, antar desa/kelurahan atau mendatang anggota Syiah dari luar daerah Kota Bogor. Kebijakan ini diambil dengan alasan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan merujuk tiga hal. Pertama, sikap dan respons Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor. Kedua, Surat Pernyataan Ormas Islam di Kota Bogor tentang penolakan segala bentuk kegiatan keagamaan Syiah di wilayah Kota Bogor. Ketiga, hasil rapat Muyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor.                                                                                                                                                                                                                                                             | Kota Bogor   | Jawa Barat | Oktober                                   | Pembatasan/ pelarangan kegiatan keagamaan | Non-negara              | Pembela Ahlus Sunnah (PAS) Jawa Barat | Komunitas Syiah         |
| 146 | Upaya Pelarangan Asyura di Bandung    | Ratusan orang yang menamakan diri Pembela Ahlus Sunnah (PAS) Jawa Barat mendatangi lokasi peringatan Asyuro di Stadion Sidolig Kota Bandung, Jumat malam, (23/10/2015). Atas peristiwa tersebut, sekitar 800 warga Syiah yang sedang berada di dalam stadion itu terpaksa membubarkan diri. Pengunjuk rasa menyayangkan peringatan Asyura digelar di Kota Bandung. Salah seorang mengatakan pihaknya sudah memberi peringatan kepada pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Bandung agar peringatan Asyura tidak digelar di Kota Bandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kota Bandung | Jawa Barat | Oktober                                   | Pembatasan/ pelarangan kegiatan keagamaan | Non-negara              | Pembela Ahlus Sunnah (PAS) Jawa Barat | Komunitas Syiah         |
| 147 | Upaya Pelarangan Asyura Di Yogyakarta | Dua ormas Islam, Forum Umat Islam (FUI) dan Front Jihad Islam (FJI), mendatangi kegiatan diskusi yang digelar Rausyan Fikr di Jalan Kaliurang KM 5,5, Gang Pandega Wreksa Caturtunggal, Depok, Sleman, Jumat, 23 Oktober 2015. FUI datang dengan puluhan massa berkendara sepeda motor dan mengenakan surban. Tak lama, puluhan massa FJI datang. Perwakilan diterima perwakilan polisi bersama Ketua RT 9 RW 4 Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, Gunawan. Tiga orang perwakilan dari FJI kemudian bertemu dengan pengelola Rausyan Fikr. Selain itu ada polisi, Ketua RT 9 RW 4 Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, Gunawan. Komandan laskar FJI, Abdurrahman, mengatakan kedatangan mereka mempertanyakan aktivitas lembaga yang terafiliasi dengan kelompok Syiah tersebut. Menurutnya, kelompok itu sudah dibubarkan karena dianggap sesat dan dilarang beraktivitas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). FJI mendesak agar kelompok Syiah pergi dari Yogyakarta. Dalam pertemuan beberapa orang mengintimidasi komunitas Syiah dengan menunjuk-nunjuk dan mengancam. | Sleman       | Yogyakarta | Oktober                                   | Intimidasi dan ancaman                    | Non-negara              | Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta     | Rausyan Fikr Yogyakarta |
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            | Pembatasan/ pelarangan kegiatan keagamaan | Non-negara                                | Front Jihad Islam (FJI) |                                       |                         |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          |                                               |            |            |                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 148 | Belum Kantongi IMB, Pembangunan Masjid di Manokwari Ditolak Warga                | Ribuan orang dari berbagai denominasi Gereja Kristen Injili di Manokwari, Papua Barat, Kamis (29/10/2015), melakukan demonstrasi di depan kantor bupati. Ribuan orang ini menolak izin pembangunan Masjid Rahmatan Lilalamin di Kompleks Anday, Distrik Manokwari Selatan. Sebab lokasi yang akan dibangun masjid adalah tempat kali pertama agama Kristen masuk ke Papua. Ketegangan mereda, setelah bupati memutuskan untuk menghentikan pembangunan rumah ibadah tersebut. Bupati juga segera mengomunikasikan hal ini bersama umat Muslim di Manokwari.                                                                         | Manokwari         | Papua Barat      | Oktober  | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Non-negara | Massa      | Pengelola/jemaah masjid                           |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Bupati     |                                                   |
| 149 | Penangkapan Delapan Anggota Jemaah Annadzir                                      | Delapan anggota jemaah An-Nadzir di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, diamankan di Markas Kepolisian Resor Gowa, (02/11/2015). Mereka dibawa ke Markas Polres Gowa setelah sebelumnya ditahan di Polres Sabang, Aceh, karena diduga menyebarkan aliran sesat di daerah itu. Kepala Kepolisian Resor Gowa Ajun Komisaris Besar Rio Indra Lesmana mengatakan delapan anggota jemaah An-Nadzir itu diamankan polisi karena berencana pergi ke Palestina. Untuk sampai ke Palestina, jemaah berambut pirang dan memakai cadar itu akan menggunakan perahu kecil. "Mereka diamankan karena mau naik perahu kecil ke Palestina," katanya. | Gowa              | Sulawesi Selatan | November | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan  | Negara     | Kepolisian | Rudi (33)                                         |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          |                                               |            |            | Zaenal (27);                                      |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          |                                               |            |            | Islah (9);                                        |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          |                                               |            |            | Nurhayyun (19)                                    |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          |                                               |            |            | Darwani (43)                                      |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          |                                               |            |            | Quayyum (1)                                       |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          |                                               |            |            | Wawan (15 bulan)                                  |
| 150 | Komunitas Sapta Darma Rembang Mendapat Intimidasi Terkait Penolakan Candi Busono | Dua hari sebelum Sanggar Candi Busono dibakar (Minggu, 08/11/2015), komunitas Sapta Darma Kabupaten Rembang mendapat intimidasi dari pihak yang menolak pembangunan Sanggar. Sebanyak delapan orang tak dikenal mendatangi sanggar sekitar pukul 23.25 WIB. Mereka keluar masuk bangunan. Kejadian itu terekam oleh kamera CCTV yang dipasang pengelola sanggar                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah      | November | Intimidasi dan ancaman                        | Non-negara | Massa      | Pengelola sanggar komunitas penghayat kepercayaan |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |          |                                               |            |            |                                                   |
| 151 | Penolakan dan Perusakan Masjid Syuhada Bitung Sulut                              | Ratusan massa menggeruduk dan merusak Masjid Asy-Syuhada di Kompleks Aer Ujang, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara yang tengah dibangun Senin (09/11/2015). Massa penyerang yang umumnya berpakaian hitam dan sebagian terlihat membawa parang dan kayu beralasan pembangunan masjid belum mendapatkan IMB. Namun Ketua Panitia Masjid As-Syuhada Karmin Mayau mengatakan pihaknya justru sudah mengantongi izin dari Bakesbangpol Kasubdit Kerukunan Umat Beragama Kota Bitung. Proses itu kemudian terhenti karena keluhan belum mengeluarkan IMB.                                            | Kota Bitung       | Sulawesi Utara   | November | Perusakan/pembakaran rumah ibadah             | Non-negara | Massa      | Pengelola/jemaah masjid                           |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |          |                                               |            |                              |                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 152 | Muspida Pustuskan Status Masjid Syuhada Status quo                               | Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bitung Sulut memutuskan tiga hal terkait kerusakan dan pembangunan Masjid Syuhada, Senin (9/11/2015). Pertama, status masjid keadaan status quo dan tidak diperbolehkan melakukan pembangunan atau kegiatan apapun di lokasi tersebut. Kedua, bangunan 4X6 meter berdinding tripleks beratapkan seng dalam lokasi masjid harus dipindah selambat-lambat Selasa (10/11/10 November 2015). Ketiga, izin pendirian Masjid Asy-Syuhada akan disampaikan selambat-lambatnya pertengahan Januari 2016. Pemerintah kelurahan Girian Permai bersama pemuka Agama Kristen dan Islam, tokoh masyarakat, panitia Pembangunan melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan warga masyarakat dibantu pemerintah Kecamatan Girian dan Forkopimda Kota Bitung. | Kota Bitung       | Sulawesi Utara | November | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Negara     | Muspida                      | Pengelola/jemaah masjid                                   |
| 153 | FUI Desa Plawangan Intimidasi Sapta Darma                                        | Puluhan orang dari FUI Desa Plawangan mengintimidasi Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Rembang, Sutrisno. Mereka meminta Sutrisno menghentikan renovasi pembangunan sanggar Candi Busono karena alasan tidak berizin, Selasa (10/11/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah    | November | Intimidasi dan ancaman                        | Non-negara | FUI                          | Pimpinan komunitas penghayat kepercayaan                  |
| 154 | Kepala Desa dan Camat Meminta Sapta Darma Rembang Hentikan Renovasi Candi Busono | Lima menit sebelum pembakaran, Kepala Desa Plawangan dan Camat Kragan menghubungi Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Rembang, Sutrisno dan meminta segera menghentikan renovasi Candi Busono karena ada alasan penolakan, Selasa (10/11/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah    | November | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Negara     | Kepala Desa                  | Pengelola/anggota sanggar komunitas penghayat kepercayaan |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |          | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Negara     | Camat                        |                                                           |
| 155 | Rumah Ibadah Sapta Darma Dibakar Massa                                           | Pembangunan sanggar milik komunitas Sapta Darma yang diberi nama Candi Busono di Dukuh Blando, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dirusak dan dibakar massa, Selasa (10/11/2015) sekitar 10.30 WIB. Diperkirakan jumlahnya 40-50 orang. Akibat kejadian ini bangunan mengalami kerusakan. Beberapa bangunan rusak dan perabot hangus. Menurut kepolisian setempat pelaku berasal dari warga setempat yang tidak setuju dengan pembangunan sanggar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah    | November | Perusakan/pembakaran rumah ibadah             | Non-negara | Massa                        | Pengelola sanggar komunitas penghayat kepercayaan         |
| 156 | Ujaran Kebencian terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Muncul di Depok      | Tim kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, menemukannya sejumlah spanduk bermuatan isu SARA yang dinilai menyudutkan sepasang calon tersebut. Di dalam spanduk tertulis pernyataan bahwa Dimas-Babai akan menyukseskan program "satu kelurahan satu gereja". Pelaporannya sudah kami lakukan kemarin, dan tembusannya juga sudah disampaikan ke Polres Depok, Selasa (10/11/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Depok             | Jawa Barat     | November | Ujaran kebencian                              | Non-negara | Pelaku tidak teridentifikasi | Calon walikota dan wakil walikota                         |

|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |          |                                               |            |                 |                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 157 | Rizieq Shihab Plesetkan Sampurasun dengan "Campur Racun"                       | Dalam ceramah di Purwakarta pada 13 November 2015 Rizieq Shihab menyatakan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meninggalkan salam "Assalamualaikum" dan menggantinya dengan salam adat Sunda "sampurasun". Rizieq memlesetkan salam Sampurasun dengan "campur racun". Pernyataan yang beredar luas di youtube ini mendapat reaksi keras dari masyarakat Sunda. Sebanyak 16 organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat (AMSM) melaporkan pentolan FPI itu ke Polda Jawa Barat                                                                                                                                                                                                                                                                        | Purwakarta | Jawa Barat | November | Ujaran kebencian                              | Non-negara | Rizieq Shihab   | Dedi Mulyadi                                    |
| 158 | Pemkot Jambi Kirimkan Surat Peringatan Pembongkaran Gereja HKBP Syalom Aurduri | Pemerintah Kota Jambi memberi surat peringatan kepada Pimpinan Majelis HKBP Syalom Aurduri Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi, membongkar sendiri bangunan gereja tersebut pada batas waktu terakhir penyegelean gereja: 14 November 2015. Surat ini terkait dengan kebijakan Walikota sebelumnya, Bambang Priyanto, yang menyegel gereja melalui surat penyegelan SK Walikota Jambi tanggal 14 Desember 2011 Nomor: 452.2/1231/kesra tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syalom. Pemkot banding dan mereka menang. Berdasarkan putusan akhir tahun 2015, bangunan gereja HKBP Syalom Aurduri yang terbelah dikembalikan. Pemkot memberikan waktu hingga tanggal tersebut. Jika tanggal tersebut tidak dilakukan Satpol PP Kota Jambi akan melakukan pembongkaran paksa. | Kota Jambi | Jambi      | November | Pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah | Negara     | Pemerintah Kota | Pimpinan Majelis dan jemaat HKBP Syalom Aurduri |
| 159 | Ujaran Kebencian ANNAS di Purwakarta                                           | Pengukuhan pengurus Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) digelar di Aula Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (15/11/2015). Turut hadir dalam acara pengukuhan pengurus pada 17 kecamatan di Purwakarta itu, Ketua ANNAS Pusat Athian Ali M. Dia juga sempat menyampaikan orasinya seputar kegiatan ANNAS di depan sedikitnya 150 orang. Menurut Athian, orang beragama tidak akan pernah menerima kalau kesucian agama mereka diganggu. Dia menuding pengikut Syiah sudah menodai agama Islam. Penodaan agama yang dilakukan Syiah merupakan pelanggaran HAM terberat.                                                                                                                                                                                                          | Purwakarta | Jawa Barat | November | Ujaran kebencian                              | Non-negara | ANNAS           | Komunitas Syiah                                 |
| 160 | Bupati Tanggamus Meminta MUI Tanggamus Bersatu Memerangi Penyimpangan Akidah   | Di hadapan pengurus MUI Kabupaten Tanggamus periode 2015-2020 di Aula Hotel VIP, Gisting, Selasa (17/11/2015), Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan meminta para ulama ini bersatu memerangi berbagai penyimpangan akidah dan memecah belah Tanggamus. Usaha itu dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan ras dan suku. Ia juga meminta guru mengaji, pengajar, ulama, dan majelis-majelis taklim didata melalui pemberian rekomendasi dari Kementerian Agama dan MUI Kabupaten Tanggamus.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggamus  | Lampung    | November | Pemaksaan keyakinan                           | Negara     | Bupati          | Aliran yang dituduh sesat                       |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |          |                                               |            |            |                                              |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 161 | Camat Tiroang Pinrang Nyatakan Daulah Islam Sesat | Camat Tiroang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Andi Taufik Arif menyatakan Daulah Islam diduga aliran sesat, (19/11/2015). Pihaknya saat ini masih melakukan pemantauan bersama bersama Polsek Tiroang dan Koramil Pos Tiroang. Andi mengimbau warga setempat jangan mau terpancing untuk ikut bergabung. Informasi yang sementara diterima gerakannya mirip ISIS, di mana menanamkan rasa kebencian terhadap pemerintah.                                                                            | Pinrang        | Sulawesi Selatan | November | Penye-satan keyakinan                         | Negara     | Camat      | Daulah Islam                                 |
| 162 | Ujaran Kebencian ANNAS di Kota Bogor              | Aliansi Anti Syiah (Annas) Bogor mendeklarasikan terbentuknya kelompok tersebut, Minggu siang (22/11/2015). Acara yang diselenggarakan di IICC Botani Square Bogor ini dihadiri sekitar 150 orang. Mereka terang-terangan menolak berkembangnya kelompok Syiah di Bogor dan mengecam bahwa Syiah bukan bagian dari Islam. Annas Bogor, Kata Ketua Annas, Nur Sukma, siap bekerja sama dengan siapapun yang memiliki pandangan dan sikap yang sama terhadap bahaya keberadaan paham Syiah di Indonesia. | Kota Bogor     | Jawa Barat       | November | Ujaran kebencian                              | Non-negara | ANNAS      | Komunitas Syiah                              |
| 163 | Penyegehan Gereja HKBP Keroncong Tangerang        | Rumah ibadah jemaat HKBP di Perumahan Keroncong Permai, Blok DB V, No. 11, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Tangerang Kota, disegel Satpol PP (22/10/2015). Selain tidak berizin, keberadaan rumah ibadah itu dinilai Satpol PP akan melahirkan konflik antarwarga. Penyegehan melibatkan banyak petugas. Selain Satpol PP, Polri, dan TNI. . Pihak gereja menyatakan pihaknya memiliki rekomendasi menggunakan tempat ibadah sementara dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).             | Tangerang Kota | Banten           | November | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Walikota   | Pimpinan dan jemaat HKBP Keroncong Tangerang |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |          | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Satpol PP  |                                              |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |          | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | Kepolisian |                                              |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |          | Pembatasan/pelarangan/penyegehan rumah ibadah | Negara     | TNI        |                                              |

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |          |                                              |            |            |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 164 | Sekjen MIUMI Nyatakan Paham Sekularisme dan Liberalisme Berhasil Mengubah UUD | Sekretaris Jenderal Majelis Intelktual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Bachtiar Nasir menyatakan agar umat Islam berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan paham-paham yang menyesatkan seperti sekularisme dan liberalisme. Pernyataan disampaikan-nya usai melantik Pengurus Wilayah MIUMI Lampung, di Bandar Lampung, Senin (23/11/2015). Di Indonesia paham tersebut sudah masuk di semua lini dan berhasil mengubah Undang Undang Dasar negara Indonesia dengan menghadirkan demokrasi liberal. Kelompok ini, kata Bahtiar, masuk ke eksekutif dan legislatif, hingga ke bidang ekonomi dan pendidikan. Mereka gencar mempromosikan paham kapitalisme dan neoliberalisme. Liberalisme dan kemanusiaan agama baru dengan kitab sucinya hawa nafsu dengan dalih hak asasi manusia. Ia juga menuding isu pernikahan antaragama hingga pernikahan sejenis merupakan agenda mereka. | Bandar Lampung    | Lampung     | November | Ujaran kebencian                             | Non-negara | MIUMI      | Aliran yang dituduh sesat |
| 165 | Garis Laporkan Ustad Maulana Lakukan Penodaan Agama                           | Gerakan Reformis Islam (Garis) yang diwakili Adang Nurmasyah melaporkan Muhammad Nur Maulana, biasa dipanggil ustadz Maulana, ke Polda Metro Jaya. Kamis (26/11/2015) petang. Salah satu pernyataan dalam pengajiannya di televisi dianggap menimbulkan kontroversi dan menyinggung umat Islam. Ustad Maulana menilai bahwa mencari seorang pemimpin tidak perlu melihat latar belakang agama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jakarta           | DKI Jakarta | November | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Non-negara | GARIS      | Muhammad Nur Maulana      |
| 166 | Diskusi Teror ISIS Sejuk Batal Karena Ancaman                                 | Rencana Serikat Jurnalis untuk Kebergamaan (SEJUK) untuk mengadakan diskusi publik, "Teror Paris, Ujaran Kebencian dan Ancaman ISIS di Indonesia" di Jakarta pada, Sabtu (28/11/2015) batal. Pembatalan terjadi setelah penolakan dari Front Pembela Islam (FPI) terkait poster yang disebar pada Rabu (25/11/2015), Polda Metro Jaya menelepon pihak yang menjadi mitra SEJUK menggelar diskusi. Polisi meminta mitra dari Sejuk menyampaikan permintaan maaf terhadap FPI. Permintaan tersebut ditolak sebab poster yang menjadi persoalan sudah disanggupi akan diganti. Lantas polisi menyarankan untuk membatalkan diskusi karena polisi menolak memberikan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan diskusi. Akhirnya mitra SEJUK memutuskan membatalkan diskusi.                                                                                                                 | Jakarta           | DKI Jakarta | November | Pelarangan aktivitas                         | Non-negara | FPI        | Sejuk                     |
| 167 | Polres Cirebon Selidiki Kasus Renel Mareta                                    | Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota Ajun Komisaris Dadang Sudiantoro menyatakan kepada media, Senin (28/11/2015), pihaknya sudah memeriksa saksi hingga 11 orang dan akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus Renel Mareta yang dianggap sesat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat  | November | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara     | Kepolisian | Renel Mareta              |



|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |          |                                              |            |         |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 168 | Komite Sekolah minta Kepolisian Usut kasus Renel Mareta              | Ketua Komite SMAN 2 Cirebon Priatmo Adji meminta pihak kepolisian dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cirebon segera mempercepat proses penyelidikan ajaran Renel Mareta. Permintaan itu dilontarkan Selasa (29/11/2015). Menurutnya setelah banyak dilarang, siswa-siswa kerap masih bertemu dengan Rene. Pertemuan tak hanya dilakukan di rumah, tapi ke tempat lain seperti mal ataupun kafe. Renel Mareta (33 tahun) sendiri diketahui merupakan alumni SMAN 2 Cirebon angkatan 2000.                                                                                                                                        | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | November | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara     | FPI     | Renel Mareta |
| 169 | MUI Kabupaten Cirebon Nyatakan Renel Mareta Sesat                    | Kepada media, Rabu (30/12/2015), Ketua Bidang Pembinaan Perempuan dan Remaja MUI Kabupaten Cirebon, Wawan Arwani mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan, ajaran Renel Mareta sudah bisa diindikasikan sesat, sebab sudah melenceng dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Untuk meresponsnya, MUI sudah memanggil Renel dan meminta meminta keterangan orang tua yang anaknya diduga menjadi pengikut atau korban Renel Mareta. Renel tinggal di Jalan Pembangunan XII, RT 03 RW 07, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Ia dituding mengajarkan ajaran-ajarannya sejak pukul 21.00 WIB hingga subuh | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | November | Penyelesaian keyakinan                       | Non-negara | MUI     | Renel Mareta |
| 170 | Almanar akan Paksa Tutup Kelompok Renel Mareta                       | Koordinator Ormas Islam Almanar, Andi Mulya, yang juga akan mendampingi orang tua dalam pertemuan MUI pada Rabu (30/12/2015), mengatakan akan akan melaporkan ke polisi jika MUI nyatakan Renel Mareta sesat. Jika tidak dinyatakan sesat, Andi mengaku akan akan bertindak sendiri menutup paksa aliran tersebut. Andi mengaku memegang bukti-buktinya kesesatan Renel Mareta. Salah satu bukti kesesatan Renel menurut Andi adalah melakukan hal-hal seksual dan membantah atau durhaka terhadap orang tua. Ajaran yang di Islam tidak dibenarkan.                                                                           | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | November | Penyelesaian keyakinan                       | Non-negara | Almanar | Renel Mareta |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |          | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Non-negara | Almanar |              |
| 171 | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dukung Kriminalisasi Renel Mareta | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Hj Yuningsih mengatakan pihaknya mendukung langkah yang dilakukan MUI. Ia menduga korban Renel Mareta bisa lebih banyak. Aliran tersebut, kata Yuningsih, melakukan perekrutan anggota secara sistematis dan halus, dan mengena dengan hobi remaja seperti internet. Jika terdapat penyimpangan, persoalan ini kata Yuningsih bisa dibawa ke ranah hukum. Fenomena itu pun menurutnya harus menjadi perhatian serius orang tua dan masyarakat luas pada Rabu (30/12/2015)                                                                                 | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | November | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara     | DPRD    | Renel Mareta |



|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |               |                                                                        |            |            |                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 172 | Mukmin Sadi-<br>min Dipaksa<br>Bertobat dan<br>Meminta maaf             | Senin (30/11/2015), Mukmin Sadimin (53), akrab disapa Mbah Min dan dua isterinya dibawa ke Polsek Nusawungu. Menurut Kapolsek Nusawungu AKP Muji Ali polisi membawa mereka terkait dengan aliran yang disebarnya. Di kantor polisi, Sadimin diminta bertobat dan meminta maaf karena telah menyebarkan aliran sesat. Bahkan diminta membuat surat pernyataan tidak lagi menyebarkan aliran yang dianutnya selama ini. Pertemuan dihadiri perwakilan MUI, KUA, tokoh agama dan FPI. Sadimin mengakui kesalahannya dan siap menutup serta membongkar sendiri padepokannya. Sadimin warga RT 01 RW 06 Desa Karang Tawang Kecamatan Nusawungu, Cilacap, Jawa Barat                                                     | Cilacap    | Jawa Tengah | Novem-<br>ber | Pemak-<br>saan<br>keyakinan                                            | Negara     | Kepolisian | Mukmin<br>Sadimin             |
|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |               | Pem-<br>batasan/<br>pelaran-<br>gan/pe-<br>nyegelan<br>rumah<br>ibadah | Negara     | KUA        | 2 Isteri<br>Mukmin<br>Sadimin |
|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |               | Pem-<br>batasan/<br>pelaran-<br>gan/pe-<br>nyegelan<br>rumah<br>ibadah | Non-negara | MUI        |                               |
|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |               | Pem-<br>batasan/<br>pelaran-<br>gan/pe-<br>nyegelan<br>rumah<br>ibadah | Non-negara | FPI        |                               |
|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |               | Pem-<br>batasan/<br>pelaran-<br>gan/pe-<br>nyegelan<br>rumah<br>ibadah | Non-negara |            |                               |
| 173 | Bupati Purwa-<br>karta Dilaporkan<br>Menodai dan<br>Menistakan<br>Agama | Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ke Mapolda Jawa Barat (Jabar) oleh Ustadz asal Purwakarta yang didampingi FPI pada 30 November 2015. Usai melapor di Polda Jabar, Syahid Joban menyatakan Dedi telah melakukan penodaan dan penistaan agama terhadap umat muslim. Beberapa bukti yang disampaikan adalah adalah kalimat-kalimat dalam buku Kang Dedi Menyapa' jilid 2 dan video Video Safari Ramadhan 2015 Part 1. Dalam halaman 192, laporan merujuk pada kalimat "ketika bicara Pancasila maka kita bicara Ketuhanan yang Maha Esa, keragaman bertuhan". Sementara da-<br>lam video, pernyataan yang dipersoal-<br>kan adalah adalah pernyataan Dedi bahwa "hubungan hamba dengan Allah itu hubungan percumbuan". | Purwakarta | Jawa Barat  | Novem-<br>ber | Krimi-<br>nalisasi<br>atas dasar<br>agama dan<br>keyakinan             | Non-negara | FPI        | Dedi Mu-<br>lyadi             |

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |          |                                   |            |                |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 174 | FPI Cilacap Robohkan Musala                                         | Front Pembela Islam (FPI) Cilacap merobohkan musala di Desa Karang-tawang, Kecamatan Nusawungu, Cilacap pada Selasa (02/11/2015). Musala bernama Al-Barokah itu terletak dalam padepokan milik Mukmin Sadimin (53), akrab disapa Mbah Min. Aksi dilakukan sekira pukul 10.00 WIB, dengan diawasi langsung petugas dari Mapolsek Nusawungu dan Koramil Nusawungu. Menurut perwakilan FPI, Mbah Min sudah sepakat mengosongkan padepokan yang dituding digunakan untuk menyebar aliran sesat dan perbuatan maksiat. FPI khawatir setelah Mbah Min pergi musala itu dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala Desa Karang Tawang Sadir sebetulnya berharap jika perobohan bangunan harusnya melalui koordinasi dengan desa sehingga desa bisa membantu merobohkan dan menjaga material bangunannya tidak rusak. | Purwakarta        | Jawa Barat       | Desember | Perusakan/pembakaran rumah ibadah | Non-negara | FPI            | Mukmin Sadimin       |
| 175 | Puluhan Orang tidak Dikenal Merusak Masjid Abdurrahman bin Auf Bali | Sabtu (05/12/2015) pukul 03.00 WIB dinihari, Masjid Jami Abdurrahman bin Auf milik Yayasan Baitul Umah di Kelurahan Jimbaran, Kuta, Selatan Kabupaten Badung dirusak oleh orang tidak dikenal. Kaca di pintu masjid rusak dan kota amal masjid hilang dicuri. Polisi mengatakan pengrusakan masjid ini murni tindakan kriminal pencurian. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali berharap aparat kepolisian dapat transparan dan profesional menangani kasus pengrusakan masjid yang diklaim polisi murni kasus pencurian tersebut, Selasa (08/12/2015).                                                                                                                                                                                                                                                              | Badung            | Bali             | Desember | Perusakan/pembakaran rumah ibadah | Non-negara | Massa          | Pengelola Masjid     |
| 176 | Seorang PNS Kota Palopo Diduga Sesat Dihajar Massa                  | Seorang PNS asal Kota Palopo dihajar massa karena diduga mengedarkan ratusan lembar selebaran berisi ajaran sesat berupa pesan adu domba penganut agama. Selebaran itu diselipkan di kendaraan bermotor yang sedang diparkir. Ia dihajar massa di dekat warung kopi di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Selasa (08/11/2015). Korban kemudian diserahkan ke polisi dan ditahan di Mapolsek Tempe. Kapolsek AKP Sutarno mengatakan barang bukti berupa selebaran sudah disita. Pelaku akan dijerat dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman penjara lebih dari lima tahun.                                                                                                                                                                                                                        | Kabupaten Soppeng | Sulawesi Selatan | Desember | Serangan fisik/perusakan properti | Non-negara | Massa          | Pelaku dituduh sesat |
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |          |                                   | Negara     | Kepolisian     | Pelaku diduga sesat  |
| 177 | Wakil Walikota Organisasi di Gorontalo                              | Wakil Walikota Gorontalo Budi Doku ada salah satu organisasi yang diduga menyebar ajaran sesat, dengan menggunakan embel-embel Islam, Rabu (09/12/2015). Dilihat dari praktek ajarannya, yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Dia mencontohkan dengan pelaksanaan sholat yang berbeda, abu rokok bisa jadi jimat hingga air zamzam yang dengan mudahnya bisa diperoleh. Ia juga mengaku salah satu kelurahan tak melakukan koordinasi, tiba-tiba melegitimasi keberadaan mereka dengan memberi persetujuan kelengkapan pengurusan izin dan administrasi. Masalah ini sempat di bahas dalam Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) kemarin.                                                                                                                                                                              | Gorontalo         | Gorontalo        | Desember | Penye-satan keyakinan             | Negara     | Wakil Walikota | Aliran diduga sesat  |

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |          |                                                  |            |                         |                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 178 | AMS mendesak Polisi Larang Rizieq Shihab ke Purwakarta     | Angkatan Muda Siliwangi (AMS) mendesak kepolisian tidak mengizinkan Rizieq Shihab datang ke Purwakarta pada 19 Desember 2015. Seperti diketahui, Habib Rizieq akan menyambangi Purwakarta dalam rangka pelantikan pengurus Front Pembela Islam (FPI) Purwakarta. Penolakan terkait kasus tuduhan pelecehan warga Sunda oleh Habib Rizieq datang ke Purwakarta. Hal itu disampaikan Ketua AMS Jabar, Noeri Firman saat ditemui di Pendopo Pemkab Purwakarta dalam agenda Maulid Nabi, Senin (14/12). Ia mengatakan, jika Rizieq dibiarkan datang ke Purwakarta, menurutnya itu akan menyulut emosi masyarakat Sunda di Purwakarta yang tersinggung dengan plesetan Sampurasun menjadi campur racun oleh Rizieq pada pertengahan November. | Purwakarta      | Jawa Barat | Desember | Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan         | Non-negara | Angkatan Muda Siliwangi | Rizieq Shihab                     |
| 179 | MUI Kabupaten Ende Sosialisasi Bahaya Aliran Sesat         | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ende menggelar sosialisasi bahaya aliran sempalan atau sesat dalam Islam di Kabupaten Ende, Jumat (18/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kabupaten Ende  | NTT        | Desember | Ujaran kebencian                                 | Non-negara | MUI                     | Aliran dituduh sesat              |
| 180 | Warga Rangkasbitung Larang Gafatar Sebar-paham             | Warga Desa Rangkasbitung Timur, Kabupaten Lebak, Banten, menerima empat kepala keluarga yang diduga anggota Gafatar kembali ke kampung halaman mereka. Syaratnya, seperti disampaikan Enjen, tokoh masyarakat Kampung Cibungur, Senin (21/12/2015), dilarang mengembangkan paham Gafatar yang dianggap sesat. Keempat kepala keluarga tersebut terdiri dari keluarga MM berikut isteri dan dua anak, HL berikut suami dan lima anak, MN berikut isteri, orangtua sendiri, mertua dan dua anak juga NN berikut isteri dan dua anak.                                                                                                                                                                                                       | Kabupaten Lebak | Banten     | Desember | Pembatasan/pelarangan penyebaran agama/keyakinan | Non-negara | Massa                   | 4 kepala keluarga anggota Gafatar |
| 181 | Kantor Kemenag Kota Jambi minta MUI Menangani Aliran Sesat | Di hadapan peserta Musyawarah Daerah IX, Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, Selasa (22/12/2015), Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Iqbal menyatakan hingga saat ini masih banyak aliran sesat yang berada di Kota Jambi. Ia mengaku mendapat laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait keberadaan aliran-aliran tersebut. Ia berharap peran MUI Kota Jambi dalam menangani berbagai masalah tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kota Jambi      | Jambi      | Desember | Penyebaran keyakinan                             | Negara     | Kantor Kemenag          | Aliran diduga sesat               |

|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |           |                                                   |            |                      |                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | Kemenag Rohul Minta Umat Waspada! Pe-nyebaran Syiah                                | Kepala Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA menyatakan, umat Islam harus waspada! perkem-bangan dan penyebaran paham Syiah di tengah-tengah masyarakat. Jika Syiah Syiah masuk di tengah-tengah masyarakat Sunni, maka akan terjadi gesekan pada akhirnya terjadi perang saudara seperti di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan saat memberi sambutan pengarahannya dan membuka secara resmi kegiatan Seminar Sehari Islam Rahmatan Lil-lalamin, dengan tema “Bahaya Syiah dan Perkembangannya di Indonesia,” Rabu (23/12/2015) di Masjid Jamiatul Muslim, Kepenuhan Hulu. Kegiatan dihadiri sejumlah narasumber seperti Ketua Ikadi Riau Dr H Jhon Famil MA dan Roni Chandra MPdI. Selain itu hadir juga pengurus Ikadi Rohul Rino, Camat Kepenuhan Hulu Drs Muham-mad Abror, Kepala KUA Kepenuhan Hulu, kades se-Kepenuhan Hulu, dan 60 tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat Kecamatan Kepenuhan Hulu. | Rokan Hulu   | Riau           | Desem-ber | Ujaran kebencian                                  | Negara     | Kantor Kemenag       | Komunitas Syiah                                                                                                                                    |
| 183 | FPI Aksi Melarang Mengucapkan, Mengikuti, dan Menggunakan Atribut Natal            | Menjelang Natal dan tahun baru, be-lasan aktivis Front Pembela Islam (FPI) berkeliling mendatangi mal-mal besar di Surabaya. Mereka mengendarai sepeda motor dan berorasi sebentar di depan mal, dimulai dari Mal Galaxy di kawasan Surabaya Timur. FPI juga mengajak umat Islam tidak mengu-capkan, mengikuti, dan mengguna-kan atribut-atribut Natal dan tahun baru. Rabu, 23 Desember 2015. FPI, mengaku berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan aksi tersebut. Namun, jika pihaknya mendapat laporan adanya pemaksaan oleh mal tertentu, ia siap datang dengan mem-bawa jumlah anggota yang lebih besar lagi. Sejumlah mal yang didatangi antara lain Mal Galaxy, Grand City, Delta Plaza, Tunjungan Plaza, Ciputra World, dan Lenmarc.                                                                                                                                                                       | Surabaya     | Jawa Timur     | Desem-ber | Pem-batasan/ pelarangan kegiatan kea-gamaan       | Non-negara | FPI                  | Pengelola Mal Galaxy<br>Pengelola Grand City<br>Pengelola Delta Plaza<br>Pengelola Tunjungan Plaza<br>Pengelola Ciputra World<br>Pengelola Lenmarc |
| 184 | Pemkot Padang Keluarkan Surat Imbauan Laran-gan Pemakaian Atribut Natal            | Pemkot Padang, Sumatera Barat men-geluarkan Surat imbauan bernomor 451.338/Kesra-2015 tentang larangan pemakaian atribut Natal bagi karyawan muslim yang bergerak di usaha hotel, mal, perkantoran dan lainnya, Rabu (23/12/2015). Surat berisi permintaan pemilik mal, hotel, restoran, BUMN dan BUMD tidak memerintahkan karyawan muslim memakai atribut Sinterklas dan Natal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kota Padang  | Sumatera Barat | Desem-ber | Pem-batasan/ pelarangan kegiatan kea-gamaan       | Negara     | Walikota             | Karyawan hotel, per-kantoran, dan mall<br>Pengelola hotel, per-kantoran, dan mall                                                                  |
| 185 | Pemprov Aceh Minta Umat Kristen Aceh Singkil Hanya Rayakan Natal di Gereja Berizin | Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Aceh Frans Dellian menyata-kan meminta Umat Kristen di Kabu-paten Aceh Singkil merayakan Natal hanya di gereja-gereja yang memiliki izin (24/12/2015). Ia melarang umat Kristen menggunakan gereja yang su-dah dibongkar. Rumah yang djadikan tempat perayaan Natal hanya untuk penghuni rumah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aceh Singkil | Aceh           | Desem-ber | Pem-batasan/ pelaran-gan/pe-nyegelan rumah ibadah | Negara     | Pemer-intah Provinsi | Umat Kris-ten Aceh Singkil                                                                                                                         |

|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |           |                                                            |            |                    |                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|
| 186 | Pembiaran<br>Penyegelan<br>GKI Yasmin dan<br>HKBP Filadelfia                           | Ratusan jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Bekasi merayakan natal di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/12/2015). Kegiatan ini kali keempat sejak empat tahun lalu. Kegiatan ini juga sebagai bentuk protes terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai mendiamkan penyegelan gereja mereka. Mahkamah Agung sebenarnya telah memutuskan bahwa jemaat kedua gereja ini berhak mendirikan bangunan gereja di lokasinya masing-masing sebagai rumah ibadah, tetapi putusan ini diabaikan oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Bupati Bekasi Neneng Hasanna Yasin yang tetap melakukan penyegelan.                                                          | Jakarta Pusat   | DKI Jakarta | Desem-ber | Pembiaran                                                  | Negara     | Walikota           | GKI Yasmin                            |
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |           | Pembiaran                                                  | Negara     |                    | HKBP Filadelfia                       |
| 187 | Kemenag<br>Dukung Krimi-<br>nalisasi Kasus<br>Terompet Ber-<br>bahan Sampul<br>Alquran | Tim Konsultasi Syariah Kementerian Agama membahas kasus terompet berbahan sampul Alquran yang beredar di Kendal, Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah. Rapat yang dihadiri Kasubdit Pembinaan Syariah, Nur Kazin, di ruang rapat lantai 7, gedung Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (28/12/2015). Rapat membuka peluang ancaman pidana terhadap pihak yang membuat terompet berbahan sampul Alquran melalui Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan pasal 156 KUHP                                                                                                                                                                                                                            | Jakarta Pusat   | DKI Jakarta | Desem-ber | Krimi-<br>nalisasi<br>atas dasar<br>agama dan<br>keyakinan | Negara     | Kemenag            | Penyebar<br>terompet                  |
| 188 | Politisi PPP<br>Diadukan<br>Melakukan Pe-<br>nodaan Agama                              | Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Lubis Institute, Imam Sayuti, melaporkan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gojali Harahap dilaporkan ke Bareskrim Polri, Sabtu (26/12/2015). Dalam laporannya, Imam Sayuti melampirkan sejumlah bukti berupa foto, video, rekaman dan dokumen terkait pernyataannya dalam unjuk rasa di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Rabu (23/12). Gojali diduga kuat menebar kebencian yang berbau SARA, sehingga dikhawatirkan memicu terjadinya konflik horisontal. Selain menggunakan Pasal 156, Pasal 157 KUHP jo.pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, ia juga menggunakan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Desem-ber | Krimi-<br>nalisasi<br>atas dasar<br>agama dan<br>keyakinan | Non-negara | Lubis<br>Institute | Pelaku<br>dituduh<br>menodai<br>agama |

|     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |          |                                              |            |                               |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 189 | Anggota Komisi III Dukung Kriminalisasi Kasus Terompet Berbahan Sampul Alquran             | Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menyatakan pembuat dan penyebar terompet berbahan sampul Alquran yang beredar di Kendal, Jawa Tengah dianggap memenuhi unsur objektif dan subjektif ketentuan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Perbuatan ini dikategorikan sebagai penodaan agama tertentu yang mengandung sifat penghinaan, melecehkan, dan meremehkan suatu agama yang karenanya dapat menyakitkan perasaan bagi pemeluk agama yang bersangkutan, Selasa (29/12/2015) saat kunjungan reses di wilayah Aceh Singkil, Selasa (29/12/2015). Ia meminta kepolisian bertindak serius dalam mengungkap otak pelaku pembuat terompet dari sampul Alquran itu. | Aceh Singkil | Aceh       | Desember | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara     | DPR                           | Penyebar terompet            |
| 190 | MUI Kabupaten Bogor Dukung Kriminalisasi Pelaku Peredaran Terompet Berbahan Kertas Alquran | Terkait beredarnya terompet berbahan kertas Alquran, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukhri Adji menyatakan jika tindakan tersebut sebagai pelecehan dan penodaan terhadap agama Islam, Rabu (30/12/2015). Ia minta pelaku segera ditangkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bogor        | Jawa Barat | Desember | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Non-negara | MUI                           | Pelaku dituduh menodai agama |
| 191 | Pelaku Penyebar Pernikahan Gay Tersangka Penodaan Agama                                    | Terkait beredarnya foto pernikahan yang diduga pasangan gay di Hotel Four Season Ubud Gianyar, Bali, Reskrim I Polres Gianyar menetapkan satu orang berinisial M sebagai tersangka dengan dakwaan melanggar Pasal 156a tentang Penodaan Terhadap Agama. Menururt Kasat Reskrim I Polres Gianyar, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Dewa Anom, Rabu (30/09/2015), tersangka tidak ditahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gianyar      | Bali       | Desember | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Negara     | Kepolisian                    | Pelaku diduga menodai agama  |
| 192 | Forum Pondok Pesantren Subang Dukung Kriminalisasi Kasus Terompet Berbahan Sampul Alquran  | Forum Pondok Pesantren (FPP) Subang menyatakan peredaran terompet bertuliskan ayat-ayat Alquran tidak hanya merusak kerukunan antarumat beragama, tapi juga bentuk pelecehan dan penodaan agama, yang harus diproses hukum. Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Subang, KH Maman S Jamaludin, mendesak aparat hukum mengusut tuntas, menangkap para pelaku dan aktor intelektualnya, Kamis (31/12/12). Kasus ini, ujar dia, sangat meresahkan masyarakat khususnya umat Islam, karena merusak tatanan aqidah serta melecehkan agama.                                                                                                                                          | Subang       | Jawa Barat | Desember | Kriminalisasi atas dasar agama dan keyakinan | Non-negara | Forum Pondok Pesantren Subang | Pelaku dituduh menodai agama |

## **Matriks 2**

**Praktek Baik dan Toleransi Kehidupan Beragama &  
Berkeyakinan Januari – Desember 2015**





| Matriks 2:                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |          |                       |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Praktek Baik dan Toleransi Kehidupan Beragama & Berkeyakinan Januari – Desember 2015 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |          |                       |                                                                           |
| NO                                                                                   | PERISTIWA                                                                     | DESKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KOTA/<br>KABUPATEN | PROVINSI    | WAKTU    | TINDAKAN              | AKTOR                                                                     |
| 1                                                                                    | Dirjen Bimas Islam: penanganan aliran sesat harus ke depan dialog dan nasihat | Dirjen Bimas Islam Machasin pada 01 Januari 2015 mengatakan bahwa negara tidak dalam kapasitas mengatur dan menetapkan sesat atau tidaknya aliran keagamaan. Karena hal itu merupakan masalah internal umat beragama. Untuk itu, penanganan aliran yang dianggap sesat harus mengedepankan dialog dan nasihat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jakarta            | DKI Jakarta | Januari  | Menghormati keyakinan | Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Machasin                                   |
| 2                                                                                    | Belajar Keragaman, Dosen IAIN Ajak Mahasiswa ke Gereja di Banda Aceh          | Terilhami apa yang dialaminya ketika belajar di Universitas Flinders di Australia Selatan, Rosnida Sari, dosen IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh mengajak para mahasiswanya mengetahui agama lain dengan berkunjung ke sebuah gereja di sana pada 05 Januari 2015. "Saya mempunyai pengalaman yang sangat berkesan dengan mahasiswa-mahasiswi saya. Semester ini salah satu mata pelajaran yang saya asuh adalah Study Gender dalam Islam. Sepertinya menarik jika mahasiswa yang semuanya Islam ini belajar juga tentang bagaimana agama lain melihat relasi laki-laki dan perempuan di agama mereka. Niat untuk membawa mahasiswa ini karena saat berada di Adelaide, saya banyak berteman dengan teman lokal. Bahkan saya sempat tinggal bersama keluarga lokal selama tiga bulan di Flagstaff Hill, Australia Selatan" jelas Rosnida. | Banda Aceh         | Aceh        | Januari  | Promosi keragaman     | Rosnida Sari                                                              |
| 3                                                                                    | Toleransi antar Etnis di "Kota Cina Kecil" Lasem                              | Percampuran budaya Cina dan Jawa di Lasem, Rembang, Jawa Tengah tak hanya berhenti pada sepotong batik tulis, dalam kehidupan sehari-hari di daerah nilai-nilai toleransi antar etnis dan agama sangat kental di kota yang dijuluki "Cina kecil" atau "Kota Beijing lama kecil", dan sebutan sebagai "Kota Santri". Menyusuri jalan-jalan kecil di Kota Lasem seperti berada di kota Beijing lama, disisi kanan dan kiri tampak bangunan rumah-rumah dengan arsitektur khas Cina yang dikelilingi tembok dengan gerbang bertuliskan huruf kanji yang berarti kalimat-kalimat bijak. Di beberapa rumah huruf-huruf kanji tersebut tampak samar karena tertutup cat, telah dihapus, atau ditutup dengan papan seperti ditulis pada 01 Februari 2015                                                                                            | Lasem              | Jawa Tengah | Februari | Praktik toleransi     | Warga Lasem                                                               |
| 4                                                                                    | Menag Nyatakan ISIS Perlu Dicegah                                             | Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah akan terus berupaya mencegah masuknya kelompok atau paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), karena tak sejalan dengan pemahaman ajaran Islam sebagai "rahmatan lil alamin". "Paham ISIS tak juga sejalan dengan konstitusi Indonesia," kata Menag saat berkunjung ke MNC Group di Jakarta pada 03 Februari 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jakarta            | DKI Jakarta | Februari | Deradikalisasi        | Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin                                      |
| 5                                                                                    | Menteri Agama dan Ibu Shinta Resmikan Vihara Maha Dharma                      | Vihara Maha Dharma yang berdiri megah di bilangan wilayah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan dibangun selama 11 tahun diresmikan penggunaannya untuk kegiatan ibadah oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (04/02/2015). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penguntingan pita oleh Menag, Isteri Presiden RI ke-4 Gus Dur, Ibu Shinta Nuriyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jakarta            | DKI Jakarta | Februari | Promosi keragaman     | Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid |

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |          |                       |                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 6  | NU Minta Sunni dan Syiah Tak Saling Hina                                 | Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Arwani Faishal mengatakan, kekerasan di bukit Az-Zikra, Sentul, Bogor tak perlu terjadi jika semua pihak saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kelompok Sunni, ujar dia, tidak perlu menulis spanduk yang berisi menolak kehadiran Syiah. Sebab, itu akan menyakiti orang Syiah. "Namun di sisi lain, kelompok Syiah tidak boleh melakukan kekerasan kepada Sunni untuk menurunkan spanduk tersebut," ujarnya, Senin, (16/02/2015).                                                                                                                                                                                             | Jakarta    | DKI Jakarta      | Februari | Menghormati keyakinan | Ketua LBM PBNU                       |
| 7  | Muslim Tionghoa Makassar Rayakan Imlek di Masjid Cheng Ho                | Lebih dari 100 masyarakat muslim dari etnis Tionghoa Makassar berkumpul untuk memaknai hari raya Imlek 2015. Halaman Masjid Cheng Ho pun menjadi tempat berkumpul masyarakat Tionghoa untuk menjalin silaturahmi.<br><br>DPW Persatuan Islam Tionghoa Sulsel H. Kwan John Adam F. M menuturkan, sangat senang bisa berkumpul kembali di acara Imlek 2015. Dengan semakin banyaknya muslim tionghoa yang datang pada acara silaturahmi ini dia berharap bisa terus merayakan Imlek ini dengan penuh kebahagiaan. "Insya Allah di masjid ini kita bisa jadikan tempat syiar. Dan dengan acara ini kita bisa berbagai sesama muslim tionghoa," ujar Kwan John, Rabu (18/02/2015). | Makassar   | Sulawesi Selatan | Februari | Praktik toleransi     | Muslim Tionghoa Makassar             |
| 8  | Meriahnya Imlek di Pecinan Banda Aceh                                    | Perayaan tahun baru Imlek 2.566 berlangsung meriah di Peunayong, Pecinan-nya Banda Aceh, Kamis, 19 Februari 2015. Atraksi barongsai menghibur warga sekitar dari pagi sampai jelang sore. Warga Banda Aceh, Nurul, mengatakan membawa anak-anaknya untuk menyaksikan atraksi tersebut. "Anak-anak ingin melihatnya (barongsai) yang tidak bisa dinikmati setiap waktu. Paling setahun sekali, saat imlek," ujarnya.                                                                                                                                                                                                                                                            | Banda Aceh | Aceh             | Februari | Praktik toleransi     | Warga Banda Aceh                     |
| 9  | Menteri Agama Ucapkan Selamat Imlek                                      | Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan tahun baru Imlek adalah tradisi yang masih lestari hingga saat ini. Oleh sebab itu, ia berharap perayaan Imlek dapat berlangsung khidmat. "Saya mengucapkan selamat kepada semua yang merayakan," ujar Lukman pada Penutupan Mukernas Partai Persatuan Pembangunan di Hotel Bidakara, Kamis, 19 Februari 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jakarta    | DKI Jakarta      | Februari | Menghormati keyakinan | Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin |
| 10 | Imlek, Muslim Tionghoa Gelar 'Seribu Jilbab' di Masjid Cheng Ho Surabaya | Ada suasana yang menarik untuk diikuti saat perayaan menyambut Imlek di Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Digagas oleh Komunitas Wirausaha Muslim (KWM), Kamis 19 Februari 2015, digelar lomba bertema 'Seribu Jilbab untuk Mualaf'. "Ada kebiasaan temen-temen tionghoa pada Imlek ini silaturahmi. Saat silaturahmi di sini, kita kumpulkan untuk mengikuti kreasi berhijab," ujar Wirawan Dwi, Humas Komunitas Wirausaha Muslim di sela-sela acara, Kamis 19 Februari 2015.                                                                                                                                                                            | Surabaya   | Jawa Timur       | Februari | Praktik toleransi     | Muslim Tionghoa Surabaya             |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |          |                       |                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 11 | KBNU Kecam GAPAS di Cirebon                                   | Unjukrasa warga yang mengatasnamakan diri kelompok Gapas yang dikomandoi Andy Mulya kepada pondok pesantren Nuruk Quran justru menuai kecaman dari Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Cirebon. KBNU pada 28 Februari 2015 menilai aksi yang dilakukan Gapas, sudah memunculkan stigma di tengah Masyarakat terhadap Pesantren tersebut yang seolah-olah mengajarkan paham sesat, sehingga dalam beberapa hari terakhir aktivitas di Pondok Pesantren tersebut vakum. KBNU yang selama ini bersikap toleran terhadap tindakan yang dilakukan Gapas (Andi Mulya CS) yang berkedok 'agama' dengan dalih menegakan amar maruf nahi munkar.                                                                                                                                                                                 | Cirebon | Jawa Barat  | Februari | Advokasi keyakinan    | KBNU Cirebon                                         |
| 12 | KBNU Laporkan Kelompok Ekstrem GAPAS ke Polres Cirebon        | Pada hari ini, Senin (02/03/2015), Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) menempuh jalur hukum perihal gerakan ekstrem kelompok Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS). Kepada Polres Cirebon, pihak KBNU akan memberikan keterangan atas aksi demonstrasi GAPAS yang menggunakan cara kekerasan di pesantren Nurul Quran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cirebon | Jawa Barat  | Maret    | Advokasi keyakinan    | KMNU Cirebon                                         |
| 13 | Cegah ISIS, Kurikulum Sekolah Jangan Disusupi Unsur Kekerasan | Salah satu cara mencegah paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) berkembang dalam masyarakat terutama pada pemuda di Indonesia, ialah memastikan tak ada unsur kekerasan dalam kurikulum di sekolah, kata Mantan Wakil Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar. "Kurikulum di sekolah jangan sampai kesusupan soal kekerasan. Pihak Kemenag sejak beberapa waktu lalu sudah menelusuri tak boleh ada bentuk kekerasan dalam buku-buku sekolah," ujar Nasaruddin kepada media pada 03 April 2015 di sela penyelenggaraan Islamic Book Fair (IBF), di Jakarta, Minggu.                                                                                                                                                                                                                                                    | Jakarta | DKI Jakarta | Maret    | Deradikalisasi        | Mantan Wakil Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar |
| 14 | Jokowi dan Iriana Kunjungi Kampung Samin di Blora             | Kampung Samin yang berada di Dukuh Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Sabtu (07/03/2015) kemarin kedatangan tamu istimewa. Warga setempat pun tidak menyangka kalau Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi mau mengunjungi kampung yang ada di tengah rerimbunan hutan jati berjarak sekitar 8 kilometer selatan Kota Blora ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Blora   | Jawa Tengah | Maret    | Menghormati keyakinan | Presiden Jokowi dan Ibu Negara                       |
| 15 | Cegah Radikalisme, NU Jombang Datangi Dinas Pendidikan        | Dinas Pendidikan Jombang, Jawa Timur, didatangi puluhan orang dari Ormas Nahdlatul Ulama (NU). kedatangan mereka untuk meminta Diknas menyikapi potensi dan indikasi pertumbuhan benih-benih radikalisme di Kabupaten Jombang pascatemuan adanya ajaran paham Islam garis keras di buku agama kelas XI SMA. Ketua Gerakan Pemuda Ansor NU, Zulfikar Damam Ikhwantanto mendesak dinas pendidikan dan Kementerian Agama untuk mengkaji secara mendalam atas dokumen kurikulum, buku referensi dan aktivitas kesiswaan. Langkah ini perlu dilakukan untuk menangkal masuknya paham radikalisme di lingkungan sekolah. "Karena memang tentu kita harus menyelamatkan anak didik kita ini agar tidak menjadi anak-anak muda yang kemudian gampang sekali melegalkan perbuatan yang radikal," kata Zulfikar, Senin (23/3/1015). | Jombang | Jawa Timur  | Maret    | Deradikalisasi        | NU Jombang                                           |
| 16 | NU Cirebon Tolak Deklarasi Anti-Syiah                         | Sejumlah lembaga yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama cabang Cirebon menolak deklarasi Anti Syiah yang akan digelar kelompok intoleran pada 03 April 2015. Mereka menilai deklarasi itu adalah provokasi bagi perdamaian antar umat beragama di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cirebon | Jawa Barat  | Maret    | Menghormati keyakinan | NU Cirebon                                           |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |       |                       |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------------|----------------------|
| 17 | Kemenag Dukong Pemblokiran Situs yang Benar-benar Radikal          | Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Kementerian Agama mendukung penuh pemblokiran situs atau website yang jelas-jelas menyebarkan paham radikal pada 03 April 2015.                                                                                                                                                                                                                 | Jakarta Pusat      | DKI Jakarta | April | Deradikalisasi        | Kementerian Agama RI |
| 18 | Diancam Banser, Deklarasi Anti-Syiah di Cirebon Batal              | Deklarasi Anti Syiah yang rencananya akan dilakukan di Cirebon terpaksa dibatalkan pada 04 April 2015. Massa dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mendesak panitia untuk membatalkan acara tersebut, karena mereka menganggap Syiah adalah bagian dari NU.                                                                                                             | Cirebon            | Jawa Barat  | April | Advokasi keyakinan    | Banser               |
| 19 | Kemenag Kutuk Deklarasi Anti-Syiah                                 | Kementerian Agama (Kemenag) mengutuk deklariasi kebencian kepada Syiah di sejumlah daerah. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Machasin, mengatakan kelompok Syiah bukan organisasi terlarang atau mewakili penjahat pada 06 April 2015                                                                                                                                                        | Jakarta Pusat      | DKI Jakarta | April | Menghormati keyakinan | Kemeterian Agama RI  |
| 20 | NU Sukoharjo Tolak Deklarasi Anti-Syiah                            | Tujuh lembaga yang bernaung di bawah organisasi Islam Nahdlatul Ulama cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, menolak aksi kelompok intoleran yang mengadu domba antar aliran Islam di Indonesia pada 10 April 2015                                                                                                                                                                                            | Sukoharjo          | Jawa Tengah | April | Menghormati keyakinan | NU Sukoharjo         |
| 21 | Belajar Islam yang Lembut dari Wayang                              | Islam yang diajarkan Wali Songo melalui media wayang mengutamakan akhlak yang baik dan mengajarkan toleransi. "Belajar Islam dengan media wayang bisa melembutkan hati anak-anak. Jangan sampai mereka terkena pengaruh paham radikal," kata Ketua Rumah Amalia Agus Syafii pada 13 April 2015                                                                                                        | Tangerang          | Banten      | April | Promosi keragaman     | Rumah Amalia         |
| 22 | Sambatan Menjadi Penyatu Warga Desa Mutisari                       | Warga Dusun Bendungan, Desa Mutisari, Wonosobo menjaga tradisi Sambatan sebagai bagian dari bentuk upaya menyatukan keberagaman sebagaimana ditulis media pada 29 April 2015                                                                                                                                                                                                                          | Wonosobo           | Jawa Tengah | April | Praktik toleransi     | Warga Desa Mutisari  |
| 23 | Menyatunya Syiah, Ahmadiyah, NU, dan Muhammadiyah di Desa Mutisari | Di Kantor Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Wonosobo, shalat berjamaah dilakukan dengan imam seorang Syiah dan makmumnya dua orang Sunni dari Nahdlatul Ulama. Di sana, kerukunan antara dua sekte ini terjaga dengan sangat baik sebagaimana ditulis media pada 01 Mei 2015                                                                                                                | Wonosobo           | Jawa Tengah | Mei   | Praktik toleransi     | Warga Desa Mutisari  |
| 24 | Prakarsa IAIN Purwokerto Perkuat Ukhuwah Sunny - Syiah             | Di tengah gempuran masif gerakan takfiri di berbagai penjuru Nusantara yang begitu bernafsu mengoyak ukhuwah, kabar menyejukkan datang dari Purwokerto. Ratusan mahasiswa-mahasiswi IAIN Purwokerto dengan penuh antusias hadir menyekali ruang auditorium kampus mereka dalam Seminar "Titik Temu Sunni-Syiah, Memperkokoh Islam Nusantara" yang digagas oleh Gusdurian Bayumas, Selasa, (12/05/15). | Banyumas           | Jawa Tengah | Mei   | Promosi keragaman     | IAIN Purwokerto      |
| 25 | Uskup Agung: Kerukunan Beragama Harus Tetap Ditegakkan             | Uskup Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan kerukunan beragama di Indonesia harus tetap ditegakkan yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 pada 14 Mei 2015                                                                                                                                                                                                           | Jakarta Pusat      | DKI Jakarta | Mei   | Promosi keragaman     | Uskup Agung Jakarta  |
| 26 | Partisipasi Umat Kristen Tinggi Sukseskan MTQ Maluku               | Gubernur Maluku, Said Assagaff menyatakan, partisipasi umat Kristen dinilai tinggi dalam rangka sukseskan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVI tingkat provinsi setempat diselenggarakan di Piru, ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada 16 - 24 Mei 2015.                                                                                                                                  | Seram Bagian Barat | Maluku      | Mei   | Praktik toleransi     | Gubernur Maluku      |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |      |                             |                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 27 | Para Penghayat Boleh Cantumkan Kepercayaan-nya di E-KTP             | Penganut agama atau kepercayaan di luar 6 agama resmi boleh mencantumkan agama atau kepercayaannya di KTP. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (21/05/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jakarta Pusat               | DKI Jakarta    | Mei  | Kebijakan non-diskriminatif | Menteri Dalam Negeri                         |
| 28 | Tradisi Nyadran Jelang Ramadan di Bantul Ini Digelar Lintas Agama   | Tradisi nyadran merupakan tradisi masyarakat Jawa yang selalu diadakan menjelang bulan Ramadan. Warga Sorowajan, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta menggelar tradisi nyadran lintas agama yang diawali dengan kirab pada 07 Juni 2015. Dalam acara ini ada ritual berdoa oleh tokoh-tokoh agama secara bergantian dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen.                                                                                                                               | Bantul                      | Yogyakarta     | Juni | Praktik toleransi           | Warga Sorowajan                              |
| 29 | FKUB Kepulauan Sangihe Gelar Kemah Pemuda Lintas Isman              | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, menggelar kemah pemuda lintas iman. Kegiatan ini digelar di Kolongan Akembawi, Tahuna Barat, 11-13 Juni 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | Juni | Promosi keragaman           | FKUB Kab. Kepulauan Sangihe                  |
| 30 | DKI Ancam Cabut Izin Ormas yang Lakukan "Sweeping"                  | Pemprov DKI Jakarta mengancam akan mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi organisasi masyarakat (ormas) yang nekat melakukan aksi sweeping tempat-tempat hiburan di Ibu Kota selama bulan Ramadan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Ratiyono pada 18 Juni 2015. Ia mengatakan, larangan sweeping oleh ormas sudah secara resmi dilakukan pihak Polri. Tidak hanya untuk Jakarta, tetapi untuk seluruh Indonesia. | Jakarta Pusat               | DKI Jakarta    | Juni | Promosi non-diskriminatif   | Pemprov DKI                                  |
| 31 | PGI: Umat Kristiani Harus Toleran Selama Ramadan                    | Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada 18 Juni 2015 menyerukan kepada semua umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk toleransi dan menghargai pelaksanaan ibadah puasa selama Ramadan.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jakarta Pusat               | DKI Jakarta    | Juni | Promosi keragaman           | Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) |
| 32 | Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah | Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia pada 18 Juni 2015, mengatakan, pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang akan dihapus adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.                                     | Jakarta Pusat               | DKI Jakarta    | Juni | Promosi keragaman           | Akademisi, tim ahli kepresidenan             |
| 33 | Kapolda Jabar Larang Penyegehan Rumah Ibadah                        | Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Moechgiyanto melarang jajarannya untuk melakukan penyegehan rumah ibadah apabila ada sengketa terkait rumah ibadah karena yang berwenang melakukan penyegehan tersebut adalah pemerintah daerah melalui putusan pengadilan (19/06/2015)                                                                                                                                                                                                                 | Bandung                     | Jawa Barat     | Juni | Promosi non-diskriminatif   | Polisi, Kapolda Jawa Barat                   |
| 34 | Tenda Kerukunan Beragama di Serambi Madinah Gorontalo               | Di Gorontalo, suara adzan berkumandang dari segala penjuru. Maka tak aneh, jika Gorontalo lekat dengan sebutan Serambi Madinah. Apalagi, mayoritas penduduknya beragama Islam. Meski begitu, toleransi antarumat beragama tetap dijunjung tinggi. Umat Muslim hidup berdampingan dengan Kristiani, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu sebagaimana ditulis media pada 26 Juni 2015.                                                                                                   | Gorontalo                   | Gorontalo      | Juni | Praktik toleransi           | Warga Gorontalo                              |

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |      |                             |                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|-----------------------------|------------------------------------|
| 35 | Yayasan Hakka Aceh Bagi Paket Sembako untuk Kaum Dhuafa                            | Yayasan Hakka Aceh melakukan aksi sosial pembagian 1.500 paket sembako Ramadhan di Kota Banda Aceh, Minggu (05/07/2015). Kegiatan ini bertujuan membantu para warga tak mampu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ketua Yayasan Hakka Aceh, Aky, menyebutkan pembagian sembako ini sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu. "Ini hanya sebagai wujud kepedulian kami warga Tionghoa yang ada di Kota Banda Aceh untuk warga lainnya yang sedang menjalankan ibadah puasa, terutama warga kota yang kurang mampu. Ini adalah aksi kemanusiaan saja," jelas Aky saat membagikan sembako paket Ramadhan di Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Banda Aceh      | Aceh        | Juli | Praktik toleransi           | Yayasan Hakka Aceh                 |
| 36 | Ahok Izinkan Ahmadiyah Bangun Masjid Jika Ajukan Izin Resmi                        | Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memanggil walikota Jakarta Selatan terkait aksi penyegehan rumah ibadah milik Jemaat Ahmadiyah di Tebet. Ahok, begitu dia disapa mengatakan, seharusnya masyarakat bisa saling menghormati selama kegiatannya tidak mengganggu. "Saya katakan, siapa pun, tempat ibadah, kepercayaan apapun selama dia tidak mengganggu kalaupun itu sudah berjalan puluhan tahun ya jangan disegel," katanya pada Jumat 10/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Juli | Kebijakan non-diskriminatif | Gubernur DKI Jakarta               |
| 37 | Anggota DPR Nya-takan Semua Warga Berhak Mendapat KTP Tidak Terkecuali Anggota JAI | Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin meminta semua pihak dapat melakukan komunikasi bersama mengenai perlakuan berbeda terhadap jamaah Ahmadiyah. Perlakuan berbeda itu mengenai tidak memilikinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektrik bagi jamaah Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat. "Harus ada diskusi antara Mendagri, MUI dan Ahmadiyah soal itu putus tentang KTP dan bukan keyakinan. Kasihan mereka," ujar Yanuar di Kuningan, Rabu (15/07/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kuningan        | Jawa Barat  | Juli | Advokasi keyakinan          | Anggota DPR RI FKB Yanuar Prihatin |
| 38 | Ahok Nilai SKB 3 Menteri Langgar UUD 45                                            | Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri soal eksistensi Ahmadiyah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Basuki yang disapa Ahok, setiap Warga Negara Indonesia berhak menjalankan agamanya masing-masing. "Surat itu melanggar toleransi beragama di Indonesia," katanya kepada media Kamis, 16 Juli 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Juli | Advokasi keyakinan          | Gubernur DKI Jakarta               |
| 39 | Bila Mahasiswa Buddha, Katolik Ikut Aktivitas Ramadan                              | Sebanyak 40 orang mahasiswa Katolik, Kristen, Buddha, serta Hindu mengikuti aktivitas Ramadan di sebuah pesantren di kota Malang, Jawa Timur. Mereka tinggal dengan keluarga Muslim dengan harapan dapat memperkuat toleransi. Selama dua hari, para mahasiswa itu menginap dan mengikuti aktivitas para santri saat Ramadan, seperti mengaji, sahur dan buka puasa. Di sebuah siang, sembilan mahasiswa non-muslim duduk bersila di dalam masjid Pesantren Sabilurrosyad, Malang. Mereka meriung berbaur dengan para santri, menyimak dan mendengarkan pengajian. Mahasiswa Universitas Machung Malang, Yofranny Winardi, yang beragama Katolik, mengaku tertarik mengikuti acara itu untuk lebih mengenal agama Islam. "Sore itu ikut mengaji jam empat, sampai buka puasa bersama. Makan bareng di baki, satu baki orang empat, lima secara bareng-bareng (bersama)," kata Yofranny Winardi kepada media pada 16 Juli 2016 | Malang          | Jawa Timur  | Juli | Praktik toleransi           | Mahasiswa lintas Agama             |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |                   |                            |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------------|----------------------------|
| 40 | Umat Muslim di Malang Salat led di Halaman Gereja          | <p>Karena jumlah jamaah yang hendak menunaikan salat Idul Fitri di Masjid Agung Jami, Kota Malang, Jawa Timur, mencapai ribuan orang, sebagian di antara mereka membentangkan sajadah di halaman Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus. eralas kertas koran dan sajadah mereka khusyuk menunaikan salat sampai berakhir khotbah berakhir. Halaman gereja yang terletak sekitar 100 meter dari masjid ini dipenuhi jamaah perempuan. Sedangkan jamaah laki-laki berada di depan gerbang sepanjang Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Pengurus Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, Yohanes Kristiawan, mengaku menyiapkan halaman gereja untuk ibadah salat led sejak pukul 05.00 WIB. Pintu gerbang gereja dibuka lebar untuk umat muslim. Begitu pintu gerbang halaman gereja dibuka, ribuan jamaah berduyun-duyun masuk. Mereka menggelar kertas koran dan sajadah untuk alas salat. Ketua Takmir, Kiai Haji Zainudin Abdul Muchid saat memberi sambutan sebelum salat pada 17 Juli 2015 menjelaskan bahwa komunikasi dan sikap toleransi terjalin antar pemuka agama. Jika pimpinan harmonis, menurutnya, jemaah juga mengikuti. Salah satu bentuk kerukunan ialah saat gereja ulang tahun, takmir masjid mengirim ucapan ulang tahun.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Malang    | Jawa Timur | Juli | Praktik toleransi | Umat Muslim & Kristiani    |
| 41 | Tokoh Agama Gorontalo Deklarasikan Kerukunan Umat Beragama | <p>Enam tokoh agama di Gorontalo mendeklarasikan kesepakatannya dalam mengokohkan kerukunan antar umat beragama, dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kantor Gubernur, Senin, 27 Juli 2015. Tokoh agama Islam diwakili oleh Abdul Rahman Bachmid, Albertus Imbar mewakili Katholik, Jemy dari Kristen, I Wayan Sudiarta dari Hindu, Herry Liando dari Budha dan Jefry Gozali mewakili Konghucu. Selain itu, sejumlah mahasiswa, unsur kejaksaaan, TNI dan Polri juga turut serta dalam deklarasi tersebut. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo Abdul Rahman Bachmid mengatakan deklarasi tersebut berisi pernyataan penolakan terhadap intervensi pihak manapun dalam memelihara dan menjaga toleransi antar agama dan antar umat beragama. "Kami juga mengajak masyarakat Gorontalo untuk mencegah dan melawan tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama, serta menolak ajaran terorisme," tukasnya. Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, seluruh tokoh tersebut juga menyatakan terorisme dan radikalisme tidak ada dalam ajaran agama manapun, sehingga mengutuk segala bentuk penyerangan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Cara untuk menjaga toleransi tersebut, kata dia, dengan memegang teguh ajaran agama masing-masing dan menumbuhkan sikap saling menyayangi dan menghargai. Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan sebelumnya daerah tersebut meraih predikat sebagai daerah teraman di Indonesia dalam kacamata Kementerian Polhukam. "Seharusnya ini menjadi penyemangat bagi masyarakat Gorontalo bahwa ternyata selama ini kita mampu menjaga toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Saya berharap predikat tersebut selamanya untuk Gorontalo dan seluruh daerah di Indonesia," ujarnya. Ia menambahkan, rasa aman dan damai adalah kebutuhan setiap umat beragama dan selama ini kondisi tersebut selalu terpenuhi di Gorontalo</p> | Gorontalo | Gorontalo  | Juli | Praktik toleransi | Enam Tokoh Agama Gorontalo |



|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |      |                       |                         |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-----------------------|-------------------------|
| 42 | Umat Muslim di Malang Salat led di Halaman Gereja      | Karena jumlah jamaah yang hendak menunaikan salat Idul Fitri di Masjid Agung Jami, Kota Malang, Jawa Timur, mencapai ribuan orang, sebagian di antara mereka membentangkan sajadah di halaman Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus. Pengurus Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, Yohanes Kristiawan, mengaku menyiapkan halaman gereja untuk ibadah salat led sejak pukul 05.00 WIB. Pintu gerbang gereja dibuka lebar untuk umat muslim. Begitu pintu gerbang halaman gereja dibuka, ribuan jamaah berduyun-duyun masuk. Mereka menggelar kertas koran dan sajadah untuk alas salat. "Jamaah tak hanya warga Malang, ada yang berasal dari daerah lain sekitar Malang," kata Ketua Takmir, Kiai Haji Zainuddin Abdul Muchid saat memberi sambutan sebelum salat pada 17 Juli 2015 menjelaskan bahwa komunikasi dan sikap toleransi terjalin antar pemuka agama. Jika pimpinan harmonis, menurutnya, jemaah juga mengikuti. Salah satu bentuk kerukunan ialah saat gereja ulang tahun, takmir masjid mengirim ucapan ulang tahun. | Malang   | Jawa Timur  | Juli | Praktik toleransi     | Umat Muslim & Kristiani |
| 43 | Muhammadiyah Minta Warga Papua Jaga Toleransi Beragama | Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta umat Islam menahan diri terkait dengan kasus pembakaran dan penyerangan yang dialami jamaah saat melakukan salat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, Jumat 17 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WIB. Muhammadiyah juga menganjurkan agar warga Papua menjaga toleransi antar-umat beragama.<br>Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada media mengatakan bahwa massa yang menyerang umat Islam ketika sedang melaksanakan salat Idul Fitri dan diikuti dengan pembakaran masjid, telah mencederai semangat toleransi antar-umat beragama di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jakarta  | DKI Jakarta | Juli | Menghormati keyakinan | Muhammadiyah            |
| 44 | Presiden GIDI Imbau Umatnya Tidak Lakukan Aksi Balasan | Presiden Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikmbo mengimbau umatnya supaya tidak melakukan aksi balasan terkait tewasnya Jemaat GIDI, Endi Wanimbo (15), dalam kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7). Dalam siaran pers yang disebarakan kepada media, 11 orang korban dinyatakan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dok 2 Jayapura dan di RSUD Wamena. Setelah evakuasi dilakukan, bupati Tolikara, DPRD kabupaten Tolikara, kapolres, tokoh agama dan masyarakat melakukan pawai damai mengelilingi Tolikara untuk mengajak masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa dan sampai saat ini aman terkendali. Dorman juga menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak melarang umat Islam di Tolikara untuk menjalankan Salat Id kemarin. Dugaan pembakaran musala secara sengaja oleh GIDI juga ditolaknya dengan keras.                                                                                                                                         | Tolikara | Papua       | Juli | Menghormati keyakinan | Presiden GIDI           |



|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |      |                             |                         |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| 45 | Kepala Suku Saat Tolikara Membara: Selamatkan Rumah Ustadz   | Kabar adanya kerusakan di Distrik Karubaga, Tolikara, Papua, menyebar secepat api yang melalap deretan bangunan di daerah itu. Situasi genting pada Hari Raya Idul Fitri (17/07/2015) itu terdengar hingga distrik tetangga. Neri Yikwa, Kepala Suku Yikwa penganut Kristen dari Distrik Pogoneri yang bersebelahan dengan Distrik Karubaga, mendengar rumah karibnya, Ustad Ali Mukhtar, ikut terbakar. Neri segera menyuruh sekelompok pemuda adat untuk membantu pemadaman api. "Coba kau padamkan (api) di rumah Bapak Ali," ujar Neri memberi perintah kepada anak buahnya.                                                                                                                                                                                                                                     | Tolikara | Papua       | Juli | Praktik toleransi           | Umat Muslim & Kristiani |
| 46 | Rumah Kristen Tolikara Jadi Tempat Pengungsi Muslim          | Ustad Ali Mukhtar menjadi di mana ia menjadi korban kerusakan saat Hari Raya Idul Fitri (17/07/2015) di Distrik Karubaga, Tolikara, Papua. Rumah dan kiosnya yang terbuat dari kayu, hangus dilalap api bersama sejumlah bangunan lain di wilayah itu. Namun kemudahan menyertainya, hasil dari persahabatan umat Islam dan Kristen Tolikara yang dibangun berpuluh tahun. Ali tak perlu kebingungan ke sana kemari mencari tempat penampungan. Warga Kristen setempat yang juga putra daerah bertrauma ketua adat, Fiktor Kogoya, membuka lebar pintu rumahnya untuk Ali. Fiktor dengan senang hati menampung Ali hingga rehabilitasi rampung seluruhnya di Tolikara. Rumah Fiktor tak jauh dari lokasi musala yang terbakar saat kerusakan dan hanya berjarak sekitar 50 meter dari Komando Rayon Militer Tolikara | Tolikara | Papua       | Juli | Praktik toleransi           | Umat Kristiani          |
| 47 | Pintu Gereja di Bantul Dibakar, Tetangga Muslim Padamkan Api | Warga di Dusun Saman, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahu-membahu memadamkan api yang berkobar di depan pintu Gereja Baptis Indonesia Saman, Senin dini hari (20/07/2015). Tetangga yang pertama kali mengetahui ada api di gereja itu muslim. Rumahnya memang di sebelah gereja. Dia langsung memberi tahu warga lain dan mereka bersama-sama memadamkan api sebagaimana keterangan kepolisian setempat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bantul   | Yogyakarta  | Juli | Praktik toleransi           | Warga Muslim Bantul     |
| 48 | Kemdagri akan Batalkan Perda Diskriminatif                   | Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengecek kembali sejumlah peraturan daerah (perda) yang cenderung diskriminatif. Adanya dugaan perda tentang tata cara beribadah yang melarang penggunaan alat pengeras suara saat ibadah berlangsung di Tolikara, Papua, juga tak luput dari pantauan Kemdagri. "Perda-perda akan kami cek ulang," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (20/7). Dia menegaskan, sejak dirinya menjabat sebagai mendagri, tidak pernah ada perda di Tolikara yang mengatur tata cara beribadah.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jakarta  | DKI Jakarta | Juli | Kebijakan non-diskriminatif | Mendagri                |

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |      |                           |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|---------------------------|-------------------------|
| 49 | Pendeta GIDI dan Imam Mesjid Baku Peluk di Tolikara                        | Langkah perdamaian diambil oleh warga di Tolikara, Papua. Pemimpin Umat Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang dipimpin Ketua Klasis Toli, Pendeta Yunus Wenda dan yang mewakili warga lainnya Ustad H. Ali Muktar saling bersalaman di lapangan Koramil Tolikara, Rabu (22/07/2015). Baku peluk dan salaman itu terjadi setelah kedua wakil warga itu saling menyampaikan kalimat permohonan maaf. Peristiwa simbol perdamaian ini disaksikan Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo dan jajaran pimpinan daerah Kabupaten Tolikara. "Kami minta maaf telah menyakiti hati saudara-saudara kami umat muslim. Ini karena kekhilafan untuk itu mohon permasalahan ini cukup disini saja. Kita harus bersatu kembali seperti yang lalu," kata Pdt Yunus Wenda, seperti yang diberitakan media. Ucapan itu langsung disambut baik Ustad Ali Muktar. Ali juga memohon maaf atas apa yang sudah terjadi, dan dia berharap kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di Tolikara.                                                                                     | Tolikara | Papua       | Juli | Praktik toleransi         | Umat Muslim & Kristiani |
| 50 | Tokoh Lintas Agama Sikapi Insiden Tolikara dengan Kesepakatan Damai        | Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forko-pimda) Riau bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyepakati perjanjian toleransi antarumat beragama. Kesepakatan ini dilakukan guna menangkai eksesi insiden di Tolikara, Papua. "Isinya, membantu jajaran pemerintah daerah dan kepolisian untuk menjaga keamanan serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian mengusut kasus tersebut. Serta tidak akan terpengaruh terhadap insiden kasus Tolikara," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, Kamis, 23 Juli 2015. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat setempat. Mereka yang hadir di antaranya, Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Nurendi; Kapolda Riau diwakili Dir Intelkam Polda Riau, Kombes Jati Witoyo; Kepala Badan Kesbangpolinmas (Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat) Riau, Nizhamul; Kepala BIN Daerah, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Tarmizi Tohor; serta tokoh lintas agama, termasuk MUI dan FKUB. | Riau     | Riau        | Juli | Promosi non-diskriminatif | Forkopimda, MUI, FKUB   |
| 51 | Said Aqil Siradj: Islam Nusantara, Islam yang Ramah, Inklusif, dan Solutif | Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj menjelaskan, tema dalam Mukhtamar ke-33 NU yaitu tentang gabungan kekhasan Islam dengan nilai-nilai budaya lokal di Indonesia. Tema tersebut dipilih lantaran ada sinergi yang terbangun dari keduanya di Indonesia. Acara lima tahunan tersebut mengangkat tema "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia". "Jadi, kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang ada. Justru sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya tradisi dan budaya yang ada secara bertahap," ujar Aqil di Gedung PBNU Pusat, Jakarta, Jumat (24/07/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jakarta  | DKI Jakarta | Juli | Promosi keragaman         | PBNU                    |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |         |                           |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|
| 52 | Din Syamsuddin Ingatkan Pentingnya Menjaga Toleransi                         | Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengingatkan kepada masyarakat untuk bisa terus menjaga toleransi terutama berkaitan dengan agama. Ia mengaku bersyukur Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang merupakan kunci penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat majemuk. Din bahkan meminta IARC untuk bisa terus menjaga konsistensi menjadi kekuatan pemersatu bangsa. "Harus terus optimis. Saya harap acara seperti ini bisa meningkatkan toleransi di masyarakat," kata Penasihat IARC itu dalam Halal Bi Halal Perhimpunan Indonesia untuk Keagamaan dan Kebudayaan (IARC) di Jakarta pada Ahad (26/07/2015).                                                                                                                                                                                                                                                              | Jakarta         | DKI Jakarta | Juli    | Promosi keragaman         | Ketua Umum MUI |
| 53 | Jaga Kerukunan Umat Beragama, Polres Jaksel Gelar Temu Tokoh Lintas Agama    | Jajaran Polres Jakarta Selatan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar diskusi terbuka bersama tokoh lintas agama se-Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Wahyu Hadiningrat mengatakan hubungan antarumat beragama di wilayah Jakarta Selatan aman, khususnya setelah peristiwa Tolikara. "Saya perlu sampaikan, hasil Operasi Ketupat sampai tanggal 25 Juli kemarin cukup kita apresiasi. Tidak ada kejadian yang menonjol, baik itu kejahatan dan kekerasan yang bersifat massa. Tentu itu semua berkat kerja sama kita semua, termasuk peran tokoh agama di Jakarta Selatan," kata Wahyu di Gedung Perindustrian, Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/07/2015). Kondisi tersebut ditanggapi positif oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi. Dia meminta, isu agama yang terjadi di Tolikara tidak dibesar-besarkan oleh semua pihak. | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Juli    | Promosi non-diskriminatif | Kepolisian     |
| 54 | Muhammadiyah Kritik Umat Islam yang Suka Mengkafirkan dan Tanamkan Kebencian | Muhammadiyah mencermati fenomena sosial keagamaan di masyarakat, khususnya umat muslim. Ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini menyangkan ada umat Islam yang kerap melempar tuduhan kafir. "Di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tuduhan sesat, kafir, liberal dan tuduhan lainnya," demikian bunyi penggalan awal salah satu rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah yang dikutip media, Jumat (07/08/2015). Muhammadiyah menegaskan kecenderungan takfiri atau (suka mengkafirkan -red) bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, tawasuth, dan toleransi.                                                                                                                                                                                                                | Jakarta         | DKI Jakarta | Agustus | Deradikalisasi            | Muhammadiyah   |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |           |                       |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | Teladan Toleransi dari Desa Pengaringan                | Desa Pengaringan Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen merupakan sebuah desa yang patut untuk menjadi contoh toleransi antar umat beragama. Masyarakat di desa tersebut dapat rukun dan harmonis meski mereka berbeda keyakinan. Terdapat sekitar 500 penduduk di desa yang terletak di kawasan pegunungan tersebut. Sepertiga dari jumlah penduduk merupakan penganut agama Kristen. Sedangkan dua pertiga lainnya beragama Islam. Kendati demikian sepanjang sejarah belum pernah tercatat konflik lintas agama. Penduduk desa Pengaringan tampak harmonis dan saling membantu satu sama lainnya. Pada saat Umat Kristen membangun gereja, warga Muslim dengan semangat bergotong-royong untuk membantu. Hal senada juga dilaksanakan oleh warga yang beragama Kristen, saat umat Islam membangun Masjid.                                                                                                                                                                 | Kebumen | Jawa Tengah | Agustus   | Praktik toleransi     | Warga Desa Pengaringan                                                         |
| 56 | Polda Papua Jamin Keamanan Salat Idul Adha di Tolikara | Polri akan berkoordinasi dengan TNI untuk mengamankan pelaksanaan salat Idul Adha di Tolikara, Papua, yang jatuh pada akhir bulan ini. Kepolisian tak ingin kecolongan lagi seperti saat terjadi aksi kekerasan dalam pelaksanaan salat Idul Fitri, Juli lalu. "Kami akan rapat dulu dengan Panglima (TNI)," kata Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Watterpauw, Selasa (08/09/2015). Polda Papua menjamin keamanan pelaksanaan ibadah di wilayah tersebut. Apalagi jika koordinasi sudah dilakukan dengan TNI, sebab dalam koordinasi tersebut Polri akan mendapat tambahan personel pengamanan. Pengamanan kegiatan keagamaan merupakan kewajiban petugas Kepolisian seperti yang diatur dalam undang-undang. "Di negara ini sudah diatur hak kebebasan beragama untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Salat Idul Adha merupakan kewajiban muslim yang harus dijalankan sehingga harus diamankan tanpa terkecuali," kata Paulus. | Papua   | Papua       | September | Menghormati keyakinan | Kepolisian                                                                     |
| 57 | Kerukunan Umat Beragama di NTT                         | Ketua Umum Panitia Sidang Sinode GMIT ke-33, Ibrahim Agustinus Medah mengatakan, kerukunan hidup antarumat beragama di NTT terbina sudah sejak dahulu dan sudah berjalan bertahun-tahun lamanya yang patut dijadikan contoh kerukunan di Indonesia. "Di Rote Ndao dan bahkan di daerah-daerah lain di NTT, bangunan gereja berhimpitan dengan bangunan masjid. Dalam acara pembukaan ini saja, umat Islam dan umat dari gereja Katolik, juga turut serta dalam tarian-tarian dan paduan suara. Jika semua umat beriman meskipun berbeda namun hidup rukun, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya," kata Medah pada pembukaan Sidang Sinode GMIT ke-33 di Baa, ibukota Kabupaten Rote Ndao, Minggu (20/09/2015) kemarin.                                                                                                                                                                                                                                               | Kupang  | NTT         | September | Promosi keragaman     | Ketua Umum Panitia Sidang Sinode GMIT ke-33 di Kupang, Ibrahim Agustinus Medah |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |           |                       |               |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 58 | Relawan Non-Muslim Bantu Pengamanan Idul Adha           | Puluhan relawan yang dibentuk oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika, dilibatkan dalam mengamankan Hari Raya Idul Adha di Kota Timika. Relawan ini terdiri dari pemuda/pemudi Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Ketua FKUB Mimika, Ignasius Adi mengatakan, para relawan ini nantinya akan mengamankan pelaksanaan malam takbir di sejumlah masjid dan pelaksanaan Salat Id yang berlangsung di sejumlah lapangan. "Salah satunya di lapangan Timika Indah yang menjadi pusat Salat Id untuk Kabupaten Mimika," katanya di Timika, Rabu (23/9/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Timika   | Papua      | September | Menghormati keyakinan | FKUB          |
| 59 | GIDI Sumbang 5 Ekor Sapi untuk Idul Adha di Tolikara    | Tidak seperti isu beredar terkait hari Idul Adha di Distrik Karubaga Tolikara, ibadah berjalan lancar dan khidmat. Ditambah lagi kehadiran Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang turut berlebaran di Tolikara. Warga muslim Tolikara lainnya melaksanakan solat id di Musala Khairul Ummah, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, mulai pukul 07.15 WIT, Kamis (24/9/2015). Menurut Khofifah, didirikannya kembali musala yang sempat hangus terbakar merupakan wujud telah membaiknya toleransi umat beragama di Tolikara. Ia berharap toleransi tersebut bisa terus dijaga untuk ke depannya. Tak hanya itu, wujud damai lainnya di Tolikara terlihat dari pihak Gereja GIDI yang menyumbang 5 ekor sapi untuk kurban ke pengurus musala Khairul Ummah. Salah satu pengurus musala, Ali Muchtar, menyebut daging-daging sapi tersebut jika sudah dipotong akan dibagikan secara merata ke masyarakat. "Kurban akan dibagikan kepada seluruh warga secara merata. Sumbangan ini (dari GIDI) kami terima dan Insya Allah akan kami salurkan juga kepada umat-umat kristen," tutur ustad Ali. | Tolikara | Papua      | September | Praktik toleransi     | GIDI Tolikara |
| 60 | Warga Syiah yang Meninggal Diizinkan Kembali ke Sampang | Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengizinkan jenazah Busidin, 65 tahun, dikubur di kampung halamannya di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben. Busidin adalah satu di antara ratusan warga yang terusir dan mengungsi ke Sidoarjo, juga di Jawa Timur, karena konflik antara Syiah dan Sunni di daerah tersebut pada 2012.<br><br>"Ini kan meninggal, saya kira boleh saja dikuburkan di desanya kalau keluarga mau," kata Wakil Bupati Sampang Fadilah Boediono kepada media, Minggu, 27 September 2015. Sebelumnya, Busidin, warga Syiah Sampang, meninggal karena penyakit komplikasi yang dideritanya di pengungsian di Sidoarjo, Jawa Timur pada hari yang sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sampang  | Jawa Timur | September | Menghormati keyakinan | Wakil Bupati  |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |           |                             |                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|
| 61 | Sumsel akan Bangun Tempat Ibadah Umat Hindu                      | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membangun tempat beribadah bagi umat Hindu berupa Pura di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Karang Anyar Palembang. Pembangunan tempat beribadah tersebut tidak akan menggunakan dana APBD melainkan dana luar negeri, kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Palembang, Minggu. Ia mengatakan, Pemprov Sumsel mengupayakan pendanaannya dari organisasi dunia UNESCO. Dibangunnya Pura tersebut, menurut dia, agar umat Hindu yang ada di Sumsel dapat melaksanakan ibadah terpusat di TPKS. Selain itu juga guna mendukung agar kelestarian hubungan antar umat beragama semakin terjalin di Sumsel. "Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada permasalahan antarumat beragama di provinsi ini dan hubungan tetap harmonis," kata Alex pada 27 September 2015 seraya menambahkan bahwa Pemprov berupaya agar semua agama di Sumsel mempunyai tempat ibadah dengan fasilitas lengkap. | Palembang   | Sumatera Selatan   | September | Kebijakan non-diskriminatif | Pemprov Sumsel                   |
| 62 | Desa Wonorejo, Satui, Kalsel Jadi Contoh Kerukunan Umat Beragama | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Satui Desa Wonorejo layak menjadi Inspirasi bagi desa lain, baik lingkup Kalimantan Selatan maupun lingkup secara Nasional dalam hal menjaga kerukunan umat beragama yang sudah dilakukan oleh desa tersebut..."Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 17 suku, dari sekian suku tersebut terdapat keanekaragaman Budaya serta berbagai perbedaan Agama, namun mereka tetap hidup rukun dengan suasana kebhathinan serta memegang semangat persaudaraan dalam satu wilayah, yakni salah satunya adalah Desa Wonorejo," kata Wahyudin saat mengukuhkan pengurus Desa Binaan Kerukunan di Desa Wonorejo, Sabtu (09/10/15).                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Oktober   | Praktik toleransi           | Warga Desa Wonorejo, Tanah Bumbu |
| 63 | Maluku Tuntas dalam Kerukunan                                    | Seluruh komponen agama di Maluku terlibat dalam pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Nasional XI di Kota Ambon, Maluku. "Saya bangga, bahwa momentum Pesparawi bukan milik orang Kristen. Tetapi Pesparawi menjadi milik semua umat beragama yang ada di Maluku dan Indonesia. Saya yakin, peserta dari 33 Provinsi, telah mendapatkan kesan yang berbeda tentang Ambon Manise," kata Gubernur Maluku Assagaff (10/10/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kota Ambon  | Maluku             | Oktober   | Praktik toleransi           | Masyarakat Maluku                |
| 64 | Maluku Rencanakan Bangun Kampung Kerukunan Umat Beragama         | "Saya menjawab memprogramkan perkampungan yang ditempati semua komunitas agama dan suku dari Papua hingga Banda Aceh, makanya direspon Kepala Negara dengan kesediaannya untuk nantinya meresmikan," tegas Gubernur Maluku, di Ambon, Senin (12/10/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kota Ambon  | Maluku             | Oktober   | Promosi Keragaman           | Pemprov Maluku                   |
| 65 | Membangun Komitmen KUB di Aceh Tengah                            | Segenap pimpinan umat beragama di Kabupaten Aceh Tengah bertekad untuk saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Komitmen tersebut tercetus dalam pertemuan yang diwadahi Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), di Gedung UMMI Pendopo Bupati Aceh Tengah, Jumat 16 Oktober 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aceh Tengah | Aceh               | Oktober   | Promosi keragaman           | FKUB Aceh tengah                 |

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |         |                   |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 66 | Toleransi Kehidupan Beragama di Kampung Buyat Pante, Dusun 5, Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara | Tingkat toleransi kehidupan beragama di Kampung Buyat Pante, Dusun 5, Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara, ini sungguh terjaga. Hal ini tecermin dari bangunan masjid dan gereja yang didirikan di satu halaman tanpa pagar pembatas, bahkan nyaris berimpitan. Kubah Masjid An-Namira yang berhadapan dengan menara Gereja GMIM Jemaat Lakban seakan menyampaikan pesan bahwa kerukunan antar kedua pemeluk agama yang dianut sebagian besar warga di kampung itu menjadi pemersatu. Warga di sana sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. "Bukan hanya tersimbolisasi dari kedua bangunan itu, tetapi selama ini saya tak pernah mendapati adanya gesekan horizontal atau hal lain di kedua pemeluk agama," ujar Pudin, warga Ratatotok, Minggu (11/10/2015). | Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara | Oktober | Praktik toleransi | Warga Desa Buyat Pante                                      |
| 67 | Tali Akrap Gelar Dialog Lintas Agama                                                                                       | Mewujudkan toleransi antar umat beragama dengan sejati tak cukup membaca buku khususnya bagi akademisii, tapi perlu berinteraksi secara langsung dan periodik antar umat beragama. Dalam rangka membumikan toleransi tersebut Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap) bersama mahasiswa STAIN Kudus menyelenggarakan dialog dengan umat Budha di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, 17 Oktober 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kudus             | Jawa Timur     | Oktober | Praktik toleransi | Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap) |
| 68 | Prasasti Kerukunan Umat Hindu dan Islam di Karangasem                                                                      | Banjar Bukit Tabuan, Desa Bukit, Kecamatan/ Kabupaten Karangasem, Bali memiliki tingkat kerukunan antar umat beragama sejak abad 16 Masehi. Meski berbeda keyakinan, namun umat Hindu dan Islam di Banjar Bukit Tabuan tampak seperti saudara. Mereka tak pernah berselisih. Warga hidup berdampingan di wilayah yang ada di atas Pegunungan Seraya. Kerukunan antar umat beragama ini dipersatukan prasasti yang diyakini sakral sebagaimana dituliskan media pada 19 Oktober 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Karangasem        | Bali           | Oktober | Praktik toleransi | Masyarakat Banjar Bukit Tabuan                              |
| 69 | Pemkot Surakarta Gelar Jambore KUB                                                                                         | Pemerintah Kota Surakarta mengadakan Jambore Kerukunan Antar Umat Beragama bagi pelajar dari berbagai sekolah mengikuti Jambore Kerukunan Umat Beragama di halaman Makorem 074/Warastratama, Jl. Slamet Riyadi, Solo, Rabu (21/10/2015). Kegiatan selama tiga hari dua malam (21-23 Oktober 2015) diikuti oleh peserta Jambore dari 100 remaja beragama Islam, 40 remaja Kristen, 20 remaja Katolik, 19 remaja beragama Hindu, 11 remaja beragama Budha dan 10 remaja Konghuchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kota Surakarta    | Jawa Tengah    | Oktober | Promosi keragaman | Pemkot Surakarta                                            |
| 70 | Cerita Kerukunan Umat Beragama di Hari Santri                                                                              | Abdurrahman atau akrab disapa Abah Dur yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Malang bercerita tentang kerukunan antar umat beragama yang terbina di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Kabupaten Malang. Untuk menjalin persaudaraan dan menjalin kerukunan antar umat beragama wilayah Sumawe, juga menjaga kondusif nya wilayah Kabupaten Malang juga tidak lepas dari peran santri yang lahir dari madrasah atau lembaga pendidikan Islam di Sumawe," paparnya pada Rabu, 21 Oktober 2015. Ia berharap terjalin hubungan yang baik antar umat beragama khususnya di Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang juga menjadi kediamannya, terlebih dalam momentum peringatan hari santri yang akan jatuh 22 Oktober 2015.                                                                  | Kabupaten Malang  | Jawa Timur     | Oktober | Promosi keragaman | Politisi                                                    |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |          |                           |                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| 71 | Workshop Peran Media Menjaga Kerukunan Antar Agama                   | Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, Muhammad Mudhofir membuka Workshop Pemuda Lintas Agama dan Workshop Peran Media Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Hotel Santika Palu, Senin 26 Oktober 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palu       | Sulawesi Tengah | Oktober  | Promosi keragaman         | Kanwil Kementag Sulteng,              |
| 72 | FISIP UGM Promosikan Keragaman                                       | Meningkatnya intoleransi mengundang keprihatinan Youth Studies Centre (YouSure) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM dengan mengadakan Seminar bertajuk Pemuda Menolak Diskriminasi dan Intoleransi, 27 Oktober 2015.<br>"YouSure memiliki perhatian terhadap diskriminasi dan intoleransi. Harapannya, anak-anak muda melalui pemikiran-pemikiran kritisnya dapat menemukan gagasan-gagasan terbaru untuk mengatasi diskriminasi maupun intoleransi," kata Direktur YouSure, Dr. M. Najib Azca                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yogyakarta | Yogyakarta      | Oktober  | Promosi keragaman         | YouSure UGM                           |
| 73 | Festival Suran Massal Lintas Budaya dan Agama di Wonosobo            | Ada yang menarik dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Wonosobo. Untuk membangun kebersamaan antar umat beragama, bersama dengan Pemkab Wonosobo, Kodim 0707 dan Polres Wonosobo menggelar kegiatan Festival Suran Massal di Balai Desa Tanjunganom Kepil. Kegiatan ini dilangsungkan hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015. Kegiatan ini merupakan gagasan bersama dalam rangka kegiatan nyata mendukung Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM. Sesuai tema yang diambil: "Membangun Kerukunan melalui Kearifan Lokal".                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wonosobo   | Jawa Tengah     | Oktober  | Promosi keragaman         | Kapolres Wonosobo                     |
| 74 | Seminar KUB di Bengkulu Menyambut Pilkada Serentak                   | Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang, Kapolda Bengkulu Brigjend. Pol. H. M. Ghufro, MM, M.Si menginisiasi kerukunan Antar Umat Beragama AUB. Seminar dan penandatanganan nota kesepakatan kerukunan antar umat beragama berlangsung kemarin (27/10/2015), di Hotel Raffles City. Seminar dengan tema Kesepakatan Bersama AUB dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam Menjaga Solidaritas dan Keharmonisan Guna Memelihara Situasi Kondusif Wilayah Bengkulu, bertujuan agar tidak ada konflik pada pesta demokrasi yang sudah di depan mata.                                                                                                                                                                                                                                   | Bengkulu   | Bengkulu        | Oktober  | Promosi keragaman         | Kapolda Bengkulu                      |
| 75 | Polisi Meminta Pembatalan Rencana Deklarasi Anti-Syiah di Purwakarta | Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Purwakarta AKBP Truno Yudo Wisnu Andiko meminta Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) membatalkan rencana deklarasi anti-Syiah di Purwakarta karena dianggap berpotensi menyulut konflik di Purwakarta sementara selama ini tenang dalam rilis tertanggal 01 November 2015. Penilaian ini muncul dari hasil komunikasi dengan para ulama dan tokoh agama setempat terkait potensi eksekusi negatif dari acara yang berbau intoleransi tersebut. karenanya, Polres Purwakarta tak kunjung mengeluarkan izin untuk acara deklarasi tersebut. Pendapat senada juga disampaikan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0619 Purwakarta, Letnan Kolonel CZI Cahyadi Amperawan. Menurutnya, hal ini sebaiknya tak usah dilakukan karena tidak boleh mendiskriminasi suatu golongan. | Purwakarta | Jawa Barat      | November | Promosi non-diskriminatif | Polres Purwakarta & Dandim Purwakarta |



|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |          |                             |                                                     |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 76 | Pemkab Jamin Keamanan Pengikut Syiah di Purwakarta | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, menjamin keamanan terhadap pengikut aliran Syiah di Purwakarta, mengusul surat permintaan perlindungan dari para pengikut aliran Syiah atas deklarasi penolakan aliran tersebut di Purwakarta. Dedi, mengatakan pada 12 November 2015, dengan adanya surat tersebut pihaknya mengeluarkan surat edaran bahwa Pemkab Purwakarta bersama TNI dan Polri menjamin seluruh warga Purwakarta untuk dapat melaksanakan peribadatan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban.                                                                                                                                       | Purwakarta | Jawa Barat        | November | Kebijakan non-diskriminatif | Pemkab Purwakarta                                   |
| 77 | PBNU: Peringatan Asyura Bukan Kegiatan Sesat       | Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengatakan acara peringatan Asyura seperti yang dilakukan kaum Syiah bukanlah kegiatan sesat asalkan melakukannya tidak berlebihan sampai menyakiti diri sendiri pada Kamis (14/11/2015). Said Aqil juga mengajak semua umat Muslim di Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin, untuk menghormati kegiatan Asyura yang biasa diperingati kaum Syiah setiap pada 10 Muharam, tapi ia mengecam cara-cara mereka yang menyakiti diri-sendiri.                                                                                                                                                                                                                                      | Jakarta    | DKI Jakarta       | November | Menghormati keyakinan       | Ketua PBNU, KH. Said Agil Siradj                    |
| 78 | ISIS Bukan Islam, Aksi Barbar Harus Dilawan        | Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah menyatakan, aksi teror di Paris yang menewaskan ratusan orang pada Jumat (13/11) lalu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurutnya, teror yang dilakukan kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS) itu justru merendahkan makna jihad dan mereduksi Islam sebagai agama pembawa kedamaian. "ISIS telah memblokir makna suci jihad yang sesungguhnya. Jihad itu melindungi semua orang yang baik, jadi bukan malah membunuh orang," ujar Said melalui layanan pesan singkat kepada media, Minggu (14/11). Ia menambahkan, Islam tidak mengajarkan tindakan barbar. Sedangkan aksi ISIS di 6 lokasi di Paris itu jelas tindakan barbar yang tak menghargai kemanusiaan. | Jakarta    | DKI Jakarta       | November | Deradikalisasi              | Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah |
| 79 | Tokoh Dialog Antar-Agama Catatkan Rekor MURI       | Dialog 1.000 tokoh lintas agama damai Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2015 mencatatkan rekor Museum Republik Indonesia (MURI). Sertifikat Muri diserahkan Yusuf Ngadri kepada Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin yang disaksikan Gubernur Sultra Nur Alam dan Kepala Kantor Kementerian Agama Sultra Mohamad Ali Irfan di Kendari, Minggu (15/11/2015). Kerukunan antarumat beragama, menurut Menag, harus terus menerus dipupuk melalui berbagai kegiatan positif untuk kelanjutan harmonisasi dan toleransi antarumat beragama. Tidak ada perdamaian di dunia tanpa perdamaian antarumat beragama. Perdamaian kehidupan beragama disimbolkan dengan saling menghormati antarsatu dengan yang lain," ujar Menteri Agama.     | Kendari    | Sulawesi Tenggara | November | Promosi keragaman           | Tokoh lintas agama Sulawesi Tenggara                |

|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |          |                             |                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 80 | Warga Ahmadiyah Dipastikan Memilih                                                                                                      | omisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi semua lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih. Termasuk warga Ahmadiyah yang berada di Asrama Transito, Majeluk Mataram. Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshori mengatakan, komitmen tersebut sudah disampaikan di hadapan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) beberapa waktu lalu. "Kami berkomitmen memberikan hak pilih bagi seluruh wajib pilih termasuk warga Ahmadiyah. Banyak yang kami sampaikan kepada Komnas HAM termasuk mengenai politik uang," kata Aksar kepada wartawan pada 03 November 2015                                      | Lombok  | NTB        | November | Kebijakan non-diskriminatif | KPUD NTB                                     |
| 81 | Duta Perdamaian Galang Tanda Tangan Tolak Intoleransi                                                                                   | Para pemuda dan pemudi terlihat menggalang tanda tangan tolak intoleransi kepada setiap pengunjung dalam perayaan Hari Toleransi Internasional di Sumenep pada 16 November 2015. Aksi tersebut mendapat respon positif dari anak-anak sampai orangtua. Mereka ikut membubuhkan tanda tangan pada kain bertuliskan "Kami Menolak Intoleransi". Masyarakat umum tersebut juga diberi stiker dan pin perdamaian. Anggota Duta Perdamaian Madura, M Kamil Akhyari mengatakan, aksi penggalangan tanda tangan dalam usaha mengingatkan masyarakat agar senantiasa memelihara perdamaian. | Sumenep | Jawa Timur | November | Promosi keragaman           | Duta Perdamaian Madura                       |
| 82 | Cabup Sleman Promosikan Toleransi                                                                                                       | Calon Bupati Sleman, Sri Purnomo (SP) mengungkapkan masalah toleransi umat beragama, sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Kasus-kasus yang terkait dengan hubungan antar umat beragama, sangat mungkin terjadi. "Memang sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada gesekan," kata Sri Purnomo, Dialog Kebangsaan bertema "Merawat Kebhinekaan di Sleman", Rabu (02/12/2015).                                                                                                                                                         | Sleman  | Yogyakarta | Desember | Promosi keragaman           | Calon Bupati                                 |
| 83 | Demi Menjaga Kerukunan Antar-Umat Beragama di Jimbaran, Seorang Imam Masjid Tolak Penilaian Terjadi Penyerangan terhadap Masjid di Bali | Ketua Yayasan Baitul Ummah, sekaligus pemilik masjid Abdurrahman bin Auf di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Muhammad Fauzi berpendapat berbeda dengan para ulama dan fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang ada di Bali. Fauzi mengakui masjid Abdurrahman bin Auf memang diserang sekelompok orang untuk mengambil kotak amal di masjid itu. Dia menyebut, hal itu kasus pencurian biasa seperti diberitakan pada 07 Desember 2015                                                                                    | Badung  | Bali       | Desember | Advokasi keyakinan          | Pengurus Masjid Abdurrahman Bin Auf Jimbaran |
| 84 | Wayan Sutama Selaku Pawongan Adat Jimbaran Bersama Pengurus Adat Lainnya ke Masjid Baitul Ummah                                         | kerukunan antar umat beragama di kelurahan Jimbaran senantiasa terjaga. Hal itu dibuktikan dengan adanya kunjungan I Wayan Sutama selaku Pawongan Adat Jimbaran bersama pengurus adat lainnya ke Masjid Baitul Ummah pada 28 Oktober lalu, dalam rangka silaturahmi dengan pengurus dan jamaah. "Semoga ini menjadi momen awal kerukunan umat beragama sejak beliau dilantik khususnya dengan umat Islam di wilayah adat Jimbaran," tuturnya pada 07 Desember 2015                                                                                                                  | Badung  | Bali       | Desember | Menghormati keyakinan       | Pemangku Adat Jimbaran                       |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |             |                   |                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | BEM UIN Ajak Warga Jaga Toleransi                               | Saniman Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta menuturkan, Negara Indonesia merupakan negara yang multicultural, dan memiliki banyak keberagaman terutama dalam agama. “Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik kita diuntut untuk saling menghargai, dan bersikap toleran antar sesama umat beragama” ujar Saniman, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, Minggu (13/12/15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tangerang selatan | Banten     | Desember-13 | Promosi keragaman | BEM UIN                                                                              |
| 86 | MUI Pusat Kemukakan Pentingnya Bertoleransi                     | Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antar-Umat Beragama MUI Pusat Abdul Moqsi Ghazali melihat bahwa toleransi semestinya tak lagi menjadi perbincangan elite karena ia juga terkait erat dengan persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut dia, selama ini isu toleransi hanya menjadi bahan percakapan intelektual di kampus atau perguruan tinggi saja. Karena itu perlu membawa isu toleransi kepada masyarakat akar rumput. “Dengan begitu masyarakat menjadi mengerti apa hakikat toleransi yang diperjuangkan oleh para pejuang toleransi,” ujar Moqsi Ghazali di panggung Festival Toleransi yang digelar The Wahid Institute (TWI), Ahad (13/12/2015). Menurut Moqsi Ghazali, toleransi yang dikembangkan oleh The Wahid Institute bukan hanya yang terkait dengan soal teologi semata. Akan tetapi, bagaimana toleransi itu terjadi di dalam persoalan pengembangan ekonomi masyarakat.                                                                                                           | Depok             | Jawa Barat | Desember    | Promosi keragaman | MUI Pusat Abdul Moqsi Ghazali, Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antar-Umat Beragama |
| 87 | Wahid Institute Gelar Peace Festival Bersama Kelompok Dampingan | Toleransi semestinya tak lagi menjadi perbincangan elite karena ia juga terkait erat dengan persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Moqsi Ghazali yang menjadi pembicara dalam Festival Toleransi yang digelar The Wahid Institute (TWI) di Depok, Ahad (13/12/2015). Selama ini, menurut Moqsi Ghazali, isu toleransi hanya menjadi bahan percakapan intelektual di kampus atau perguruan tinggi saja. Karena itu perlu membawa isu toleransi kepada masyarakat akar rumput. “Dengan begitu masyarakat menjadi mengerti apa hakikat toleransi yang diperjuangkan oleh para pejuang toleransi,” ujar Moqsi Ghazali usai orasi di panggung pada acara tersebut. Moqsi Ghazali memuji TWI Institute mampu membawa isu toleransi kepada masyarakat akar rumput. Menurut Moqsi Ghazali, toleransi yang dikembangkan oleh TWI bukan hanya terkait dengan soal teologi semata. Akan tetapi, bagaimana toleransi itu terjadi di dalam persoalan pengembangan ekonomi masyarakat. | Depok             | Jawa Barat | Desember    | Promosi keragaman | Wahid Institute                                                                      |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                 |          |                   |                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 88 | Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama di Kota Cirebon                                                        | Pada Desember 2015, terdapat dua hari besar umat beragama, Maulid Nabi pada tanggal 24 Desember dan Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember 2015. Untuk memelihara, melestarikan, dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia damai tanpa diskriminasi dan konflik, khususnya di wilayah Cirebon, The Islah Center Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Fahmina, Pelita, PSMTI, Forum Sabtuan dan Gusdurian Cirebon, telah mengadakan forum kerukunan antar umat beragama di Kota Cirebon pada 17 Desember 2015. Acara berupa refleksi bersama dalam menyambut perayaan agama-agama untuk membicarakan isu-isu penting terkait kerukunan umat beragama yang harus dipertahankan dalam penguatan masyarakat yang majemuk di Wilayah III Cirebon. | Cirebon  | Jawa Barat      | Desember | Promosi keragaman | Kelompok LSM Pro Perdamaian Cirebon                               |
| 89 | PAUD Ajarkan Toleransi ke Siswanya                                                                         | Toleransi beragama merupakan salah satu kunci dari perdamaian. Mereka masing-masing merasa benar sendiri dan tidak mau bersentuhan dengan golongan lain. Apalagi di era media sosial sekarang ini, banyak orang mudah terprovokasi. Cobalah lihat foto-foto bocah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sekolah Bukit Aksara Semarang yang mengadakan acara sikap toleransi antar umat beragama. Acara tersebut bertajuk merayakan dua hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari raya Natal dengan tema "Aku Mengasihimu Teman". Diadakan pada tanggal tanggal 17 Desember 2015 lalu.                                                                                                                                                                        | Semarang | Jawa Tengah     | Desember | Praktik toleransi | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sekolah Bukit Aksara Semarang |
| 90 | Kapolda Sulteng. Anggota Harus Menjadi Pelopor dan Pionir dalam Menyampaikan Pesan Toleransi Umat Beragama | Dalam hal Revolusi Mental Kapolda Sulteng pada 18 Desember 2015 menyatakan agar anggota yang beragama Kristen dapat menjadi pelopor dan pionir untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi permasalahan perbedaan karena agama di Sulawesi Tengah. Kalau ada kelompok yang memaksa agar Republik Indonesia menganut bukan berdasarkan pancasila itu yang harus tanpa henti aparat kepolisian melakukan penegakan hukum kepada mereka. Tidak ada lagi tempat bagi orang-orang berbeda paham untuk mencoba mengoyangkan Negara ini kepada paham lainnya.                                                                                                                                                                                   | Kendari  | Sulawesi Tengah | Desember | Promosi keragaman | Polda Suteng                                                      |
| 91 | Toleransi antara Pengurus Masjid dan Gereja di Kota Malang                                                 | Menurut KH Zainuddin Abdul Mukhid, ketua umum Badan Takmir Masjid Jami Kota Malang, antar kedua institusi telah terbangun saling pengertian. "Dalam perayaan Natal nanti, jemaat GPIB Immanuel dipersilahkan untuk menggunakan lahan parkir masjid apabila jumlahnya membludak", ujar mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim tersebut ketika ditemui di kantornya Sabtu (19/12/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Malang   | Jawa Timur      | Desember | Praktik toleransi | Umat Kristiani dan Islam kota Malang                              |
| 92 | Natal Bersama di Papua Berbalut Toleransi                                                                  | Perayaan Natal Mama dan Anak tahun 2015 yang berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR) Cenderawasih pada 20 Desember 2015 berlangsung hikmat dan penuh dengan toleransi umat beragama. Puluhan pemuda-pemudi muslim mengulurkan tangan sukseskan acara tersebut. Ketua Ahlul Baid Indonesia Provinsi Papua, Reza Fauzan Al Hamid mengatakan, keikutsertaan umat muslim dalam perayaan Natal Mama dan Anak, untuk menjaga hubungan toleransi antar umat beragama di Papua, khususnya di Kota Jayapura.                                                                                                                                                                                                                                                            | Jayapura | Papua           | Desember | Praktik toleransi | Masyarakat Papua                                                  |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |          |                   |                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|-------------------|--------------------------------|
| 93  | Harmoni Antar-Umat di Cianjur                                          | Pemeluk Kristen dan Islam di Palalangan erat bergotong royong dalam berbagai aktivitas keseharian. Mulai menjaga gereja dan mengamankan salat Id sampai pesta panen. Penghormatan kepada tradisi Sunda juga jadi tali pengikat keharmonisan. Pada 21 Desember 2015, misalnya, umat Kristiani dapat melakukan misa dengan khusyuh tanpa gangguan                                                                                                                                        | Cianjur  | Jawa Barat       | Desember | Praktik toleransi | Warga Desa Palalangan          |
| 94  | Radikalisme Sebabkan Toleransi Beragama Menurun                        | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai nilai toleransi umat beragama di Indonesia mulai menurun. Hal itu disebabkan semakin menguatnya radikalisme di Indonesia. Selain menurunnya toleransi beragama, Tjahjo juga menyebutkan semakin meningkatnya ancaman terorisme yang terjadi belakangan ini di tanah air. "Kepolisian hampir setiap hari menangkap (diduga teroris). Ini berarti ada virus menjalar. Virus ini harus dimatikan," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (21/12/2015). | Jakarta  | DKI Jakarta      | Desember | Deradikalisasi    | Mendagri                       |
| 95  | Lawan Radikalisme dengan Tumbuhkan Kembali Budaya Toleransi            | Untuk mencegah pergesekan dan hal-hal yang mencederaikan toleransi, mereka mendeklarasikan "Malang Damai" pada 21 Desember 2015. Isinya mengajak seluruh elemen lintas agama untuk menjaga kerukunan dan mencegah gerakan massa yang memicu perpecahan dan intoleransi.                                                                                                                                                                                                                | Malang   | Jawa Timur       | Desember | Promosi keragaman | Masyarakat Lintas Agama Malang |
| 96  | Jaga Keutuhan Bangsa, Kodim 1408 Gelar Diskusi Toleransi Umat Beragama | Ceramah & Diskusi Harmoni antar Umat beragama dalam Frame Kebangsaan mengungkap tema "Toleransi Antar Umat Beragama Sebagai Pilar Utama Kekuatan Bangsa". Kegiatan itu berlangsung di Aula Sudirman Kodim 1408/Bs, Jl Lanto Dg Pasewang, Selasa (22/12/2015).                                                                                                                                                                                                                          | Makassar | Sulawesi Selatan | Desember | Promosi keragaman | Kodim 1408 Makassar            |
| 97  | Rakor FKUB untuk Mantapkan Toleransi                                   | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tegal menggelar Rapat Koordinasi FKUB Kota Tegal dengan lintas sektoral dan pihak terkait di gedung MUI Kota Tegal, Jl. Hangtuah No. 27 Tegal, Selasa, (22/12/2015). Rakor digelar dalam rangka Pemantapan toleransi umat beragama di Kota Tegal tahun 2015 dengan menghadirkan narasumber Kakankemendagri Kota Tegal H. Nuril Anwar dan Kapolresta Tegal AKBP Firman Darmasyah.                                                             | Tegal    | Jawa Tengah      | Desember | Promosi keragaman | FKUB Kota Tegal                |
| 98  | Walkot Palopo Imbau Masyarakat Jaga Toleransi                          | Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, mengimbau seluruh masyarakat Kota Palopo untuk menjaga toleransi beragama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2016 pada 22 Desember 2015. Menurut Judas, sebagian masyarakat kristiani di Kota Palopo saat ini sudah ada yang memulai rangkaian acara perayaan Natal di sejumlah gereja, termasuk kalangan masyarakat.                                                                                                                            | Palopo   | Sulawesi Selatan | Desember | Praktik toleransi | Walikota Palopo                |
| 99  | Muhammadiyah Dorong Toleransi                                          | Muhammadiyah mendorong kehidupan toleransi yang lebih otentik dengan membangun sikap terbuka, saling menghormati dan bekerjasama dengan pemeluk agama lain dalam bentuk yang konstruktif dan produktif seperti diberitakan pada 23 Desember 2015                                                                                                                                                                                                                                       | Jakarta  | DKI Jakarta      | Desember | Promosi keragaman | Muhammadiyah                   |
| 100 | PBNU: Maulid Nabi-Natal Bersamaan Wujudkan Toleransi                   | Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mensyukuri terjadinya dua perayaan agama berbeda, kelahiran Nabi Muhammad SAW (Maulid Nabi) serta Hari Raya Natal, yang waktunya hampir bersamaan, sehingga dapat mewujudkan toleransi antarumat beragama. "Kami sangat bersyukur di penghujung 2015 ada dua peristiwa besar yang harus kita syukuri yaitu Maulid Nabi dan Natal," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jakarta, Rabu 23/12                                                         | Jakarta  | DKI Jakarta      | Desember | Promosi keragaman | PBNU                           |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |          |                       |                          |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| 101 | Ahok Kutip Gus Dur Soal Toleransi                      | Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memaknai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Natal dengan bertoleransi antar umat beragama. Seharusnya, kata Ahok dua perayaan agama yang berdekatan tidak dijadikan alasan adanya kekisruhan. Ahok sependapat dengan apa yang pernah diucapkan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Kita harapannya, kedua (jemaah) pengikut nabi besar, dan di dunia banyak pengikutnya. Harusnya, kata Gus Dur, kalau kamu beribadah dengan benar kamu akan makin humanis. Enggak mungkin kamu saling benci satu sama lain," ujar Ahok di Gereja Immanuel, Kamis (24/12). | Jakarta       | DKI Jakarta | Desember | Promosi keragaman     | Gubernur DKI             |
| 102 | Potret Toleransi di Tanjung Priok                      | Masyarakat Indonesia yang belum paham arti toleransi pemeluk antaragama mesti melihat kerukunan beragama warga RT 06 RW 16 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di permukiman dekat pelabuhan dan terminal ini, sebuah gereja dan masjid berdiri berdampingan menghadap Jalan Enggano sebagaimana diberitakan pada 24 Desember 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jakarta Utara | DKI Jakarta | Desember | Praktik toleransi     | Masyarakat Tanjung Priok |
| 103 | Ahok Jaga Toleransi                                    | Ahok mengharapkan ibadah malam Natal oleh umat Nasrani dan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh umat Islam yang jatuh pada tanggal yang sama berjalan dengan khidmat, lancar dan aman. "Kita harap semua berjalan khidmat, lancar dan aman dalam suasana yang saling menghargai satu sama lain dan menjaga kerukunan antarumat beragama," tegasnya pada 24 Desember 2015                                                                                                                                                                                                                                                               | Jakarta       | DKI Jakarta | Desember | Menghormati keyakinan | Gubernur Ahok            |
| 104 | MUI Maluku Jaga Kerukunan                              | MUI Maluku ajak umat beragama jaga kerukunan pada Kamis, 24/12/2015 mengajak umat Muslim dan umat beragama lainnya untuk menjaga kerukunan antar-umat beragama jelas puncak paska perayaan Natal 2015. Wakil Ketua MUI Provinsi Maluku, Husein Toisutta di Ambon pada 24 Desember 2015 mengajak umat Muslim dan lainnya untuk menjaga kerukunan dan membangun cinta kasih antar-sesama                                                                                                                                                                                                                                          | Ambon         | Maluku      | Desember | Promosi keragaman     | MUI Ambon                |
| 105 | HKBP Rawamangun Serukan Toleransi Antara Umat Beragama | Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rawamangun, Jakarta Timur, menyerukan toleransi antarumat beragama dalam momentum Hari Raya Natal kali ini karena berdampingan juga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. "Kebetulan Natal kali ini persis berurutan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, untuk kita yang menganut agama berbeda-beda, hendaknya hidup rukun satu sama lain," kata Pendeta HKBP Resort Rawamangun Pdt Dr Binsar Nainggolan saat ditemui di Jakarta, Jumat, 25 Desember 2015                                                                                                                | Jakarta       | DKI Jakarta | Desember | Promosi keragaman     | Gereja HKBP              |

|     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |          |                   |                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 106 | Toleransi Beragama Tercermin di Kotawaringin Timur                                                                                                | <p>Suasana toleransi beragama sangat terasa saat “open house” Natal di rumah jabatan bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.</p> <p>“Kami sengaja datang untuk mengucapkan selamat kepada pak penjabat bupati yang merayakan Natal. Kita memang beda keyakinan, tapi toleransi harus tetap kita jaga,” kata Rahmad, salah seorang tamu yang datang, Jumat 25/12/2015. Sejak “open house” dibuka sekitar pukul 10:00 WIB, warga datang silih berganti. Sebagian dari mereka baru pulang dari gereja dan ada pula yang memang berangkat dari rumah untuk menghadiri silaturahmi tersebut. Selama ini, biasanya saat Natal, bupati yang menggelar safari Natal berkunjung ke rumah-rumah tokoh agama dan pejabat yang merayakan Natal karena kebetulan bupatinya beragama Islam. Namun tahun ini dilakukan “open house” Natal di rumah jabatan bupati karena kebetulan pula Penjabat Bupati Kotawaringin Timur, Godlin yang dilantik pada akhir Oktober lalu, beragama Kristen sehingga perayaan Natal digelar di rumah jabatan.</p> | Kota Waringin Timur | Kalimantan Tengah | Desember | Praktik toleransi | Masyarakat Kota Waringin Timur    |
| 107 | Potret Toleransi di Pontianak                                                                                                                     | <p>Di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat, berdiri dua rumah ibadah yang persis bersebelahan, Masjid Nurbaitillah dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jeruju. Gereja itu telah berdiri sejak 33 tahun lalu. Pada 25 Desember 2015 menjelang Jumatan (saat Salat Jumat), di Gereja HKBP juga tengah berlangsung Misa Natal. Banyak jamaatnya yang terlihat berasal dari luar lingkungan Jalan Padat Karya. Namun, kenyamanan beribadah satu dengan lainnya tak terganggu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pontianak           | Kalimantan Barat  | Desember | Praktik toleransi | Masyarakat Pontianak              |
| 108 | Banser Jaga Gereja                                                                                                                                | <p>Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Kotamobagu turut andil dalam pengamanan perayaan Natal 25 Desember 2015, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua GP Ansor Dhani Mokoginta SH pada beberapa waktu lalu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kotamobagu          | Sulawesi Utara    | Desember | Praktik toleransi | Banser NU                         |
| 109 | Pangdam IM Ajak Jaga KUB                                                                                                                          | <p>Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto mengajak kepada seluruh umat beragama agar selalu menjaga kebersamaan dengan terus menjalin hubungan silaturahmi dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan oleh Pangdam usai pelaksanaan shalat Jumat di mesjid Al-Fajar bersama warga Gampong Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, sekaligus bersilaturahmi bersama warga saat mengadakan kunjungannya ke Singkil pada Jumat 25 Desember 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aceh Singkil        | Aceh              | Desember | Promosi keragaman | Pangdam IM                        |
| 110 | Pastor Gereja Santo Yusuf, Romo Yulius Hirnawan, Mengajak Seluruh Umat Katolik untuk Selalu Menjaga Kebersamaan dan Kerukunan Antar-Umat Beragama | <p>Ratusan umat Katolik memadati Gereja Santo Yusuf di kawasan Cangkol, Kota Cirebon, untuk mengikuti prosesi Perayaan Misa Natal tahun 2015, Jumat (25/12/2015). Dalam Misa Natal yang berlangsung khidmat tersebut, Pastor Gereja Santo Yusuf, Romo Yulius Hirnawan, mengajak seluruh umat Katolik untuk selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Romo Yulius juga mengingatkan jemaat agar selalu menjadi terang bagi setiap orang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cirebon             | Jawa Barat        | Desember | Promosi keragaman | Pastor Gereja Santo Yusuf Cirebon |



|     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |          |                       |                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 111 | Toleransi Agama, Tirulah Salatiga                              | Pada saat merayakan Natal (25/12/2015), para pemuda Masjid Agung Darul Amal yang berdekatan dengan lapangan pun turut membantu kelancaran ibadah Natal dengan mengatur masuknya kendaraan dan mengatur para warga yang akan mengikuti ibadah. Setelah itu para pemuda masjid akan menyalami dan mengucapkan hari Natal kepada para umat Kristiani. Fenomena ini sangat berbanding terbalik dengan realita yang dihadapi Indonesia dimana umat Muslim haram mengucapkan hari raya Natal kepada umat Kristiani.                                                                                                                                                                      | Salatiga  | Jawa Tengah | Desember | Praktik toleransi     | Masyarakat Salatiga                                          |
| 112 | Indonesia Jadi Contoh Toleransi Dunia                          | Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo menceritakan beberapa pengalamannya soal toleransi beragama Indonesia di mata dunia. Salah satunya adalah pengalamannya ketika menemani Presiden Italia Sergio Mattarella yang berkunjung ke Indonesia.<br>“Dia singgah di Gereja Katedral setelah itu langsung masuk ke Masjid Istiqlal,” ujar Suharyo di Gereja Katedral, Jalan Katedral, Jumat (25/12/2015). Suharyo sempat bertanya apa tujuan Presiden Italia mengunjungi dua rumah ibadah tersebut. Jawabannya sungguh mengagetkan Suharyo. Presiden Italia mengatakan bahwa dia ingin belajar bagaimana caranya bisa hidup berdampingan antar-umat beragama dari masyarakat Indonesia. | Jakarta   | DKI Jakarta | Desember | Promosi keragaman     | Uskup Agung Jakarta Ign. Suharyo                             |
| 113 | Potret Toleransi Beragama Saat Natal dan Maulid Nabi di Banten | Perayaan Maulid Nabi dan Natal yang bersamaan menjadi momen penguatan rasa toleransi antarumat beragama, budaya, hingga etnis di bumi Seribu Kiai Sejuta Santri ini.<br>“Harus kita jaga toleransi beragama di Banten. Mayoritas harus jadi pelindung minoritas dan yang minoritas harus mau menghormati,” kata ketua keluarga besar Kesultanan Banten, Tubagus (Tb) A Abbas Wasee, Jumat (25/12/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banten    | Banten      | Desember | Praktik toleransi     | Keluarga besar Kesultanan Banten, Tubagus (Tb) A Abbas Wasee |
| 114 | Toleransi Umat Beragama di Gang Assalam                        | Toleransi beragama selama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriyah yang digelar berdekatan dengan perayaan Natal 2015 berlangsung di RT 1 RW 17 Gang Assalam Jln. Lurah No. 242 Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. Terdapat sebuah Mesjid Assalam yang berdampingan dengan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Kota Cimahi, tiap umat beragama memberi kesempatan ibadah sesuai agama masing-masing. Pada perayaan Natal 2015 (25/12/2015, warga muslim pun tak mempermasalahkan kegiatan kebaktian di gereja yang sedang berlangsung diikuti sekitar 165 orang dipimpin Pendeta Tambunan                                                             | Cimahi    | Jawa Barat  | Desember | Praktik toleransi     | Masyarakat Gang Assalam                                      |
| 115 | Polisi Gandeng GP Ansor Jaga Kerukunan Umat Beragama           | Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tuban, khususnya di Kecamatan Rengel, pihak Kepolisian Sektor Rengel, Polres Tuban menggandeng Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan juga organisasi masyarakat lainnya, Minggu (26/07/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tuban     | Jawa Timur  | Desember | Menghormati keyakinan | Polsek Rengel                                                |
| 116 | Kemenag Bengkalis Sosialisasikan Kerukunan Umat Beragama       | Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bengkalis, melakukan kegiatan sosialisasi kerukunan antar umat beragama bertempat bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bengkalis, Senin (30/11/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bengkalis | Riau        | Desember | Promosi keragaman     | Kemenag Bengkalis                                            |



|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |          |                   |              |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-------------------|--------------|
| 117 | Gubernur NTT Raih KUB Award | Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Drs Frans Lebu Raya meraih penghargaan dalam kategori kepala daerah pada Malam Anugerah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015. Frans dinilai berhasil melestarikan kerukunan umat beragam di wilayahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag-RI) menyelenggarakan Malam Anugerah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015 di di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Rabu (30/12/2015). | Kupang | NTT | Desember | Promosi keragaman | Gubernur NTT |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-------------------|--------------|